



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN
Indonesian Financial Transaction Reports and Analysis Center

**MENJAGA INDONESIA DENGAN DATA: MEWUJUDKAN ASTA CITA
LAPORAN SEMESTER 2025**

Protecting Indonesia with data: Realising Asta Cita
Mid-year Report 2025

Supervisory Official: Supriadi (Head of INTRAC AML-CFT Empowerment Partnership Center)

Coordinator: Haryono Budi Pamungkas

Editorial Team: Andi Emil Hidayat, Mashuda Taufiqi, Putri Artika Resyakasih, Irwansyah

Layout Designer: Mulyana, Imam Apriyogo

Cover Illustration: Istimewa

Administration: Rieke Widayarsi

Contributor: Tri Andriyanto, Dyah Ferawati, Dinda Ulfa Sri Rejeki, Wendhiarto Arief Digdoyo, Kristina Widhi Prasetyanti, Tri Indah Purwanti, Otniel Yustitia Kristian, Arya Hendro Yudo, Retno Dwi Larasati, Muhammad Miftah Farid, Dwiki Krisna Saputra, Ratih Putri Pertiwi, Shanti Dewi Siawanta, Aulia Riskafina Kusuma

Quality Assurance: Ellya Sulistiyani

21x21 cm - xii,111 pages

ISSN : 2623-2766

SK Nomor 0005.26232766/Jl.3.1/SK.ISSN/2018.09

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

Indonesian Financial Transaction Reports and Analysis Center

Jl. Ir. H. Juanda No. 35 Jakarta Pusat

www.ppatk.go.id

Copyright © 2025 by Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.

All rights reserved.

No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means—electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise—without the prior written permission of the publisher.

Visi & Misi

Vision & Mision



VISI (Vision)

Bersinergi
Membangun
Indonesia Tanpa
Pencucian
Uang Menuju
Indonesia Emas
2045

Synergy for a Money
Laundering-Free Indonesia
Towards Golden Indonesia
2045

MISI (Mission)



Memperkuat tata kelola pelaporan anti pencucian uang

Strengthening anti-money laundering reporting governance



Meningkatkan kualitas dan tindak lanjut produk intelijen keuangan PPATK

Improving the quality and follow-up of PPATK financial intelligence products



Mewujudkan efektivitas kerjasama pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang di tingkat nasional, regional dan internasional

Achieving effective cooperation in the prevention and eradication of money laundering at the national, regional, and international levels



Memperkuat profesionalitas, kapabilitas dan integritas kelembagaan PPATK

Strengthening the professionalism, capabilities and institutional integrity of PPATK



TUJUAN (Objective)

“Terwujudnya efektivitas kinerja rezim anti pencucian uang yang terintegrasi dan inklusif”

The realization of an effective, integrated, and inclusive anti-money laundering regime



SASARAN STRATEGIS (Strategic Objective)

1. Meningkatnya efektivitas kinerja PPATK dalam pencegahan dan pemberantasan TPPU, TPPT, dan PPSPM.
 2. Meningkatnya kinerja revitalisasi birokrasi PPATK.
1. Enhanced effectiveness of PPATK's performance in preventing and combating money laundering (ML), terrorism financing (TF), and the proliferation financing of weapons of mass destruction (PFWMD).
 2. Improved performance of PPATK bureaucratic revitalisation.



TUGAS Roles

PPATK MEMPUNYAI TUGAS MENCEGAH DAN MEMBERANTAS TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

PPATK is entrusted with the critical task of preventing and combating money laundering.

Sumber: UU No. 8 Tahun 2010

FUNGSI Functions

Dalam melaksanakan tugasnya, PPATK mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang.
2. Pengelolaan data dan informasi yang diperoleh PPATK.
3. Pengawasan terhadap kepatuhan Pihak Pelapor; dan
4. Analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi Transaksi Keuangan yang berindikasi tindak pidana Pencucian Uang dan/ atau tindak pidana lain.

In performing its duties, PPATK operates under the following core functions:

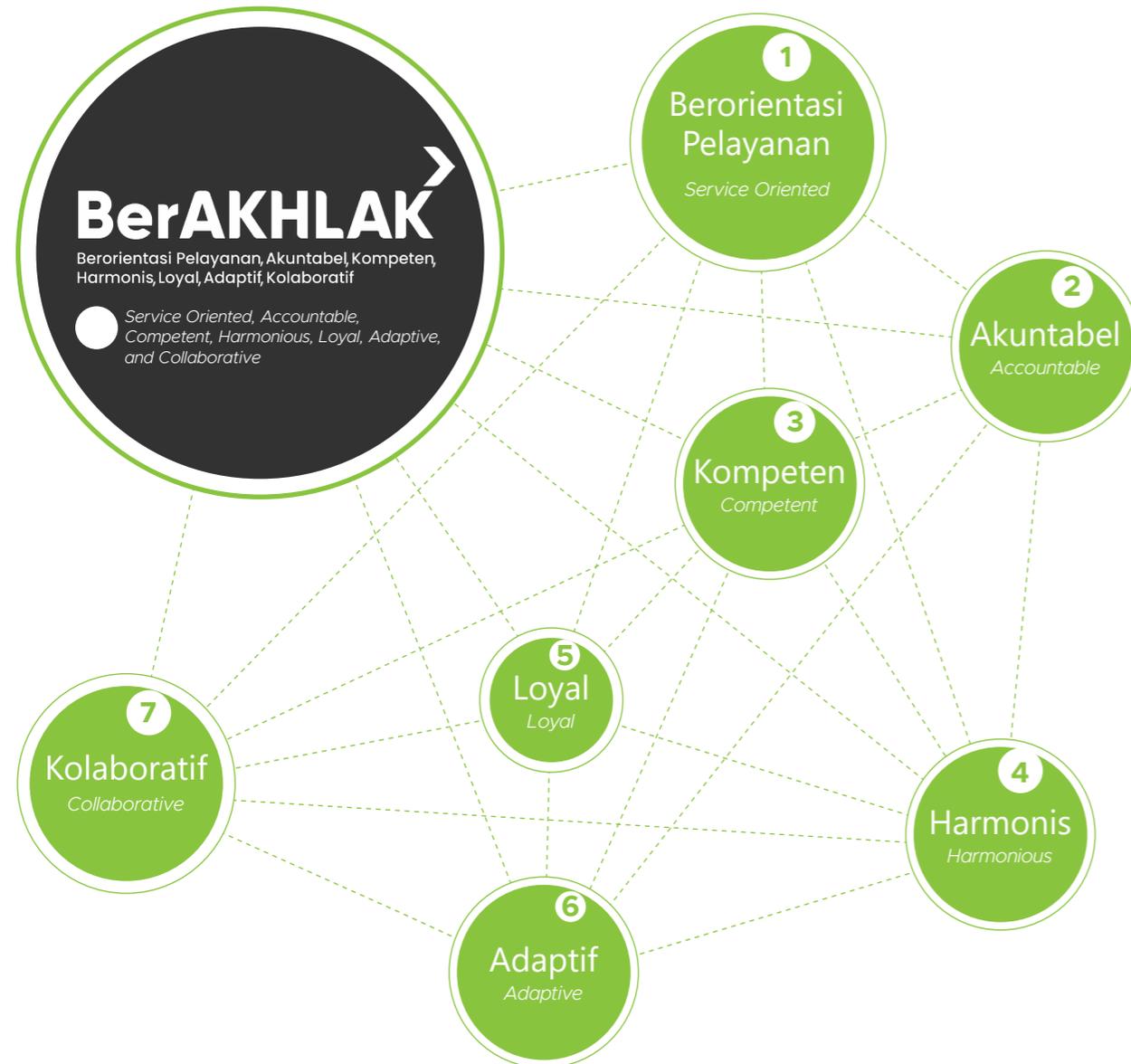
1. Preventing and eradicating money laundering offenses.
2. Managing and utilizing data and information obtained by PPATK.
3. Supervising the compliance of reporting entities.
4. Analyzing or examining reports and information on financial transactions that may indicate money laundering and/or other criminal activities.

PPATK diibaratkan sebagai seorang penjaga gerbang yang setia, menjaga pintu masuk sistem keuangan Indonesia. Mandat yang diembannya adalah kunci untuk menjaga agar hanya transaksi yang sah dan aman yang dapat melintas. Dalam menjalankan tugasnya, integritas adalah salah satu bahan utama dari kunci tersebut untuk menjaga setiap celah yang bisa dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan.

PPATK can be likened to a vigilant gatekeeper, steadfastly safeguarding the integrity of Indonesia's financial system. Its mandate acts as the key to ensuring that only legitimate and secure transactions are allowed to pass through. In fulfilling this role, integrity remains a vital element, guarding against every vulnerability that criminals might exploit.

Core Value of Civil Servant

Budaya Kerja ASN



Core Value of Civil Servant

BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

Service Oriented, Accountable, Competent, Harmonious, Loyal, Adaptive, and Collaborative

Berorientasi Pelayanan

Service Oriented

- Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat;
- Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan;
- Melakukan perbaikan tiada henti.
- *Understand and fulfill the needs of the community;*
- *Friendly, dexterous, solutive and reliable;*
- *Continuous improvement.*

Akuntabel

Accountable

- Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin dan berintegritas tinggi;
- Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien;
- Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan.
- *Performing duties honestly, responsibly, carefully, with discipline and integrity;*
- *Utilising state assets and properties responsibly, effectively and efficiently;*
- *Avoiding abuse of authority.*

Kompeten

Competent

- Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah;
- Membantu orang lain belajar;
- Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik.
- *Improving personal competence to meet ever-changing challenges;*
- *Assisting others to learn;*
- *Performing tasks with the best quality.*

Harmonis

Harmonious

- Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya;
- Suka menolong orang lain;
- Membangun lingkungan kerja yang kondusif.
- *Respects everyone regardless of their background;*
- *Love to help others;*
- *Building a conducive work environment.*

Loyal

Loyal

- Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah;
- Menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi, dan negara;
- Menjaga rahasia jabatan dan negara.
- *Upholding the ideology of Pancasila, the Constitution of the Republic of Indonesia 1945, to be loyal to the State of the Republic of Indonesia and the legitimate government;*
- *Preserving the reputation of civil servant, leaders, agencies, and the state;*
- *Guarding office and state secrets.*

Adaptif

Adaptive

- Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan;
- Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas;
- Bertindak proaktif.
- *Adaptive to change*
- *Innovative and Creative*
- *Proactive*

Kolaboratif

Collaborative

- Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi;
- Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah;
- Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama.
- *Provide opportunities for various parties to contribute;*
- *Open to working together to generate added value;*
- *Utilizing various resources for a common goal.*



STRUKTUR ORGANISASI

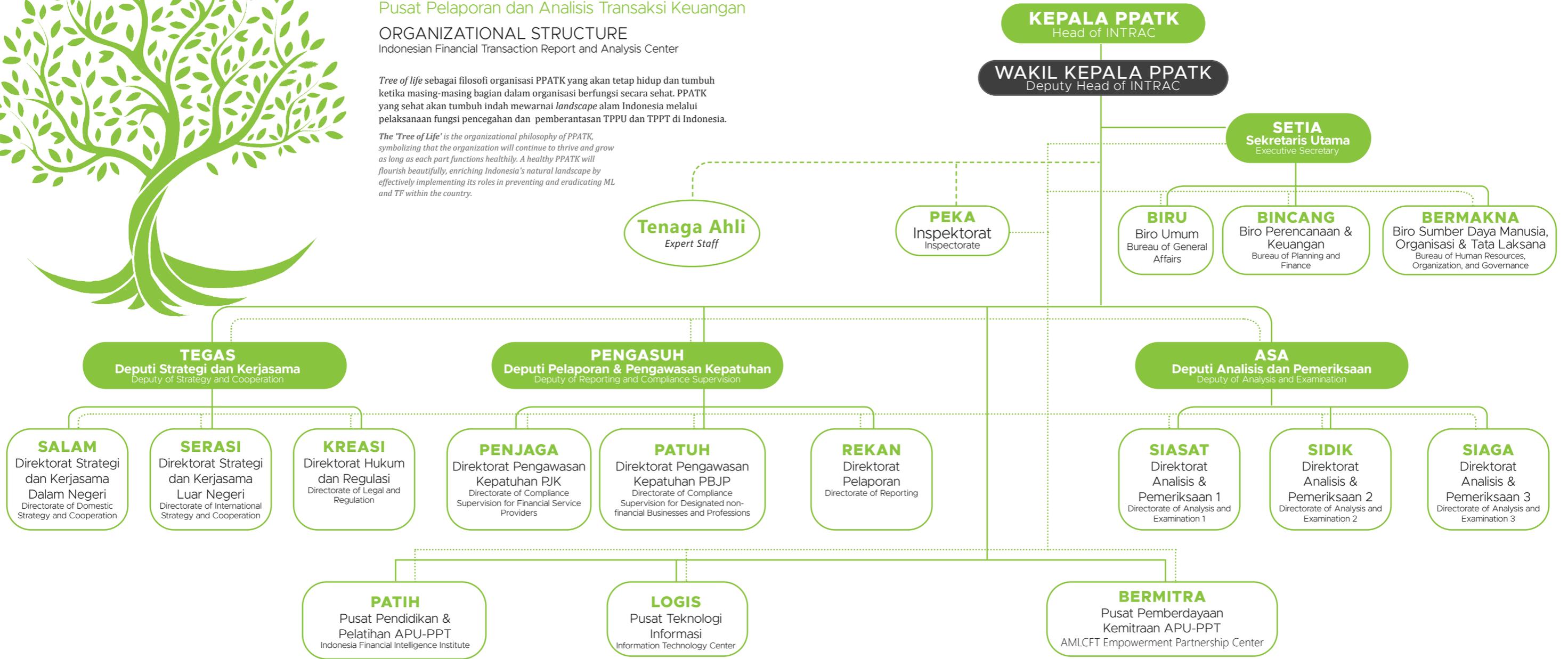
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

ORGANIZATIONAL STRUCTURE

Indonesian Financial Transaction Report and Analysis Center

Tree of life sebagai filosofi organisasi PPAATK yang akan tetap hidup dan tumbuh ketika masing-masing bagian dalam organisasi berfungsi secara sehat. PPAATK yang sehat akan tumbuh indah mewarnai *landscape* alam Indonesia melalui pelaksanaan fungsi pencegahan dan pemberantasan TPPU dan TPPT di Indonesia.

The "Tree of Life" is the organizational philosophy of PPAATK, symbolizing that the organization will continue to thrive and grow as long as each part functions healthily. A healthy PPAATK will flourish beautifully, enriching Indonesia's natural landscape by effectively implementing its roles in preventing and eradicating ML and TF within the country.



KATA PIMPINAN

MESSAGE FROM THE LEADERSHIP

DENGAN mengucap Syukur Alhamdulillah, Laporan Semester I PPATK 2025 hadir dengan tema “Menjaga Indonesia dengan Data: Mewujudkan Asta Cita.” Tema ini menegaskan arah PPATK ke depan: data intelijen yang kami kelola menjadi fondasi utama untuk menjaga kekayaan negara dan mewujudkan cita-cita pembangunan nasional. PPATK berikhtiar untuk mengubah data menjadi kekuatan nyata, agar uang rakyat tidak tersia-siakan, melainkan kembali menjadi kesejahteraan yang dirasakan bersama.

Uang adalah energi. Energi yang mampu menghidupkan pendidikan, kesehatan, dan pembangunan. Namun, energi yang sama bisa disalahgunakan menjadi sumber kejahatan: korupsi, narkoba, *illegal logging*, judi online, terorisme dan kejahatan keuangan lainnya. Di titik perbatasan itulah PPATK berdiri, menjaga agar energi bangsa tetap menjadi kekuatan untuk kesejahteraan, bukan berubah menjadi ancaman bagi masa depan.

Dalam buku *Why Nations Fail*, Daron Acemoğlu dan James A. Robinson menulis: “Nations prosper when institutions are inclusive, channeling talents and resources for the benefit of many, not the few.” Sebuah bangsa akan maju dan makmur bila institusinya bersifat inklusif, yaitu mampu menyalurkan bakat dan sumber daya untuk kepentingan banyak orang, bukan hanya untuk segelintir orang.

WITH gratitude to Allah, the PPATK 2025 First Semester Report is presented with the theme ‘Protecting Indonesia with Data: Realising Asta Cita.’ This theme emphasises the future direction of PPATK: the intelligence data we manage will become the main foundation for safeguarding the country's wealth and realising national development goals. PPATK strives to transform data into tangible power, ensuring that public funds are not wasted but instead returned as shared prosperity.

Money is energy. Energy that can fuel education, health, and development. However, this same energy can be misused as a source of crime: corruption, narcotics, illegal logging, online gambling, terrorism, and other financial crimes. It is at this crossroads that PPATK stands, ensuring that the nation's energy remains a force for prosperity, rather than becoming a threat to the future.

In *Why Nations Fail*, Daron Acemoğlu and James A. Robinson write: ‘Nations prosper when institutions are inclusive, channelling talents and resources for the benefit of many, not the few.’ A nation will progress and prosper if its institutions are inclusive, capable of channelling talent and resources for the benefit of many, not just a select few.

PPATK ingin menjadi bagian dari institusi itu. Sepanjang tahun 2025, kami menjaga agar aliran uang negeri ini tetap mengalir ke jalan yang benar. Kami memodernisasi sistem analisis dengan *big data* dan kecerdasan buatan agar jejak kejahatan tak lagi bisa bersembunyi. Kami bersinergi dengan aparat hukum, otoritas keuangan, dan mitra internasional, karena kejahatan tak lagi mengenal batas negara. Kami menghentikan transaksi bernilai triliunan rupiah yang berpotensi merampas hak rakyat dari praktik judi online, korupsi dan kejahatan pidana lainnya. Kami juga menyusun Indeks Efektivitas Rezim APUPPT, alat baru untuk mengukur sejauh mana bangsa ini serius melawan tindak pidana pencucian uang.

Tahun 2025 menjadi momentum penting ketika bangsa ini meneguhkan Asta Cita, delapan arah pembangunan nasional sebagai ikhtiar merawat janji kemerdekaan. Dalam kerangka itu, PPATK menempatkan data sebagai peta yang menuntun langkah: dari data kita membaca pola, dari pola kita mengenali bahaya, dan dari pengetahuan itu kita berusaha mencegah bencana.

Namun, semua capaian ini pada akhirnya tidak semata tentang angka. Di balik laporan dan analisis, ada wajah-wajah yang ingin dilindungi: petani yang ingin pupuknya disubsidi-tidak dikorupsi, nelayan yang hasil tangkapannya tidak ingin dirampas praktik ilegal, ibu yang mendambakan anaknya sekolah tanpa biaya yang bocor ke mafia anggaran. Itulah yang sesungguhnya dijaga PPATK: bukan hanya stabilitas perekonomian, melainkan hakikat sederhana bahwa uang rakyat harus kembali kepada rakyat.

PPATK wants to be part of that institution. Throughout 2025, we will ensure that the flow of money in this country remains on the right track. We are modernising our analysis system with big data and artificial intelligence so that the traces of crime can no longer be hidden. We are working together with law enforcement agencies, financial authorities and international partners, because crime no longer recognises national borders. We stopped transactions worth trillions of rupiah that had the potential to deprive the people of their rights through online gambling, corruption and other criminal acts. We also compiled the APUPPT Regime Effectiveness Index, a new tool to measure the extent to which this nation is serious about combating money laundering.

The year 2025 will be an important moment when this nation reaffirms Asta Cita, the eight directions of national development as an effort to uphold the promise of independence. Within that framework, PPATK places data as a map that guides our steps: from data we read patterns, from patterns we recognise dangers, and from that knowledge we strive to prevent disasters.

However, all these achievements are ultimately not just about numbers. Behind the reports and analyses are the faces we seek to protect: farmers who want their fertilisers subsidised—not corrupted, fishermen who want their catches not seized by illegal practices, mothers who dream of their children attending school without funds leaking to budget mafias. That is what PPATK truly safeguards: not just economic stability, but the simple truth that the people's money must return to the people.

PPATK memang bekerja dengan data, tetapi di balik baris-baris data itu kami membaca cerita bangsa. Kami percaya menjaga data berarti menjaga cita-cita. Dengan data yang jernih, dengan integritas yang teguh, PPATK akan terus menjadi pengawal negeri dalam perjalanan mewujudkan Asta Cita.

Laporan ini tidak hanya menjadi catatan kinerja, tetapi juga pengingat: bahwa perjuangan melawan kejahatan keuangan adalah perjuangan untuk menjaga harapan paling dasar, hidup yang lebih adil, lebih sejahtera, dan lebih bermartabat.

The PPATK does work with data, but behind those lines of data we read the story of the nation. We believe that protecting data means protecting ideals. With clear data and unwavering integrity, the PPATK will continue to be the guardian of the nation on its journey to realise the Asta Cita.

This report is not merely a record of performance, but also a reminder: that the fight against financial crime is a fight to uphold the most basic hopes—a life that is fairer, more prosperous, and more dignified.

Jakarta, 30 Juni 2025 | Jakarta, 30 Juni 2025

Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

Head of Indonesian Financial Transaction Reports and Analysis Center

IVAN YUSTIAVANDANA

WAJAH LAPORAN SEMESTER PPATK

PPATK MIDYEAR REPORT COVER



2025
Menjaga Indonesia dengan Data,
Mewujudkan Asta Cita
*Protecting Indonesia with Data,
Realising Asta Cita*



2024 | Milestone



2023 | Sambut Tahun Politik



2022 | 2 Dekade Rezim APUPPT

Daftar Isi

CONTENTS

Visi & Misi (<i>Vision & Mision</i>)	iii	Dari Koordinasi Ke Aksi (<i>From Coordination to Action</i>)	37
Tugas & Fungsi (<i>Roles & Functions</i>)	v	Membendung Kejahatan Siber (<i>Combating Cybercrime</i>)	38
Budaya Kerja ASN (<i>Core value of civil servant</i>)	vi	Pemantauan Tindak Lanjut HA/HP/Informasi (<i>Follow-up Monitoring of AR/ER/Information</i>)	40
Struktur Organisasi (<i>Organizational Structure</i>)	viii	Pemantauan Tindak Lanjut Produk PPAK (<i>Monitoring of Follow-up on PPAK Product</i>)	41
Kata Pimpinan (<i>Leadership Message</i>)	x	Testimoni Mitra Penegak Hukum (<i>Law Enforcement Partner Testimonials</i>)	42
Wajah Laporan Semester (<i>Midyear Report Cover</i>)	1	Pemberian Keterangan Ahli PPAK (<i>Provision Of Expert Testimony by PPAK</i>)	43
Daftar Isi (<i>Contents</i>)	2		
Strategi Nasional (<i>National Strategy</i>)	4		
Rencana Strategi (<i>Stratgeic Plan</i>)	7		
Korelasi RPJMN-PPATK (<i>RPJMN Alignment</i>)	8		
Proses Bisnis (<i>Business Process</i>)	12		
LIPUTAN KHUSUS - SPECIAL REPORT			
Menjaga Indonesia dengan Data, Mewujudkan Asta Cita (<i>Protecting Indonesia with Data, Realising Asta Cita</i>)	14		
BAB 1 - CHAPTER 1			
Henti Sementara, Langkah awal hadang kejahatan finansial (<i>Temporary Suspension: First Step in Combating Financial Crime</i>)	23		
Statistik Penghentian Sementara Transaksi (<i>Statistics On Temporary Suspension Of Transactions</i>)	25		
Kasus Peretasan Bank Dan Aliran Dana Ke Kripto (<i>Bank Hacking Cases and Fund Flows to Cryptocurrency</i>)	26		
Diseminasi Berdampak Tinggi (<i>High-Impact Dissemination</i>)	28		
Kontribusi PPAK Terhadap Penerimaan Negara (<i>PPAK's Contribution to State Revenue</i>)	33		
BAB 2 - CHAPTER 2			
Kawal Penegakan Hukum dengan Data Intelijen (<i>Supporting Law Enforcement with Intelligence Data</i>)	35		
		BAB 3 - CHAPTER 3	
		Menangkap Sinyal Awal Dari Suara Publik (<i>Detecting early signals from public voices</i>)	45
		Rangkuman Trend (<i>Summary of Trends</i>)	47
		Jenis Laporan Pengaduan Masyarakat (<i>Types Of Public Complaint Reports</i>)	48
		Layanan Bantuan (<i>Assistance Services</i>)	49
		Menangkap Isyarat dari Ruang Digital (<i>Capturing Signals From The Digital Space</i>)	52
		Sentimen Publik (<i>Public Sentiment</i>)	54
		Jejak Pemberitaan Dan Media Sosial (<i>Media Coverage And Social Media Footprint</i>)	55
		BAB 4 - CHAPTER 4	
		Integritas yang Bergerak dari Dalam (<i>Integrity that Comes from Within</i>)	57
		Penguatan Pengawasan Internal Dan Budaya Kerja (<i>Enhancing Internal Control Systems and Work Culture</i>)	59
		Kolaborasi untuk Perbaikan Bersama (<i>Collaboration for Mutual Improvement</i>)	61

Dukungan Punggawa Berintegritas dan Kompeten (<i>Support From Integrity And Competent Leaders</i>)	62	BAB 6 - CHAPTER 6	
Melahirkan Punggawa Integritas Keuangan (<i>Giving Birth To Financial Integrity Champions</i>)	63	Kolaborasi untuk Negeri (<i>Collaboration For The Nation</i>)	89
Penguatan Literasi Dan Kajian Keilmuan (<i>Strengthening Literacy And Scientific Studies</i>)	65	Jaga Masa Depan Sistem Keuangan Nasional (<i>Safeguarding the Future of The National Financial System</i>)	90
Jurnal Pencegahan Pencucian Uang Dan Pemberantasan Pendanaan Terorisme (<i>The Journal of AMLCFT</i>)	67	Perkuat Sinergi Nasional Cegah Pencucian Uang Dan Pendanaan Terorisme (<i>Strengthening National Synergy To Prevent Money Laundering And Terrorism Financing</i>)	91
Akuntabilitas Anggaran Dan Transparansi Layanan (<i>Budget Accountability And Service Transparency</i>)	68	Dorong Kolaborasi Asean Perangi CSE dan Cyber Fraud (<i>Encouraging Asean Collaboration To Combat CSE and Cyber Fraud</i>)	92
Pengadaan Barang dan Jasa (<i>Procurement of goods and services</i>)	70	Awal 2025, Laporan Transaksi Ke PPAK Naik Signifikan (<i>Early 2025, Transaction Reports To PPAK Increase Significantly</i>)	96
Nilai SPBE (<i>SPBE Score</i>)	71	Dorong Perbaikan FIR 2024 Lewat Pembinaan Pihak Pelapor (<i>Promoting Improvements in the 2024 FIR through Reporting Entity Capacity Building</i>)	97
Pengelolaan Barang Milik Negara (<i>Management Of State Property</i>)	72	GOAML Tambah Ribuan Pihak Pelapor Baru (<i>GOAML Adds Thousands Of New Reporting Parties</i>)	98
		Statistik Laporan Layanan Bantuan (<i>Statistics On Assistance Services Report</i>)	101
		Membangun Generasi Tangguh Lawan Kejahatan Keuangan (<i>Building A Resilient Generation Against Financial Crime</i>)	102
		Statistik Edukasi Publik (<i>Public Education Statistics</i>)	103
		Perpustakaan, Ruang Edukasi Publik Anti Pencucian Uang (<i>Library, Anti-Money Laundering Public Education Room</i>)	104
		Komitmen Data PPAK Berbuah Penghargaan (<i>PPAK'S Commitment To Data Earns Award</i>)	105
		Glosarium (<i>Glossary</i>)	106
		BAB 5 - CHAPTER 5	
Jaga Masa Depan Sistem Keuangan Nasional (<i>Safeguarding the Future of the National Financial System</i>)	75		
Aset Kripto: Lahan Baru Pencucian Uang (<i>Crypto Assets: A New Frontier For Money Laundering</i>)	77		
Anomali Transaksi Aset Kripto Di Indonesia (<i>Cryptocurrency Trading Anomalies In Indonesia</i>)	78		
Suara PPAK Di Panggung Internasional (<i>PPAK'S Voice On The International Stage</i>)	79		
Inisiatif Pencegahan Risiko TPPU TPPT Sektor Tertentu (<i>Initiatives To Prevent Money Laundering And Terrorist Financing In Specific Sectors</i>)	81		
Data Intelijen Keuangan (<i>Financial Intelligence Data</i>)	85		
PPATK dan Arah Baru Kebijakan Global (<i>PPATK and The New Direction Of Global Policy</i>)	88		

STRATEGI NASIONAL

NATIONAL STRATEGY

PENCEGAHAN dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, pendanaan terorisme, dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal merupakan misi strategis untuk menjaga keamanan, stabilitas dan integritas sistem keuangan Indonesia.

Melalui Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan TPPU (Komite TPPU), arah, kebijakan, dan strategi nasional dirumuskan secara terukur. Strategi ini selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 dan mendukung Asta Cita 7 pemerintah yaitu memperkuat reformasi hukum, pemberantasan korupsi, narkoba, perjudian, dan penyelundupan.

PREVENTING and eradicating money laundering, terrorism financing, and proliferation financing of weapons of mass destruction is a strategic mission to maintain the security, stability, and integrity of Indonesia's financial system.

The National Coordination Committee for the Prevention and Eradication of Money Laundering (TPPU Committee) serves as the platform for formulating measurable national directions, policies, and strategies. These strategies are aligned with the 2025–2029 National Medium-Term Development Plan (RPJMN) and reinforce the Government's Asta Cita 7 priority: strengthening legal reform and combating corruption, narcotics, gambling, and smuggling.



LANDASAN & TUJUAN

BASIS & OBJECTIVES

LANDASAN HUKUM (LEGAL BASIS):

- Keputusan Menko Polhukam No. 49 & 50 Tahun 2025, Decisions of the Coordinating Minister for Political, Legal and Security Affairs No. 49 & 50 of 2025,
- Selaras dengan: RPJMN 2025–2029 & Asta Cita 7
In line with: RPJMN 2025–2029 & Asta Cita 7

TUJUAN UTAMA (MAIN OBJECTIVES):

- Menjaga integritas sistem keuangan, Maintaining the integrity of the financial system,
- Memperkuat keamanan & ketahanan nasional, Strengthening national security and resilience,
- Memberantas korupsi, narkoba, perjudian online, dan penyelundupan. Eradicating corruption, narcotics, online gambling, and smuggling.

9 PAKET STRATEGI NASIONAL

9 National Strategy Packages

● **47** **INDIKATOR** **KEBERHASILAN** **(JANGKA 5 TAHUN)**

47 Success Indicators (5-year period)

● **68** **RENCANA AKSI**

(tahun 2025)
68 Action Plans (2025)



RINCIAN STRATEGI
STRATEGY DETAILS

● **BERBASIS STANDAR FATF & TREN KEJAHATAN KEUANGAN TERKINI**

Based on FATF standards & current financial crime trends

● **MEMPRIORITASKAN ISU STRATEGIS: PENERIMAAN NEGARA, KEBOCORAN KEUANGAN, TATA KELOLA PERIZINAN**

Prioritising strategic issues: state revenue, financial leakage, permit governance



DAMPAK YANG DIHARAPKAN

EXPECTED IMPACT

- **INTEGRASI** & inklusivitas rezim APUPPT dan PPSPM
Integration and Inclusiveness of the AML/CFT and PF Regime
- **PENURUNAN** potensi kerugian negara dari kejahatan keuangan
Reduction of potential state losses from financial crime
- **PENINGKATAN** kepatuhan terhadap standar internasional
Enhancing compliance with international standards
- **RESPONS CEPAT** terhadap ancaman keuangan lintas batas
Rapid response to cross-border financial threats

Selanjutnya, pada bulan April 2025 yang juga bertepatan dengan 23 Tahun Gerakan Nasional APUPPT dan PPPSPM, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan RI selaku Ketua Komite TPPU telah menetapkan Keputusan Nomor 49 Tahun 2025 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan TPPU, TPPT dan PPPSPM Tahun 2025-2029. Dokumen ini memuat 9 paket strategi dan 47 indikator keberhasilan untuk lima tahun ke depan, serta Keputusan Nomor 50 Tahun 2025 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan TPPU, TPPT dan PPPSPM Tahun 2025 dengan rincian sebanyak 68 rencana aksi dari 9 paket strategi nasional.

Secara umum, perumusan Stranas Pencegahan dan Pemberantasan TPPU, TPPT dan PPPSPM Tahun 2025-2029 dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas kinerja rezim APUPPT dan PPPSPM yang terintegrasi dan inklusif menjaga integritas sistem keuangan serta keamanan dan ketahanan nasional dengan mengarusutamakan berbagai defisiensi teknis terhadap standar FATF serta berbagai isu strategis atau *national interest*, antara lain: penerimaan negara, kebocoran keuangan negara, perizinan dan tata kelola, serta program Asta Cita, seperti korupsi, narkoba, perjudian online dan penyelundupan.

Strategi Nasional ini menjadi peta jalan untuk memastikan Indonesia tetap waspada dan responsif menghadapi ancaman kejahatan keuangan lintas batas.

Furthermore, in April 2025, which also coincides with the 23rd Anniversary of the National Movement for the Prevention and Eradication of Money Laundering (APUPPT) and the Prevention and Eradication of Transnational Organised Crime (PPSPM), The Coordinating Minister for Political and Security Affairs of the Republic of Indonesia, in his capacity as Chair of the ML Committee, has issued Decree No. 49 of 2025 on the National Strategy for the Prevention and Eradication of Money Laundering (ML), Terrorism Financing (TF), and Proliferation Financing of Weapons of Mass Destruction (PFWMD) for 2025–2029. The strategy comprises nine strategic packages and 47 key performance indicators over the five-year period. Additionally, Decree No. 50 of 2025 establishes the 2025 National Action Plan for the Prevention and Eradication of ML, TF, and PFWMD, detailing 68 action plans aligned with the nine national strategic packages.

In general, the formulation of the 2025–2029 National Strategy for the Prevention and Eradication of Money Laundering (ML), Terrorism Financing (TF), and Proliferation Financing of Weapons of Mass Destruction (PFWMD) aims to enhance the effectiveness of an integrated and inclusive ML, TF, and PFWMD regime. This regime safeguards the integrity of the financial system as well as national security and resilience, while mainstreaming technical deficiencies against FATF standards and addressing various strategic or national interest issues, including state revenue, financial leakages, licensing and governance, as well as Asta Cita programs such as corruption, narcotics, online gambling, and smuggling.

This National Strategy serves as a roadmap in facing cross-border financial crime threats.

RENCANA STRATEGI STRATEGIC PLAN

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI (*POLICY DIRECTION AND STRATEGY*)

ARAH Kebijakan dan Strategi Nasional menjadi pedoman penting bagi PPATK dalam merumuskan dan melaksanakan program serta kegiatan kelembagaan, guna memastikan kontribusi nyata terhadap pencapaian sasaran pembangunan dalam RPJMN sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Dalam konteks RPJMN 2025–2029, visi dan misi Presiden terpilih dijabarkan ke dalam delapan Asta Cita, yang kemudian dielaborasi menjadi delapan agenda prioritas nasional sebagai arah pembangunan menengah.

PPATK mendukung secara langsung pelaksanaan Asta Cita Ketujuh, yaitu: Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan. Namun, kontribusi PPATK tidak terbatas hanya pada Asta Cita Ketujuh. Dukungan kelembagaan ini diperkuat dengan pendekatan kerangka pikir delapan misi pembangunan dalam RPJPN 2025–2045, yang menekankan pentingnya keberhasilan pelaksanaan landasan transformasi yang di dalamnya merupakan peran PPATK dalam mewujudkan supremasi hukum, stabilitas ekonomi dan kepemimpinan Indonesia.

PPATK, melalui tugas dan fungsinya, memiliki peran strategis dalam mendorong keberhasilan transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola. Apabila landasan transformasi ini berjalan secara konsisten, maka transformasi Indonesia akan tercapai secara bertahap, yang pada akhirnya memberikan kontribusi terhadap pencapaian lima Sasaran Utama Indonesia Emas 2045.

NATIONAL Policy and Strategy Directions serve as important guidelines for PPATK in formulating and implementing institutional programmes and activities, to ensure a tangible contribution to the achievement of development targets in the RPJMN in accordance with its authority. In the context of the RPJMN 2025–2029, the vision and mission of the elected President are articulated into eight Asta Cita, which are then elaborated into eight national priority agendas as the direction for medium-term development.

PPATK directly supports the implementation of the Seventh Asta Cita, namely: Strengthening political, legal, and bureaucratic reforms, as well as strengthening the prevention and eradication of corruption, narcotics, gambling, and smuggling. However, PPATK's contribution is not limited to the Seventh Asta Cita. This institutional support is reinforced by the eight development missions in the 2025–2045 RPJPN, which emphasise the importance of successfully implementing the foundations for transformation, which include PPATK's role in realising the rule of law, economic stability, and Indonesian leadership.

Through its duties and functions, PPATK plays a strategic role in driving the success of social, economic, and governance transformation. When the foundation of this transformation is implemented consistently, Indonesia's transformation is expected to be achieved progressively, ultimately contributing to the attainment of the five Key Targets of Golden Indonesia 2045.

KORELASI RPJMN - PPAATK

RPJMN ALIGNMENT

SEBAGAIMANA Asta Cita Ketujuh merupakan salah satu fondasi utama dalam landasan transformasi, maka implementasinya turut menopang keberhasilan Asta Cita lainnya secara keseluruhan.

Asta Cita Ketujuh memiliki fokus sasaran antara lain:

1. Terwujudnya supremasi hukum yang transparan, adil, dan tidak memihak serta sistem politik yang fungsional;
2. Terwujudnya birokrasi pemerintahan yang adaptif dan melayani;
3. Terwujudnya masyarakat yang bebas dari penyalahgunaan narkoba;
4. Terwujudnya tata kelola BUMN yang baik untuk meningkatkan kontribusi Badan Usaha Milik Negara sebagai agen Pembangunan;
5. Tercapainya peningkatan pendapatan negara yang optimal sesuai potensi perekonomian dengan tetap menjaga iklim investasi, didukung upaya untuk mewujudkan reformasi fiskal secara komprehensif melalui optimalisasi belanja negara, serta perluasan sumber dan pengembangan inovasi pembiayaan;

Berdasarkan lampiran II dan Lampiran III pada RPJMN 2025-2029 PPAATK mengampu 3 (tiga) Program prioritas sebagai penjawantahan Prioritas Nasional Ketujuh, PPAATK menjalankan mandat kelembagaan dengan mendukung Program Prioritas,

As the seventh Asta Cita serves as one of the main foundations of the transformation framework, its implementation also supports the success of the other Asta Cita objectives as a whole. The seventh **Asta Cita focuses on the following targets:**

1. Establishing the supremacy of law that is transparent, fair, impartial, and supported by a functional political system;
2. Creating an adaptive and service-oriented government bureaucracy;
3. Building a society free from drug abuse;
4. Implementing good governance in State-Owned Enterprises (SOEs) to enhance their contribution as agents of development;
5. Achieving optimal state revenue in line with economic potential while maintaining an investment-friendly climate, supported by comprehensive fiscal reform efforts through the optimization of state expenditure and the expansion and development of innovative financing sources;

Based on Appendix II and Appendix III of the 2025-2029 RPJMN, PPAATK oversees three priority programmes as the embodiment of the Seventh National Priority. PPAATK carries out its institutional

Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas Nasional yang diwujudkan dalam Rincian Output Prioritas Nasional yang tercantum pada dokumen perencanaan tahunan dengan rincian sebagai berikut:

1. Program Prioritas Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dan TPPU, yang didukung melalui 2 kegiatan Prioritas yaitu penguatan kelembagaan Gerakan pemberantasan korupsi secara lebih sistematis dan Pencegahan dan Pemberantasan TPPU.

mandate by supporting Priority Programmes, Priority Activities, and National Priority Projects as outlined in the National Priority Output Details listed in the annual planning document with the following details:

1. Priority Program for the Prevention and Eradication of Corruption and Money Laundering, supported by two priority activities, namely strengthening the institutional framework of the anti-corruption movement in a more systematic manner and preventing and eradicating money laundering.

Asta Cita Prabowo-Gibran untuk Wujudkan Visi Indonesia Emas 2045

Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengusung visi "Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045". Agar visi terlaksana, Prabowo-Gibran pun mencanangkan **8 misi yang disebut "Asta Cita"**.

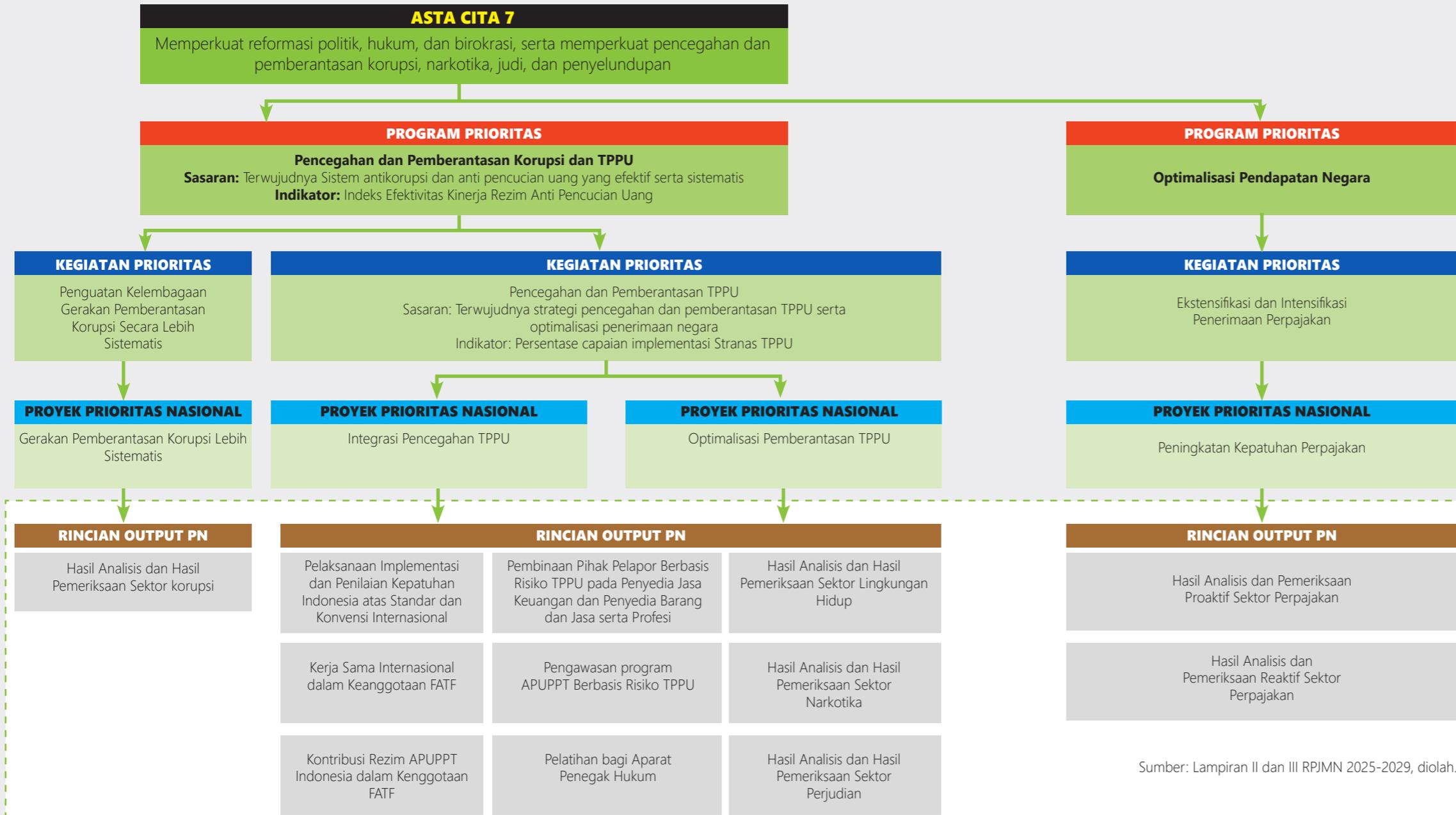
-  Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM)
-  Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
-  Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
-  Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
-  Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
-  Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
-  Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
-  Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.



Indonesia.go.id
Gambar: Freepik, Wikipedia

<https://fakta.com>

Naskah: Arie Dwi Budhiawati | Infografis: Rillo Hans Stevanus



Sumber: Lampiran II dan III RPJMN 2025-2029, diolah.

PPATK mengampu pengukuran pada program prioritas ini dengan Sasaran yaitu terwujudnya sistem antikorupsi dan anti pencucian uang yang efektif serta sistematis yang diukur dengan indikator keberhasilan yaitu Indeks Efektivitas Kinerja Rezim Anti Pencucian Uang dengan.

Selain mengampu pengukuran program tersebut, PPATK juga mengampu Kegiatan Prioritas dengan Sasaran yaitu terwujudnya pencegahan dan pemberantasan TPPU serta Optimalisasi Penerimaan Negara dengan indikator yaitu persentase capaian implementasi stranas TPPU.

2. Program Prioritas Optimalisasi Pendapatan Negara yang didukung melalui Rincian Output Prioritas Nasional Hasil Analisis dan Pemeriksaan Sektor Perpajakan.

PPATK is responsible for measuring this priority programme with the objective of establishing an effective and systematic anti-corruption and anti-money laundering system, measured by the success indicator of the Anti-Money Laundering Regime Performance Effectiveness Index.

In addition to measuring this programme, PPATK also measures Priority Activities with the objective of preventing and eradicating money laundering and optimising state revenue, with the indicator being the percentage of achievement of the national strategy for money laundering.

2. The Priority Programme for Optimising State Revenue is supported by the National Priority Output Details from the Analysis and Examination of the Tax Sector.

PROSES BISNIS

BUSINESS PROCESS

Proses Bisnis PPATK digambarkan dengan prinsip *Supplier-Input-Process-Output-Customer* (SiPoC) sehingga dapat diketahui pihak mana saja yang menjadi mitra PPATK dalam menjalankan visi dan misinya.

The PPATK business process is described using the *Supplier-Input-Process-Output-Customer* (SiPoC) principle so that it is clear which parties are PPATK partners in carrying out its vision and mission.

1 SUPPLIER

Pihak yang menyediakan sumber daya yang dibutuhkan PPATK untuk menjalankan proses bisnisnya, meliputi:

- Penyedia Jasa Keuangan
- Penyedia Barangj Jasa Lainnya
- Profesi
- Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
- Penyidik Tindak Pidana Asal TPPU dan TPPT
- Lembaga Intelijen Keuangan (FIU) negara lain
- Kementerian Lembaga dalam negeri
- Masyarakat

Parties that provide the resources needed by PPATK to carry out its business processes, including:

- Financial Service Providers
- Other Goods and Service Providers
- Professionals
- Directorate General of Customs and Excise
- Investigators of Criminal Acts Originating from Money Laundering and Terrorist Financing
- Financial Intelligence Units (FIUs) of other countries
- Ministries and domestic institutions
- The public

2 INPUT

Bahan, informasi, atau sumber daya lainnya yang diberikan oleh *supplier* untuk dijadikan dasar pelaksanaan proses bisnis PPATK, mencakup:

- Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM)
- Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT)
- Laporan Transfer Dana dari dan ke Luar Negeri (LTKL)
- Laporan Transaksi (LT) dari Penyedia Barang Jasa Lainnya
- Laporan Pembawaan Uang Tunai Lintas Batas (LPUTLB)
- Inquiry
- Informasi
- Pengaduan Masyarakat (Dumas)

Materials, information, or other resources provided by suppliers to serve as the basis for the implementation of PPATK's business processes, including:

- Suspicious Financial Transaction Reports (LTKM)
- Cash Transaction Reports (LTKT)
- International Funds Transfer Instruction (IFTI)
- Designated Non-Financial Businesses and Professions. (DNFBP)
- Cross-Border Cash Carriage Reports (LPUTLB)
- Inquiries
- Information
- Public Complaints (Dumas)

3 PROCESS

Serangkaian kegiatan dan pekerjaan yang mengubah input menjadi output PPATK, meliputi:

- Pengelolaan Pelaporan dan Pengawasan Kepatuhan APU-PPT
- Analisis dan Pemeriksaan
- Strategi dan Kerja Sama APU-PPT

A series of activities and tasks that transform inputs into PPATK outputs, including:

- Management of APU-PPT Reporting and Compliance Supervision
- Analysis and Examination
- APU-PPT Strategy and Work Plan

4 OUTPUT

Produk yang dihasilkan oleh proses bisnis PPATK untuk digunakan oleh *Customer*, mencakup:

- Hasil Analisis
- Hasil Pemeriksaan
- Informasi
- Rekomendasi
- Laporan Kinerja

Products generated by PPATK business processes for use by customers, including:

- Analysis Results
- Inspection Results
- Information
- Recommendations
- Performance Reports

5 CUSTOMER

Pihak yang memanfaatkan produk dari PPATK, meliputi:

- Presiden RI dan DPR RI
- Komite Nasional Pencegahan dan Pemberantasan TPPU/TPPT
- Penyidik Tindak Pidana Asal TPPU dan TPPT
- Lembaga Pengawas dan Pengatur
- FIU negara lain
- Organisasi Luar Negeri
- Kementerian/Lembaga dalam negeri
- Masyarakat

Parties that utilise PPATK products, including:

- The President of the Republic of Indonesia and the House of Representatives of the Republic of Indonesia
- National Committee for the Prevention and Eradication of Money Laundering/Terrorist Financing
- Investigators of Money Laundering and Terrorist Financing Crimes
- Supervisory and Regulatory Institutions
- Foreign Financial Intelligence Units
- Foreign Organisations
- Ministries/Institutions within the country
- The public

Menjaga Indonesia Dengan Data MEWUJUDKAN ASTA CITA

Protecting Indonesia with Data, Realising Asta Cita

MENJAGA INDONESIA DENGAN DATA

MEWUJUDKAN ASTA CITA

Protecting Indonesia with Data, Realising Asta Cita

ASTA CITA, delapan arah pembangunan nasional 2025–2029, menempatkan tata kelola keuangan yang bersih sebagai fondasi. Tapi pada tahun yang sama, PPATK menemukan fakta mencemaskan: dana bansos senilai hampir satu triliun rupiah justru tersedot ke judi online.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 menetapkan Asta Cita sebagai arah pembangunan nasional. Delapan agenda besar itu hanya bisa tercapai bila negara memiliki tata kelola keuangan yang bersih dan berintegritas. Uang negara harus digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat, bukan tersedot ke ruang gelap kejahatan finansial.

Namun, fakta yang muncul di tahun 2024 menyisakan paradoks. PPATK menemukan 571.410 penerima bantuan sosial (bansos) justru terlibat aktivitas judi *online*. Nilai deposit yang mengalir ke *platform* ilegal itu mencapai Rp957 miliar dari 7,5 juta transaksi. Dana yang seharusnya menjadi penopang keluarga miskin, berubah menjadi modal taruhan digital.

Sebagai *Financial Intelligence Unit* (FIU) Indonesia, PPATK berada di garis depan. Melalui deteksi dini berbasis data, PPATK menghentikan sementara transaksi mencurigakan, menelusuri aliran dana, hingga menyampaikan rekomendasi kebijakan kepada pemerintah dan aparat penegak hukum. Laporan khusus ini menyajikan temuan, dampak, serta arah kebijakan PPATK dalam mengawal negeri dengan data, untuk mewujudkan Asta Cita.

ASTA CITA, the eight directions of national development for 2025–2029, places clean financial governance as its foundation. However, in the same year, PPATK discovered an alarming fact: social assistance funds worth nearly one trillion rupiah were being siphoned off to online gambling.

The 2025–2029 National Medium-Term Development Plan (RPJMN) establishes Asta Cita as the direction for national development. These eight major agendas can only be achieved if the state has clean and integrity-based financial management. State funds must be used as much as possible for the benefit of the people, not siphoned off into the dark realm of financial crime.

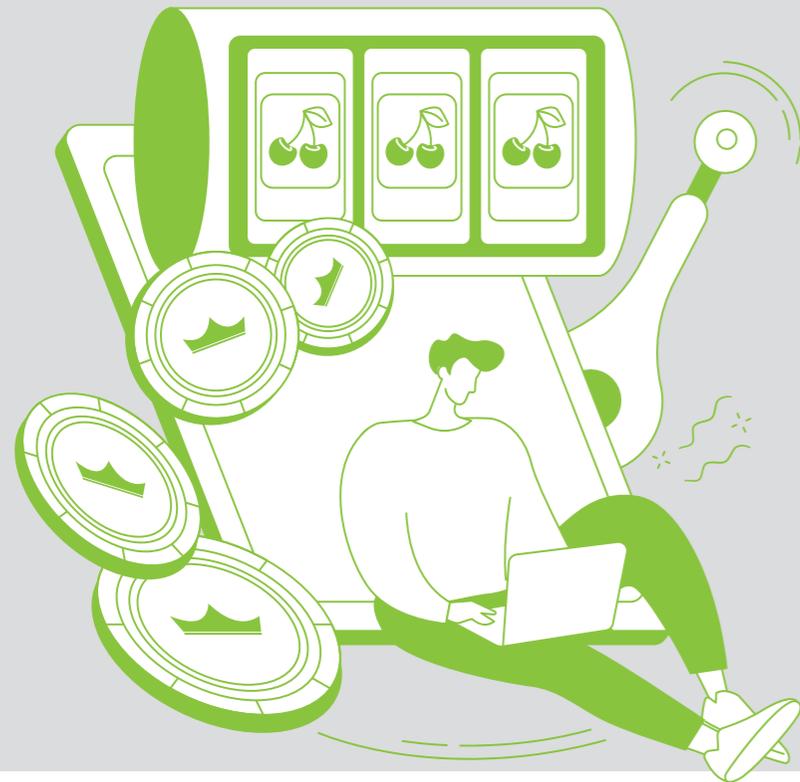
However, the facts that emerged in 2024 present a paradox. PPATK found that 571,410 social assistance recipients were involved in online gambling activities. The value of deposits flowing into illegal platforms reached Rp957 billion from 7.5 million transactions. Funds that should have been used to support poor families were instead turned into digital betting capital.

As Indonesia's Financial Intelligence Unit (FIU), PPATK is at the forefront. Through early detection based on data, PPATK temporarily halts suspicious transactions, traces the flow of funds, and submits policy recommendations to the government and law enforcement agencies. This special report presents PPATK's findings, impacts, and policy directions in safeguarding the nation with data to realise the Asta Cita.

BAGAIMANA PPATK MENEMUKANNYA?

Tim analis PPATK memulai pekerjaannya dengan tumpukan data. Melalui mekanisme sistematis, laporan transaksi keuangan masuk setiap hari dari bank, lembaga keuangan, penyedia barang dan jasa, hingga profesi tertentu diwajibkan melaporkan transaksi keuangan mencurigakan, transaksi tunai, maupun transfer lintas negara sesuai ketentuan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU). Data itu dilengkapi dengan laporan dari masyarakat, aparat penegak hukum, FIU negara lain, serta instansi pemerintah. Semua informasi diproses melalui analisis dan pemeriksaan, lalu hasilnya dikirim kembali kepada aparat penegak hukum sebagai bahan penyelidikan dan penindakan.

Dari tumpukan data itulah temuan bansos yang mengalir ke judi *online* bermula. Tim analis PPATK menyandingkan laporan transaksi dengan basis data kependudukan dan daftar penerima bansos. Pola kemudian muncul.



HOW DID PPATK UNCOVER IT?

The analysis began with a mountain of data. Every day, financial transaction reports flowed into PPATK from banks, financial institutions, goods and service providers, as well as designated professions that are legally required to report suspicious financial transactions, cash transactions, and cross-border transfers under the Anti-Money Laundering (AML) Law. These reports were complemented by inputs from the public, law enforcement agencies, foreign FIUs, and both government and private institutions. All information was then processed through systematic analysis and examination. The results were forwarded to law enforcement as intelligence leads for investigation and enforcement.

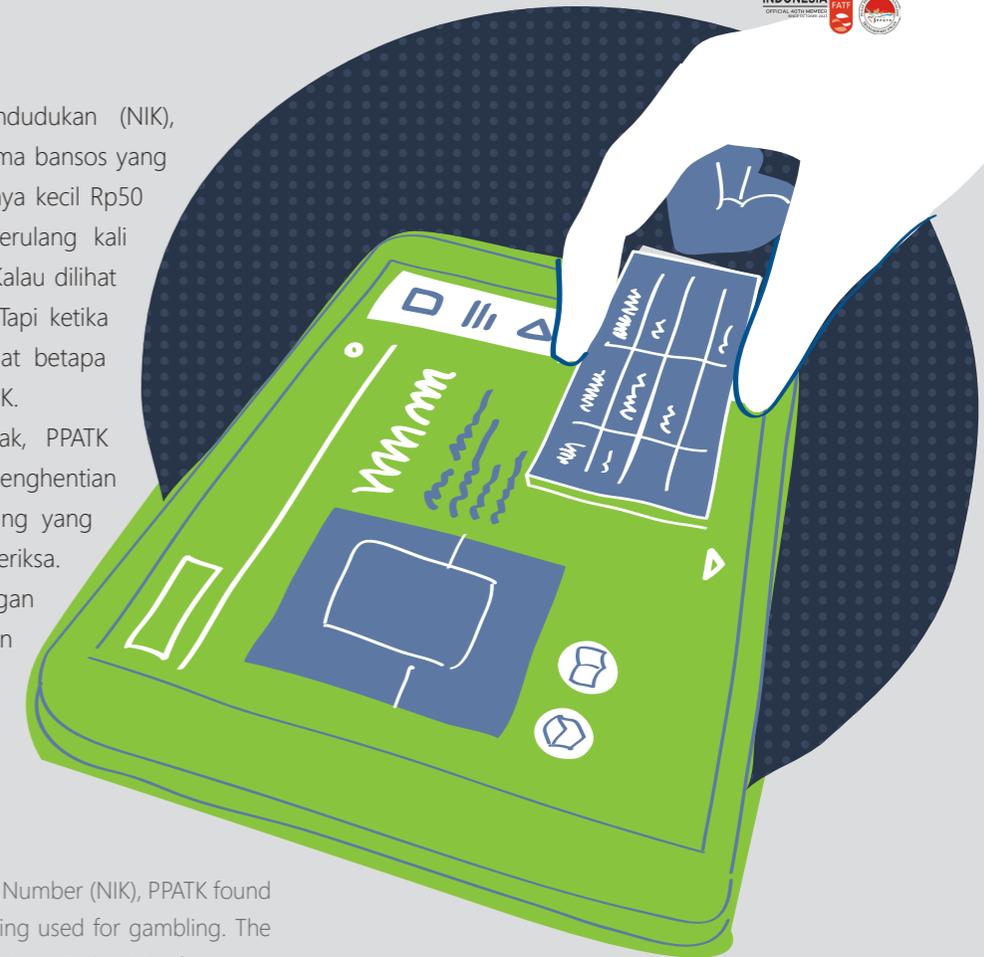
It was from this data trove that the discovery of social aid (bansos) funds flowing into online gambling first emerged. PPATK analysts cross-referenced transaction reports with the national population database and the official list of social aid recipients. From this matching process, a suspicious pattern began to surface.

Melalui Nomor Induk Kependudukan (NIK), PPATK menemukan rekening penerima bansos yang dipakai untuk berjudi. Nilai depositnya kecil Rp50 ribu, Rp100 ribu tapi dilakukan berulang kali lewat aplikasi pembayaran digital. “Kalau dilihat satu per satu, transaksinya sepele. Tapi ketika jutaan transaksi dikumpulkan, terlihat betapa masifnya,” kata seorang pejabat PPATK.

Untuk membatasi ruang gerak, PPATK menggunakan mekanisme penghentian sementara transaksi. Bahkan rekening yang lama tidak aktif, atau dorman, ikut diperiksa. Semua langkah itu dijalankan dengan dasar UU No. 8 Tahun 2010. Dengan cara ini, analisis PPATK tak hanya bergantung pada laporan bank, tapi juga pada pengolahan data masif lintas sektor.

Using the Population Registration Number (NIK), PPATK found social assistance recipient accounts being used for gambling. The deposit amounts were small, Rp50,000 or Rp100,000, but were made repeatedly through digital payment applications. “When viewed individually, the transactions seem insignificant. But when millions of transactions are collected, the scale becomes apparent,” said a PPATK official.

To limit their activities, PPATK implemented a mechanism to temporarily halt transactions. Even dormant accounts that had been inactive for a long time were examined. All these steps were carried out in accordance with Law No. 8 of 2010. In this way, PPATK’s analysis does not rely solely on bank reports but also on the processing of massive cross-sectoral data.



Tim analis PPATK menyandingkan laporan transaksi dengan basis data kependudukan dan daftar penerima bansos. Pola kemudian muncul.

The PPATK analyst team compared transaction reports with the population database and the list of social assistance recipients. A pattern then emerged.

TEMUAN UTAMA

Hasilnya mencemaskan. Sepanjang 2024, PPATK mengidentifikasi 571.410 NIK penerima bansos yang terlibat dalam judi *online*. Total deposit mereka mencapai Rp957 miliar. Angka itu tercatat dalam 7,5 juta kali transaksi selama setahun.

Karakteristiknya serupa: nilai per transaksi kecil, tapi intensitasnya tinggi. Mayoritas dilakukan lewat kanal digital yang semakin mudah diakses. Pola ini menunjukkan perjudian bukan lagi masalah pinggiran, melainkan kebiasaan yang melekat pada kelompok masyarakat

571.410

NIK Penerima Bantuan Sosial Terlibat Judi Online

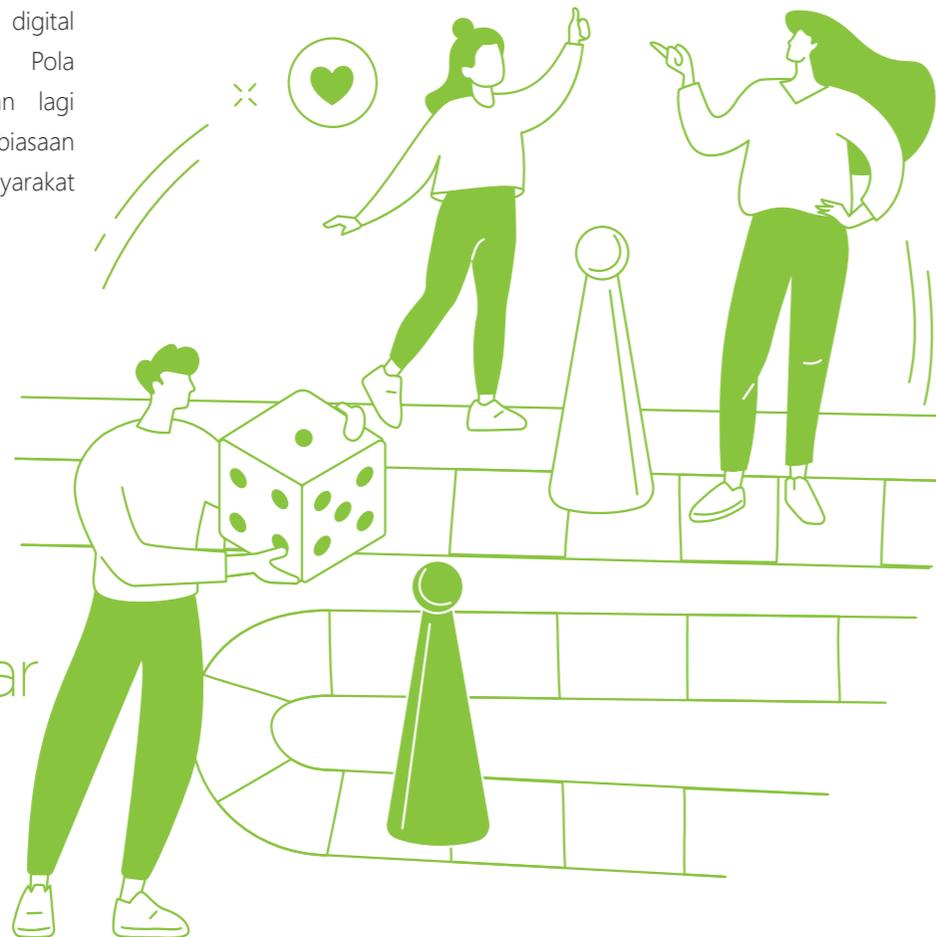
Rp 957 Miliar

Total Deposit Judi Online **7,5 juta** transaksi selama setahun

KEY FINDINGS

The findings were alarming. Throughout 2024, PPATK identified 571,410 national ID numbers (NIK) of social aid recipients involved in online gambling. Their total deposits reached Rp957 billion, recorded across 7.5 million transactions in just one year.

The pattern was consistent: small-value transactions with extremely high frequency, mostly conducted through easily accessible digital channels. This revealed that gambling was no longer a fringe issue but a widespread



berpenghasilan rendah, kelompok yang seharusnya ditopang bansos untuk bertahan hidup.

Temuan PPATK tentang judi *online* yang melibatkan penerima bansos punya tiga lapis dampak, yaitu: sosial, ekonomi, dan hukum. Pertama, dampak sosial. Bantuan sosial lahir untuk menjaga keluarga miskin tetap bisa makan, sekolah, dan berobat. Tapi ketika dana itu justru dipakai untuk judi, tujuan awalnya runtuh. Uang beras berubah jadi deposit. Anak-anak kehilangan biaya sekolah, ibu-ibu kesulitan membeli obat.

“Jika penerima bansos tersebut terbukti menyalahgunakan dana bansos untuk bermain judi online, maka Kementerian Sosial akan mencabut penyaluran bansos tersebut dan mencoretnya dari daftar penerima,” kata Menteri Sosial Saifullah Yusuf.

Kedua, dampak ekonomi. Jumlahnya memang besar: Rp957 miliar menguap ke judi *online*. Itu setara dengan anggaran pembangunan ribuan rumah sederhana, atau beasiswa puluhan ribu mahasiswa. Kebocoran itu melemahkan program pengentasan kemiskinan. Negara memberi, tapi aliran uang bocor ke *platform* ilegal yang tak membayar pajak.

Ketiga, dampak hukum. Judi online jelas melanggar hukum. Tapi lebih dari itu, ia juga berpotensi menjadi pintu masuk Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Uang haram dari perjudian bisa dicampur dengan uang sah, dialirkan ke rekening lain, atau ditukar dengan aset. PPATK melihatnya bukan hanya sebagai pelanggaran individu, tapi sebagai ancaman terhadap integritas sistem keuangan nasional.

habit deeply rooted among low-income groups, communities that should have been using social assistance for their basic needs.

PPATK’s findings on online gambling involving social aid recipients reveal three layers of impact: social, economic, and legal. First, the social impact. Social assistance was designed to ensure poor families could eat, send their children to school, and access healthcare. But when the funds are diverted to gambling, the original purpose collapses. Money meant for rice becomes gambling deposits. Children lose their education funds, while mothers struggle to afford medicine.

“If social aid recipients are proven to have misused the funds for online gambling, the Ministry of Social Affairs will revoke their benefits and remove them from the recipients list,” stated Minister of Social Affairs Saifullah Yusuf.

Second, the economic impact. The amount is staggering: Rp957 billion drained into online gambling. That is equivalent to building thousands of modest homes or funding scholarships for tens of thousands of students. Such leakage undermines poverty alleviation programs. The state provides support, but the funds are siphoned into illegal platforms that pay no taxes.

Third, the legal impact. Online gambling is clearly against the law, but the threat goes deeper. It serves as a potential gateway to money laundering (ML). Illegal proceeds from gambling can be mixed with legitimate funds, funneled through multiple accounts, or converted into assets. PPATK sees this not only as individual misconduct but as a direct threat to the integrity of the national financial system.

PERAN STRATEGIS PPATK DALAM MEWUJUDKAN ASTA CITA

Temuan bansos yang mengalir ke judi *online* hanya satu fragmen dari pekerjaan besar PPATK. Dalam kerangka Asta Cita, peran PPATK menempati posisi strategis.

Pertama, menjaga ketahanan ekonomi berkeadilan. Kebocoran dana bansos adalah ancaman langsung bagi program pengentasan kemiskinan. Dengan menghentikan sementara rekening yang dipakai untuk judi online, PPATK mencoba menutup keran kebocoran itu. Data PPATK mencatat, setelah kebijakan penghentian sementara diterapkan pada awal 2025, deposit bulanan judi online turun drastis dari lebih Rp5 triliun menjadi sekitar Rp1 triliun. "Penurunan lebih dari 70 persen dalam tiga bulan adalah bukti kebijakan ini efektif," kata Kepala PPATK Ivan Yustiavandana.

Kedua, mendukung revolusi mental dan pembangunan manusia. Masalah ini bukan hanya soal uang, tapi juga perilaku. Judi online tumbuh cepat karena literasi keuangan rendah, sementara akses internet semakin luas. PPATK memandang edukasi publik sama pentingnya dengan penindakan. Program literasi keuangan, kerja sama dengan kementerian, dan kampanye bahaya judi digital menjadi bagian dari strategi jangka panjang.

Ketiga, memperkuat hukum dan tata kelola. Selain judi, PPATK juga menghentikan sementara 122 juta rekening dorman yang rawan dipakai untuk pencucian uang atau penipuan digital. Hingga Juli 2025, lebih dari 100 juta rekening sudah aktif kembali setelah pemiliknya melakukan pembaruan data. Langkah ini bukan sekadar tindakan teknis, tapi juga wujud hadirnya negara dalam melindungi sistem keuangan.

THE STRATEGIC ROLE OF PPATK IN REALIZING ASTA CITA

The discovery of social assistance funds flowing into online gambling is only one fragment of PPATK's enormous task. Within the framework of Asta Cita, PPATK occupies a strategic position.

First, it maintains equitable economic stability. The leakage of social assistance funds is a direct threat to poverty alleviation programs. By temporarily suspending accounts used for online gambling, PPATK is attempting to plug this leak. PPATK data shows that after the temporary suspension policy was implemented in early 2025, monthly online gambling deposits fell dramatically from more than IDR 5 trillion to around IDR 1 trillion. "A decline of more than 70 percent in three months is proof that this policy is effective," said PPATK Head Ivan Yustiavandana.

Second, supporting mental revolution and human development. This issue is not only about money, but also behavior. Online gambling has grown rapidly due to low financial literacy, while internet access has become more widespread. PPATK considers public education to be as important as enforcement. Financial literacy programs, cooperation with ministries, and campaigns on the dangers of digital gambling are part of the long-term strategy.

Third, strengthening laws and governance. In addition to gambling, PPATK has also temporarily suspended 122 million dormant accounts that are vulnerable to money laundering or digital fraud. As of July 2025, more than 100 million accounts, have been reactivated after their owners updated their data. This step is not merely a technical measure, but also a manifestation of the state's presence in protecting the financial system.

At this point, PPATK acts as a link between data and policy. It processes millions of transaction reports, filters out suspicious

Di titik ini, PPATK berperan sebagai penghubung antara data dan kebijakan. Ia mengolah jutaan laporan transaksi, menyaring yang mencurigakan, lalu menyampaikannya kepada aparat penegak hukum: kepolisian, kejaksaan, KPK, hingga Direktorat Jenderal Pajak. Dari hasil analisis itulah negara bisa menindak perjudian daring, memperkuat penerimaan pajak, dan menjaga agar uang publik tidak bocor ke ruang gelap kejahatan finansial.

KEBIJAKAN DAN INOVASI PPATK KE DEPAN

PPATK memperkuat analisis dan pemeriksaan berbasis *big data analytics* dengan fokus pada sektor-sektor rawan, termasuk perizinan, ekspor-impor, judi daring, dan perdagangan orang. Integrasi data dengan instansi lain, pemanfaatan teknologi deteksi pola, serta pengembangan sistem peringatan dini akan menjadi tulang punggung inovasi.

Pada saat yang sama, hasil analisis PPATK terus berkontribusi pada penerimaan negara. Semester I 2025, kontribusi itu mencapai Rp170,19 miliar. Sejak 2020 hingga Mei 2025, potensi penerimaan negara dari analisis dan pemeriksaan PPATK tercatat sebesar Rp11,45 triliun.

Pada akhirnya, keberhasilan Asta Cita hanya akan tercapai bila uang negara benar-benar bersih dari praktik kejahatan. Dengan semangat "Mengawal Negeri dengan Data", PPATK berkomitmen memastikan setiap rupiah kembali untuk rakyat, bukan masuk ke rekening pelaku kejahatan finansial.

ones, and then submits them to law enforcement agencies: the police, the attorney general's office, the Corruption Eradication Commission (KPK), and the Directorate General of Taxes. From the results of this analysis, the state can crack down on online gambling, strengthen tax revenue, and prevent public money from leaking into the dark world of financial crime.

PPATK POLICIES AND INNOVATIONS GOING FORWARD

PPATK is strengthening its big data analytics-based analysis and examination, focusing on vulnerable sectors, including licensing, export-import, online gambling, and human trafficking. Data integration with other agencies, the use of pattern detection technology, and the development of an early warning system will be the backbone of innovation.

At the same time, PPATK's analysis results continue to contribute to state revenue. In the first half of 2025, this contribution reached IDR 170.19 billion. From 2020 to May 2025, the potential state revenue from PPATK's analysis and examination was recorded at IDR 11.45 trillion.

Ultimately, the success of Asta Cita will only be achieved if state funds are truly free from criminal practices. With the spirit of "Guarding the Nation with Data," PPATK is committed to ensuring that every rupiah returns to the people, not into the accounts of financial criminals.



CHAPTER 1

Bab 1

Henti Sementara

Langkah Awal Hadang Kejahatan Finansial

Temporary Suspension: First Step in Combating Financial Crime

DI BALIK derasnya arus transaksi keuangan, kejahatan kerap menyelip dalam diam, memanfaatkan celah, menembus sistem yang lengah, dan menyamar dalam bentuk yang tampak sah. Diperlukan keberanian untuk bertindak cepat, sebelum kejahatan menjaral lebih jauh dan merusak fondasi sistem keuangan nasional.

Sebagai bentuk perlindungan dini, PPATK menerapkan kebijakan henti sementara secara strategis. Kewenangan ini digunakan untuk mengintervensi transaksi yang mencurigakan dan terindikasi terkait tindak pidana seperti korupsi, perjudian online, penggelapan, hingga narkoba.

Tidak hanya itu, PPATK juga mengidentifikasi modus kejahatan yang melibatkan rekening-rekening tidak aktif (*dormant*). Dalam lima tahun terakhir, ditemukan pola berulang: rekening *dormant* dimanfaatkan untuk menampung dana hasil kejahatan, diperjualbelikan secara ilegal, diretas, atau digunakan sebagai akun *nominee* oleh pihak yang tidak berwenang.

Langkah penghentian sementara menjadi instrumen penting untuk mencegah dana hasil tindak pidana berpindah tangan, terlacak lebih jauh, atau memperkuat jaringan kriminal yang lebih luas. Kebijakan ini melindungi hak pemilik rekening yang sah sekaligus menutup celah bagi penyalahgunaan sistem keuangan.

Tindakan ini sebagai bentuk barikade awal dan sinyal tegas bahwa negara tidak akan membiarkan dana publik dipakai untuk memperkuat kejahatan. Temuan PPATK mengungkap skala penyimpangan yang serius dan memprihatinkan.

Dengan data sebagai dasar kebijakan dan keberanian sebagai pijakan langkah, PPATK terus mengawal negeri ini dari balik layar transaksi. Karena, di era ketika kejahatan dapat dilakukan hanya dengan satu 'klik', perlindungan yang tepat waktu adalah bentuk dari keberpihakan tertinggi kepada rakyat.

BENEATH the rapid flow of financial transactions, crime often slips in silently, exploiting gaps, penetrating inattentive systems, and disguising itself in seemingly legitimate forms. Courage is required to act swiftly before criminal activity spreads further and undermines the foundation of the national financial system.

As an early protective measure, PPATK strategically implements a temporary suspension policy. This authority is used to intervene in transactions that are suspicious and potentially linked to criminal offenses such as corruption, online gambling, embezzlement, and narcotics.

Moreover, PPATK identifies crime schemes involving dormant accounts. Over the past five years, recurring patterns have been observed: dormant accounts are used to hold illicit funds, traded illegally, hacked, or exploited as nominee accounts by unauthorized parties.

Temporary suspension serves as a crucial instrument to prevent illicit funds from changing hands, being traced further, or strengthening broader criminal networks. This policy protects the rights of legitimate account holders while closing loopholes for financial system abuse.

These actions function as an initial barrier and a clear signal that the state will not allow public funds to be used to reinforce crime. PPATK's findings reveal serious and concerning levels of financial misconduct.

With data as the basis for policy and courage as a tool for action, PPATK continues to safeguard the nation behind the scenes of financial transactions. In an era where crime can be committed with a single "click," timely protection is an effective form of protection for society.

STATISTIK PENGHENTIAN SEMENTARA TRANSAKSI

STATISTICS ON TEMPORARY SUSPENSION OF TRANSACTIONS

ADAPUN terkait kegiatan Penghentian Sementara Transaksi yang telah dilakukan PPATK pada Januari s.d Juni tahun 2025 terhadap 12.063 rekening sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut ini.

With regard to the Temporary Transaction Suspension activities carried out by PPATK from January to June 2025, a total of 12,063 accounts were affected, as shown in the table below.

TP. KORUPSI - 596 Rekening	TP. PENIPUAN - 108 Rekening	CYBERCRIME - 4.777 Rekening
802.327.034.975 IDR	73.225.041.609 IDR	11.967.619.846 IDR
127.360.047 USD		9.881 USD
251.707 SGD	TPPU - 461 Rekening	5.919 CNY
14.940 JPY	31.709.045.181 IDR	410 JPY
205 GBP	19.279 USD	137 SGD
9 AUD	TP. BIDANG PERBANKAN - 2 Rekening	100 EUR
TP. PERJUDIAN - 5.923 Rekening	24.993.441.337 IDR	2 AUD
716.689.425.760 IDR	PENGGELAPAN - 24 Rekening	3.158.836 ASET KRIPTO
11.268 USD	9.329.477.305 IDR	
9.932 SGD	CUKAI - 6 Rekening	
TP. LINGKUNGAN HIDUP - 25 Rekening	1.179.504.652 IDR	
244.358.856.434 IDR	TP. BIDANG PERPAJAKAN - 9 Rekening	
TP. ITE - 132 Rekening	6.320.028 IDR	
146.814.969.544 IDR		
88 USD		

Sumber: data PPATK diolah (2025)

HIGHLIGHT KASUS
CASE HIGHLIGHT

KASUS PERETASAN BANK DAN ALIRAN DANA KE KRIPTO

Bank Hacking Cases and Fund Flows to Cryptocurrency

Selama periode Juni 2024 s.d. April 2025, terdapat kasus peretasan sistem perbankan pada beberapa bank di Indonesia dengan nominal kerugian mencapai Rp641 miliar. Kasus ini bermula dari pengaduan pihak Bank yang melaporkan bahwa terdapat transaksi mencurigakan yang tercatat keluar dari rekening bank ke rekening bank lainnya.

MODUS DAN TIPOLOGI YANG DIGUNAKAN ADALAH SEBAGAI BERIKUT:

- Pelaku memanfaatkan momen hari libur dan akhir pekan.
- Menggunakan rekening *nominee* baik perorangan maupun atas nama Perseroan perseorangan, akun wallet kripto yang diperoleh dari aktivitas jual beli rekening dan akun kripto untuk mengalirkan dana hasil tindak pidana;
- Memanfaatkan fasilitas perbankan berupa transfer terjadwal yang hanya bisa digunakan oleh rekening perseroan perseorangan;
- Dana hasil tindak pidana mengalir ke banyak pihak perorangan dan Perusahaan dengan cara memecah-mecah transaksi dengan nominal transaksi mendekati nominal maksimal per transaksi dan terjadi dalam waktu beberapa jam, sangat cepat dan masif;

During the period from June 2024 to April 2025, there were cases of hacking of banking systems at several banks in Indonesia with losses amounting to Rp641 billion. This case began with a complaint from the Bank reporting that there were suspicious transactions recorded from the Bank's account to other bank accounts.

THE METHODS AND TYPOLOGIES USED ARE AS FOLLOWS:

- Perpetrators take advantage of holidays and weekends.
- Using nominee accounts, both individual and corporate, as well as cryptocurrency wallets obtained through the buying and selling of accounts and cryptocurrency accounts to channel funds from criminal activities;
- Utilising banking facilities in the form of scheduled transfers that can only be used by corporate accounts;
- Proceeds from criminal activities flow to many individuals and companies by splitting transactions with transaction amounts close to the maximum amount per transaction and occurring within a few hours, very quickly and massively;
- These funds are converted into USDT crypto assets through PFAK/CPFAK and P2P.
- Using the services of professional money laundering syndicates to launder funds, which are also known to receive funds related to other criminal activities such as narcotics, fraud, human trafficking, etc.;

- Dana tersebut diubah menjadi aset kripto USDT melalui PFAK/CPFAK dan P2P.
- Menggunakan jasa sindikat *professional money launderer* untuk mencuci uang yang juga diketahui menerima dana terkait dengan tindak pidana lain seperti narkoba, penipuan, TPPO, dll;
- Akun kripto yang digunakan diketahui dibuka dengan menggunakan identitas palsu dan alamat IPnya terdeteksi di negara lain seperti Thailand, Philipina, Vietnam, Kamboja, Malaysia, Laos yang juga dikenal dengan perdagangan narkoba, penipuan, dan TPPOnya;
- Dana hasil tindak pidana yang sudah berubah menjadi aset kripto di VASP baik dalam dan luar negeri kemudian seluruhnya dipindahkan ke *unhosted wallet* yang terdeteksi terkait dengan tindak pidana judi online, scam, dll.
- Terkait dengan penanganan kasus tersebut, PPAK melakukan koordinasi dengan PJK terkait dan melakukan penghentian sementara transaksi.

- The cryptocurrency accounts used are known to have been opened using fake identities, and their IP addresses are detected in other countries such as Thailand, the Philippines, Vietnam, Cambodia, Malaysia, and Laos, which are also known for drug trafficking, fraud, and human trafficking;
- Criminal proceeds that have been converted into cryptocurrency assets at VASPs both domestically and internationally are then transferred to unhosted wallets associated with online gambling, scams, and other criminal activities.
- In connection with the handling of this case, the PPAK coordinated with relevant financial institutions and temporarily suspended transactions.



DISEMINASI BERDAMPAK TINGGI

DARI TEMUAN KE TINDAKAN

High-Impact Dissemination: From Findings to Action

SETIAP data yang dianalisis PPAATK menyimpan potensi besar untuk mengungkap kejahatan yang tersembunyi di balik sistem keuangan. Diseminasi hasil analisis dan pemeriksaan kepada aparat penegak hukum bukan hanya menyajikan temuan, tetapi juga membuka jalan bagi penindakan yang nyata.

Selama tahun berjalan, berbagai kasus strategis berhasil diungkap, banyak di antaranya menjadi perhatian publik karena skalanya yang masif maupun keterkaitannya dengan sektor-sektor vital. Informasi intelijen keuangan dari PPAATK telah dimanfaatkan sebagai bukti awal, petunjuk lanjutan, hingga dasar pengembangan perkara oleh lembaga penegak hukum.

Narasi berikut merangkum beberapa pengungkapan penting yang tidak hanya berdampak besar pada penegakan hukum, tetapi juga mempertegas posisi PPAATK sebagai garda terdepan dalam melawan kejahatan finansial di Indonesia.

TINDAK PIDANA KORUPSI

PERKARA DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM TATA KELOLA MINYAK MENTAH.

Kasus korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang di lingkungan PT Pertamina (Persero), termasuk Subholding dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS), diduga terjadi dalam kurun waktu 2018 hingga 2023. Praktik korupsi ini melibatkan jajaran direksi anak usaha

EVERY dataset analyzed by PPAATK holds significant potential to uncover crimes hidden within the financial system. Dissemination of analytical and investigative findings to law enforcement authorities not only presents these discoveries but also paves the way for concrete enforcement actions.

During the current year, several strategic cases have been successfully uncovered, many of which have attracted public attention due to their scale or their connection to vital sectors. Financial intelligence from PPAATK has been utilized as initial evidence, follow-up leads, and a basis for case development by law enforcement agencies.

The following narrative summarizes several key disclosures that have not only had a substantial impact on law enforcement but also reinforce PPAATK's position as the front-line agency in combating financial crime in Indonesia.

CORRUPTION OFFENSE

ALLEGED CORRUPTION IN CRUDE OIL GOVERNANCE

A corruption case involving the management of crude oil and refinery products within PT Pertamina (Persero), including its Subholdings and Production Sharing Contract Contractors (KKKS), is alleged to have occurred between 2018 and 2023. This corrupt practice involved the boards of directors of Pertamina's subsidiaries as well as private parties, particularly brokers engaged in international oil and gas trading.

Based on an information request from the Attorney General's Investigation Team, PPAATK has submitted 17

Pertamina serta pihak swasta, khususnya broker dalam perdagangan migas internasional.

Berdasarkan permintaan informasi dari tim Penyidik Kejaksaan Agung, PPAATK telah menyampaikan 17 Laporan Hasil Analisis kepada aparat penegak hukum terkait dugaan tindak pidana yang ditemukan dalam sistem keuangan, dan sebagai bagian dari upaya pencegahan dan penelusuran aliran dana mencurigakan, PPAATK juga telah melakukan penghentian sementara transaksi terhadap 51 pihak (455 rekening) yang memiliki rekening di berbagai penyedia jasa baik Bank maupun NonBank.

Analytical Reports to law enforcement authorities regarding the alleged criminal activities detected within the financial system. As part of efforts to prevent and trace suspicious fund flows, PPAATK also implemented Temporary Transaction Suspensions on 51 parties (455 accounts) across various banking and non-banking service providers.

Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Tata Kelola Minyak Mentah

Alleged Corruption in Crude Oil Governance

PT PERTAMINA (PERSERO), termasuk Subholding dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS)

PT Pertamina (Persero), including its subsidiaries and Contractors under the Production Sharing Contract (PSC)

2018-2023

Kurun Waktu Kejadian (Time Period of Occurrence)

PENGHENTIAN SEMENTARA TRANSAKSI

Temporary Suspension Of Transactions

51 Entitas
Entity

455 Rekening
Account

17

Laporan Hasil Analisis

Analysis Report



Menindaklanjuti penghentian sementara tersebut, tim penyidik Kejaksaan Agung telah menggunakan kewenangannya untuk melanjutkan proses pemblokiran rekening terkait, guna mendukung penyidikan lebih lanjut dan upaya perampasan aset.

Langkah ini merupakan bagian dari sinergi antara PPATK dan aparat penegak hukum dalam penanganan tindak pidana keuangan, serta sebagai bentuk komitmen terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

SUAP PUTUSAN HAKIM TERKAIT IZIN EKSPOR CRUDE PALM OIL (CPO)

Kasus ini bermula dari pengusutan dugaan korupsi dalam pemberian fasilitas ekspor *Crude Palm Oil* (CPO) dan turunannya, yang terjadi di tengah kebijakan pelarangan ekspor minyak goreng oleh pemerintah pada tahun 2022. Pemerintah saat itu menerapkan kebijakan larangan ekspor demi menjaga stabilitas harga dan ketersediaan minyak goreng di dalam negeri. Namun di tengah kebijakan tersebut, diduga terdapat praktik korupsi dalam pemberian izin ekspor secara ilegal. Dalam proses penegakan hukum, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menilai tiga entitas korporasi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi terkait pemberian fasilitas ekspor CPO.

Ketiganya dituntut membayar denda masing-masing Rp 1 miliar, akan tetapi majelis hakim memutuskan bahwa ketiga pihak tersebut terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya akan tetapi perbuatan itu bukanlah merupakan suatu tindak pidana (*ontslag van alle recht vervolging*).

Following these temporary suspensions, the Attorney General's Investigation Team exercised its authority to proceed with the blocking of the relevant accounts, supporting further investigation and asset recovery efforts.

This action reflects the synergy between PPATK and law enforcement agencies in handling financial crimes, as well as PPATK's commitment to combating corruption and money laundering (ML).

BRIBERY OF JUDGES RELATED TO CRUDE PALM OIL (CPO) EXPORT PERMITS

This case originated from the investigation of alleged corruption in the granting of Crude Palm Oil (CPO) and derivative export facilities, which occurred amid the government's 2022 policy banning cooking oil exports. The policy aimed to maintain domestic price stability and availability of cooking oil. However, during this period, it is alleged that corrupt practices occurred in the illegal issuance of export permits. In the law enforcement process, the Public Prosecutor determined that three corporate entities were legally and convincingly guilty of corruption related to granting CPO export facilities.

Each entity was fined IDR 1 billion. However, the panel of judges ruled that while the three parties were proven to have committed the acts alleged against them, these acts did not constitute a criminal offense (*ontslag van alle recht vervolging*).

The Attorney General of the Republic of Indonesia suspects bribery involving the Central Jakarta District Court related to the CPO export case. This allegation emerged as part

Suap Putusan Hakim Terkait Izin Ekspor *Crude Palm Oil*

Bribery of Judges Related to Crude Palm Oil (CPO) Export Permits

DUGAAN KORUPSI dalam pemberian fasilitas ekspor Crude Palm Oil (CPO) dan turunannya, tahun 2022.

Alleged corruption in the granting of export facilities for Crude Palm Oil (CPO) and its derivatives, in 2022.

PENGHENTIAN SEMENTARA TRANSAKSI

Temporary Suspension Of Transactions

9 Entitas
Entity

64 Rekening
Account

08

Laporan Hasil Analisis
Analysis Report

Rp**11,8**triliun

Dana Yang Disitia
Confiscated funds



Kejaksaan Agung Republik Indonesia menduga adanya praktik suap terhadap pihak Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berkaitan dengan putusan dalam kasus ekspor *Crude Palm Oil* (CPO). Dugaan ini muncul dalam rangkaian besar penyidikan atas korupsi tata kelola ekspor CPO dan produk turunannya yang telah merugikan negara secara signifikan.

Dalam proses penyidikan, PPATK turut berperan aktif dengan menyampaikan 8 Laporan Hasil Analisis transaksi keuangan kepada aparat penegak hukum. Selain itu, PPATK juga telah melakukan penghentian sementara transaksi keuangan terhadap 9 pihak (64 Rekening) yang diduga terlibat, yang tersebar di 29 penyedia jasa keuangan baik bank dan non-bank.

of the broader investigation into corruption in CPO export governance, which caused significant state losses.

During the investigation, PPATK played an active role by submitting eight (8) Financial Transaction Analysis Reports to law enforcement authorities. In addition, PPATK implemented Temporary Transaction Suspensions on nine (9) parties (64 accounts) suspected to be involved, across 29 banking and non-banking financial service providers.

Sebagai hasil lanjutan dari penyidikan tersebut, Kejaksaan Agung telah menetapkan 8 orang tersangka dalam kasus ini, serta dalam upaya pemulihan kerugian negara, Kejaksaan Agung juga berhasil menyita dana sebesar Rp11,8 triliun yang diduga berasal dari hasil tindak pidana korupsi dan suap dalam pemberian fasilitas ekspor CPO.

ASET KRIPTO

Pemanfaatan aset kripto di Indonesia menunjukkan tren peningkatan, tidak hanya sebagai sarana investasi, tetapi juga sebagai media dalam aktivitas keuangan ilegal. Salah satu perhatian utama adalah penggunaan akun kripto untuk menampung dana hasil tindak pidana lintas sektor, seperti perjudian daring, penipuan, dan kejahatan berbasis teknologi informasi (ITE).

As a result of the investigation, the Attorney General has named eight (8) individuals as suspects in this case. In efforts to recover state losses, the Attorney General also successfully seized IDR 11.8 trillion, suspected to be proceeds from corruption and bribery related to the granting of CPO export facilities.

CRYPTO ASSETS

The use of crypto assets in Indonesia is showing an upward trend, serving not only as an investment medium but also as a channel for illegal financial activities. A primary concern is the use of crypto accounts to hold proceeds from cross-sector criminal activities, such as online gambling, fraud, and information and electronic technology (ITE)-based crimes.



KEY CONCERN

The use of crypto accounts to hold funds derived from cross-sector criminal activities, such as online gambling, fraud, and information technology-based crimes (ITE)

Selain itu, ditemukan pola pemanfaatan aset kripto untuk mendukung pendanaan entitas atau individu yang terafiliasi dengan jaringan terorisme internasional, melalui pedagang aset virtual yang beroperasi di luar yurisdiksi Indonesia. Pola ini menyulitkan upaya pelacakan dan penindakan oleh otoritas dalam negeri.

PPATK juga mengidentifikasi ribuan individu di Indonesia yang aktif sebagai *trader peer-to-peer* (P2P) kripto, dengan total transaksi melebihi Rp236 triliun. Aktivitas ini tidak hanya rawan dimanfaatkan sebagai sarana pencucian uang, tetapi juga berpotensi mengurangi penerimaan negara akibat lemahnya pelaporan dan kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan.

Kondisi ini menegaskan urgensi penguatan regulasi, tata kelola lintas sektor, serta kolaborasi internasional yang lebih intensif guna memitigasi risiko sistemik yang ditimbulkan dari ekosistem aset kripto.

KONTRIBUSI PPATK TERHADAP PENERIMAAN NEGARA

Selama periode Semester I tahun 2025, PPATK turut serta membantu penerimaan negara dengan kemanfaatan Hasil Analisis di bidang perpajakan sebesar **Rp170.196.013.404,00**.

Selain itu, penanganan pada kasus korupsi juga telah ditindaklanjuti dengan penetapan kasus berkekuatan hukum tetap (inkhract). Putusan pengadilan atas laporan tersebut turut membantu Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dengan total denda sebesar **Rp800.000.000,00** dan uang pengganti kerugian negara sebesar **Rp4.122.028.228,00**.

Furthermore, patterns have been observed where crypto assets are used to fund entities or individuals affiliated with international terrorist networks, via virtual asset traders operating outside Indonesian jurisdiction. These practices complicate tracking and enforcement efforts by domestic authorities.

PPATK has also identified thousands of individuals in Indonesia actively engaged as peer-to-peer (P2P) crypto traders, with total transactions exceeding IDR 236 trillion. This activity is not only vulnerable to money laundering (ML) exploitation but also poses risks to state revenue due to weak reporting and non-compliance with tax obligations.

This situation underscores the urgency of strengthening regulations, cross-sector governance, and more intensive international collaboration to mitigate the systemic risks posed by the cryptocurrency ecosystem.

PPATK'S CONTRIBUTION TO STATE REVENUE

During the first semester of 2025, PPATK contributed to state revenue through the use of Financial Analysis Reports in the field of taxation, amounting to **IDR 170,196,013,404.00**.

In addition, corruption cases handled during this period resulted in legally binding court decisions (inkracht). The rulings not only imposed fines totaling **IDR 800,000,000.00** but also ordered restitution of state losses amounting to **IDR 4,122,028,228.00**, thereby supporting Non-Tax State Revenue (PNBP).

ASET KRIPTO

Crypto Assets

PPATK juga mengidentifikasi ribuan individu di Indonesia yang aktif sebagai trader peer-to-peer (P2P) kripto

PPATK also identified thousands of individuals in Indonesia who are active as peer-to-peer (P2P) crypto traders.

Rp 236 triliun
Total Transaksi (Total Transactions)

PERHATIAN UTAMA

Penggunaan akun kripto untuk menampung dana hasil tindak pidana lintas sektor, seperti perjudian daring, penipuan, dan kejahatan berbasis teknologi informasi (ITE)



CHAPTER 2

Bab 2

KAWAL PENEGAKAN HUKUM DENGAN DATA INTELIJEN

Supporting Law Enforcement with Intelligence Data

KAWAL PENEGAKAN HUKUM DENGAN DATA INTELIJEN

Supporting Law Enforcement with Intelligence Data

MANFAAT kerja PPATK dalam penegakan hukum tercermin dari setiap informasi yang disampaikan, setiap transaksi mencurigakan yang berhasil ditelusuri, dan setiap kolaborasi yang dibangun bersama aparat penegak hukum. Semua itu bukan sekadar angka dalam laporan, melainkan fondasi yang memungkinkan langkah hukum menjadi lebih cepat, lebih *firm*, dan lebih berdampak.

Informasi yang dihasilkan PPATK telah membantu membuka perkara-perkara kompleks—mulai dari tindak pidana korupsi, narkoba, hingga kejahatan siber. Dalam banyak kasus, intelijen keuangan menjadi titik awal pengungkapan, penguatan alat bukti, hingga pemulihan kerugian negara. Tidak hanya mengungkap apa yang tersembunyi, tetapi juga memandu arah proses hukum agar lebih tajam dan akurat.

Melalui pendekatan *follow the money*, PPATK membuktikan bahwa data yang dikelola dengan integritas dapat menjadi senjata ampuh melawan kejahatan finansial. Hasil kerja ini adalah energi awal dari banyak proses hukum yang kini berjalan. Karena tanpa informasi yang tepat, keadilan bisa kehilangan arah.

THE VALUE of PPATK's work in law enforcement is reflected in every piece of information it provides, every suspicious transaction successfully traced, and every collaboration established with law enforcement agencies. These are not merely figures in a report; they form the foundation that enables legal action to be faster, more decisive, and more impactful.

PPATK-generated information has helped unravel complex cases, ranging from corruption and narcotics to cybercrime. In many instances, financial intelligence serves as the starting point for uncovering crimes, strengthening evidentiary tools, and recovering state losses. It not only exposes what is hidden but also guides the legal process to be sharper and more accurate.

Through a follow the money approach, PPATK demonstrates that data managed with integrity can become a powerful weapon against financial crime. The results of this work provide the initial momentum for numerous ongoing legal processes. Without timely and accurate information, justice risks losing its direction.

DARI KOORDINASI KE AKSI: DUKUNGAN PPATK DALAM PENANGANAN PERKARA TPPU

From Coordination to Action: PPATK Support in Handling Money Laundering Cases

SEBAGAI pusat intelijen keuangan, PPATK aktif mendukung penegakan hukum melalui koordinasi dan asistensi penanganan perkara TPPU. Selama Januari hingga Juni 2025, tercatat 119 kegiatan koordinasi dilakukan bersama aparat penegak hukum terkait permintaan informasi transaksi dan tindak lanjut hasil analisis.

PPATK juga melaksanakan 10 kegiatan asistensi, mayoritas secara proaktif untuk membantu penanganan kasus seperti korupsi, narkoba, *illegal mining*, penggelapan, hingga judi online. Dalam salah satu kasus strategis, PPATK memperkuat penyidikan korupsi tambang ilegal bernilai miliaran rupiah melalui pendekatan *follow the money* dan analisis aliran dana untuk pengembangan pasal TPPU.

AS THE COUNTRY'S FINANCIAL intelligence center, PPATK actively supports law enforcement through coordination and case assistance in handling money laundering (ML) cases. From January to June 2025, a total of 119 coordination activities were conducted with law enforcement authorities regarding transaction information requests and follow-ups on analytical findings.

PPATK also carried out 10 assistance activities, mostly proactively, to support the handling of cases such as corruption, narcotics, illegal mining, embezzlement, and online gambling. In one strategic case, PPATK strengthened the investigation of an illegal mining corruption case worth billions of rupiah through a follow the money approach and fund flow analysis to develop ML-related charges.

■ JUMLAH KEGIATAN (JANUARI–JUNI 2025)

- 119** Koordinasi
 - Penanganan perkara
 - Permintaan informasi transaksi
 - Tindak lanjut hasil analisis & pemeriksaan
- 10** Asistensi Penanganan Perkara
 - 9 Proaktif
 - 1 Berdasarkan permintaan resmi

■ JENIS TINDAK PIDANA YANG DIAKOMODASI

- Korupsi
- Narkoba
- *Illegal Mining*
- Penggelapan & Perbankan
- Judi Online

■ UNSUR KEJAHATAN

- Kerugian negara signifikan
- Penyamaran aset hasil kejahatan
- Penggunaan proxy name (nama pinjaman)

■ CONTOH KASUS STRATEGIS

- **Kasus:** Korupsi infrastruktur & tambang ilegal
- **Nilai:** Miliaran rupiah
- **Peran PPATK:** *Follow the money*, Analisis struktur aliran dana, Penguatan pasal TPPU

MEMBENDUNG KEJAHATAN SIBER, MENGUATKAN KOLABORASI GLOBAL

Combating Cybercrime, Strengthening Global Collaboration

KEJAHATAN siber terus berkembang dengan modus yang kian kompleks—dari penipuan email bisnis (*Business Email Compromise*), *romance scam*, hingga *investment scam*. Dalam menghadapi ancaman ini, PPATK mengambil peran strategis sebagai garda depan perlindungan sistem keuangan nasional dan global.

Sepanjang 2024–2025, PPATK memfasilitasi 18 permintaan dari INTERPOL melalui skema *Global Rapid Intervention of Payments* (I-GRIP). Respons cepat ini dilakukan untuk menghentikan aliran dana hasil kejahatan lintas negara dan menyelamatkan aset milik korban.

Sebagai *Financial Intelligence Unit* (FIU) Indonesia, PPATK mengoptimalkan kewenangannya melalui penghentian sementara transaksi, penyusunan laporan intelijen keuangan, serta kolaborasi dengan mitra FIU di berbagai negara melalui jaringan Egmont Group.

Di tingkat nasional, PPATK juga memainkan peran sentral dalam rezim APUPPT dan PPSPM, memperkuat koordinasi bersama pihak pelapor, aparat penegak hukum, OJK, dan Bank Indonesia. Upaya ini membuktikan komitmen Indonesia dalam merespons kejahatan siber secara terpadu, terukur, dan berdampak nyata.

CYBERCRIME continues to evolve with increasingly complex schemes, ranging from Business Email Compromise (BEC) and romance scams to investment fraud. In addressing these threats, PPATK plays a strategic role as the front line in protecting both the national and global financial systems.

Throughout 2024–2025, PPATK facilitated 18 requests from INTERPOL under the Global Rapid Intervention of Payments (I-GRIP) framework. This rapid response was carried out to halt the flow of cross-border illicit funds and recover victims' assets.

As Indonesia's Financial Intelligence Unit (FIU), PPATK leverages its authority through temporary transaction suspensions, the preparation of financial intelligence reports, and collaboration with FIU partners worldwide via the Egmont Group network.

At the national level, PPATK also plays a central role in the ML, TF, and PFWMD regime, strengthening coordination with reporting entities, law enforcement, the Financial Services Authority (OJK), and Bank Indonesia. These efforts demonstrate Indonesia's commitment to responding to cybercrime in a coordinated, measurable, and impactful manner.

PENANGANAN PERMINTAAN INTERPOL

JENIS KEJAHATAN:

- *Business Email Compromise* (BEC)
- *Romance scam*
- *Investment scam*

18 PERMINTAAN I-GRIP difasilitasi (2024–2025)

OPTIMALISASI FUNGSI SEBAGAI FIU

- Penghentian sementara transaksi (*temporary suspension*)
- Pengiriman laporan intelijen keuangan
- Aktif di jaringan Egmont Group (FIU global)

PENANGANAN I-GRIP (INTERPOL)

- Tindakan cepat atas permintaan NCB Jakarta
- Koordinasi lintas lembaga
- Fokus: penyelamatan dana korban

KOORDINASI NASIONAL ANTARLEMBAGA

- Penghubung rezim APUPPT & PPSPM
- Kerja sama erat dengan:
 - Pihak pelapor
 - Penegak hukum
 - OJK & Bank Indonesia



DAMPAK STRATEGIS

- Kontribusi nyata Indonesia dalam penanganan cyber-enabled fraud
- Memperkuat pertahanan sistem keuangan global

PEMANTAUAN TINDAK LANJUT

HASIL ANALISIS/ HASIL PEMERIKSAAN/ INFORMASI

Follow-up Monitoring of Analysis Results/Examination Results/Information

PPATK tidak hanya berhenti pada penyampaian laporan intelijen, tetapi juga memastikan tindak lanjutnya berjalan optimal. Sepanjang Januari hingga Juni 2025, PPATK melakukan kunjungan langsung ke berbagai instansi penegak hukum untuk memantau perkembangan hasil analisis, pemeriksaan, dan informasi yang telah disampaikan.

Kegiatan pemantauan dilakukan melalui koordinasi langsung maupun bersamaan dengan kegiatan asistensi perkara. Beberapa lembaga yang menjadi mitra pemantauan di antaranya Polda Metro Jaya, Densus 88 Antiteror Polri, KPK, Divhubinter Polri, serta Polda Jatim, Jateng, Banten, Sumsel, dan Kejati Sumsel.

Hasilnya menunjukkan progres positif. Di Direktorat Tipideksus Bareskrim Polri, dari 52 Hasil Analisis yang awalnya belum ada perkembangan, kini 50 telah ditindaklanjuti (96%). Sementara itu, di Jampidsus, dari 36 HA/HP yang diterima, 100% telah ditindaklanjuti, dengan status mulai dari penyidikan hingga putusan inkracht.

Ini membuktikan bahwa produk intelijen PPATK tidak sebatas dikirimkan, tapi benar-benar menjadi dasar langkah hukum yang nyata.

PPATK does not stop at submitting intelligence reports; it also monitors to ensure follow-up actions are carried out effectively. From January to June 2025, PPATK conducted on-site visits to various law enforcement agencies to track the progress of analyses, investigations, and information provided.

Monitoring activities were carried out through direct coordination as well as alongside case assistance activities. Partner institutions included Polda Metro Jaya, Densus 88 Counter-Terrorism Unit, the Corruption Eradication Commission (KPK), the International Relations Division of the National Police, and regional police offices in East Java, Central Java, Banten, South Sumatra, as well as the South Sumatra High Prosecutor's Office (Kejati Sumsel).

The results show positive progress. At the Directorate of Special Economic Crimes (Tipideksus) Bareskrim Polri, of 52 Analytical Reports that initially had no updates, 50 have now been followed up (96%). Meanwhile, at the Special Crimes and Corruption Directorate (Jampidsus), all 36 reports received (100%) have been acted upon, with statuses ranging from ongoing investigations to finalized decisions (inkracht).

This demonstrates that PPATK's intelligence products are not merely transmitted, but truly serve as the foundation for concrete legal action.

PEMANTAUAN TINDAK LANJUT

PRODUK PPATK

Monitoring of Follow-up on PPATK Products

LOKASI/LEMBAGA PEMANTAUAN

Monitoring Locations/Institutions

- Polda Metro Jaya (*Metro Jaya Regional Police*)
- Densus 88 Antiteror Polri (*Indonesian National Police's Anti-Terrorism Special Forces*)
- Komisi Pemberantasan Korupsi (*Corruption Eradication Commission*)
- Divhubinter Polri
- Polda Jatim, Jateng, Banten, Sumsel
- Kejaksaan Tinggi Sumsel (*South Sumatra High Court*)

HASIL PEMANTAUAN

Monitoring Results

BARESKRIM TIPIDEKSUS POLRI

52 HA dipantau (*monitored*)

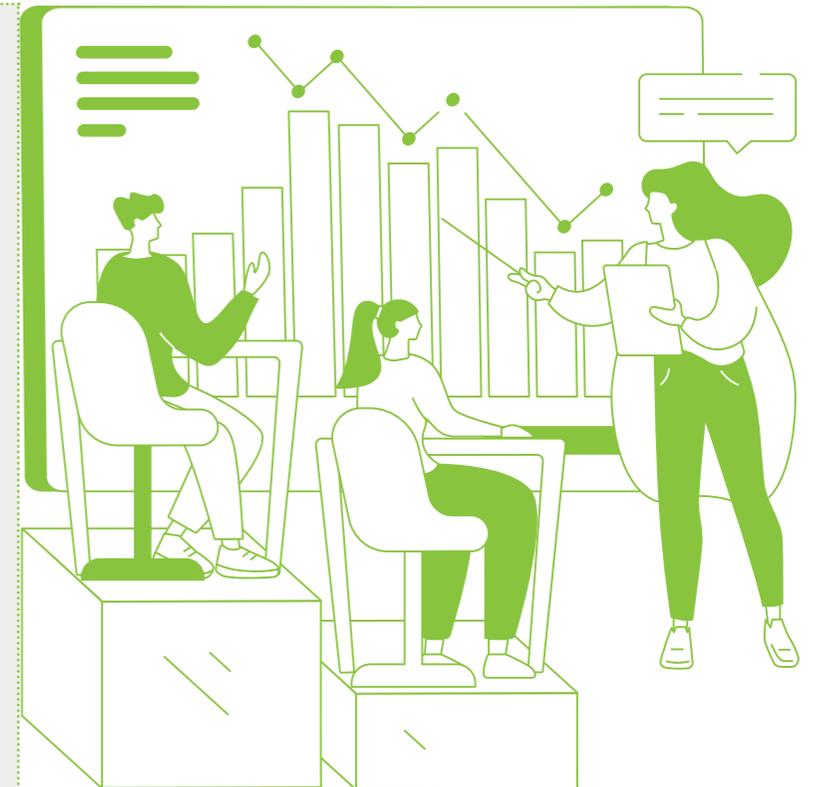
50 Telah ditindaklanjuti (*Followed up*) **(96%)**

JAMPIDSUS

36 HA/HP

ditindaklanjuti **100%** (6 tahap penyidikan, 20 tahap penuntutan, 7 upaya hukum, 3 putusan inkracht)

100% followed up (6 stages of investigation, 20 stages of prosecution, 7 legal actions, 3 final decisions)



TUJUAN PEMANTAUAN

Monitoring Objectives

- Mengukur efektivitas HA/HP/INF (*Measure the effectiveness of HA/HP/INF*)
- Mendorong *feedback* aktif dari APH (*Encourage active feedback from APH*)
- Menjaga kesinambungan proses penegakan hukum (*Maintain the continuity of law enforcement processes*)
- Memastikan penggunaan intelijen secara tepat guna (*Ensure the appropriate use of intelligence*)

TESTIMONI MITRA PENEGAK HUKUM

LAW ENFORCEMENT PARTNER TESTIMONIALS

PROFESIONAL, CEPAT, AKURAT

Professional, fast, accurate

“Ahli PPATK sangat profesional, cepat, dan akurat dalam membantu mengungkap perkara TPPU. Mereka responsif dan proaktif mendampingi penyidik, terutama dalam kasus korupsi yang kompleks.” – **Penyidik Jampidsus Kejagung**

“PPATK experts are highly professional, quick, and accurate in helping to uncover money laundering cases. They are responsive and proactive in assisting investigators, especially in complex corruption cases.” – **Investigator, Special Crimes Prosecution Unit, Attorney General's Office**

ANALISIS TRANSAKSI MASIF

Massive transaction analysis

“Sinergi dengan PPATK memungkinkan kami mengurai kasus TPPU perbankan yang rumit. Analisis data transaksi yang masif menjadi fondasi kuat penyidikan.” – **Bareskrim Polri**

“Synergy with PPATK allows us to unravel complex banking money laundering cases. Analysis of massive transaction data provides a strong foundation for investigations.” – **Indonesian National Police Criminal Investigation Unit**

KOMPETEN, MEMPERKUAT BUKTI PERSIDANGAN

Competent, strengthening evidence in court

“Ahli PPATK sangat komunikatif dan berkompeten dalam perkara narkoba. Keterangan mereka terbukti memperkuat pembuktian di persidangan.” – **Badan Narkotika Nasional**

“PPATK experts are highly communicative and competent in narcotics cases. Their testimony has been proven to strengthen the evidence in court.” – **National Narcotics Agency**

EFEKTIF UNGKAP KORUPSI LEWAT FOLLOW THE MONEY

Effectively exposing corruption by following the money trail

“Pendekatan follow the money bersama PPATK terbukti efektif mengungkap perkara korupsi di Jawa Tengah. Kolaborasi ini harus terus ditingkatkan.” – **Kejati Jawa Tengah**

“The follow-the-money approach we carried out with PPATK proved effective in uncovering a corruption case in Central Java. This collaboration must continue to be strengthened.” – **Central Java Attorney General's Office**

ASET TRACING KEMBALIKAN KERUGIAN

Asset tracing recovers losses

“Bimbingan ahli PPATK memastikan penyidikan kami sesuai koridor hukum. Kasus penggelapan gereja di Papua Barat berhasil diungkap, kerugian Rp736 juta kembali lewat *asset tracing*.” – **Polda Papua Barat**

“Expert guidance from PPATK ensures that our investigations are conducted within the legal framework. The case of church embezzlement in West Papua has been successfully uncovered, with Rp736 million in losses recovered through asset tracing.” – **West Papua Regional Police**

MAKSIMAL SITA ASET NARKOTIKA

Maximum seizure of narcotics assets

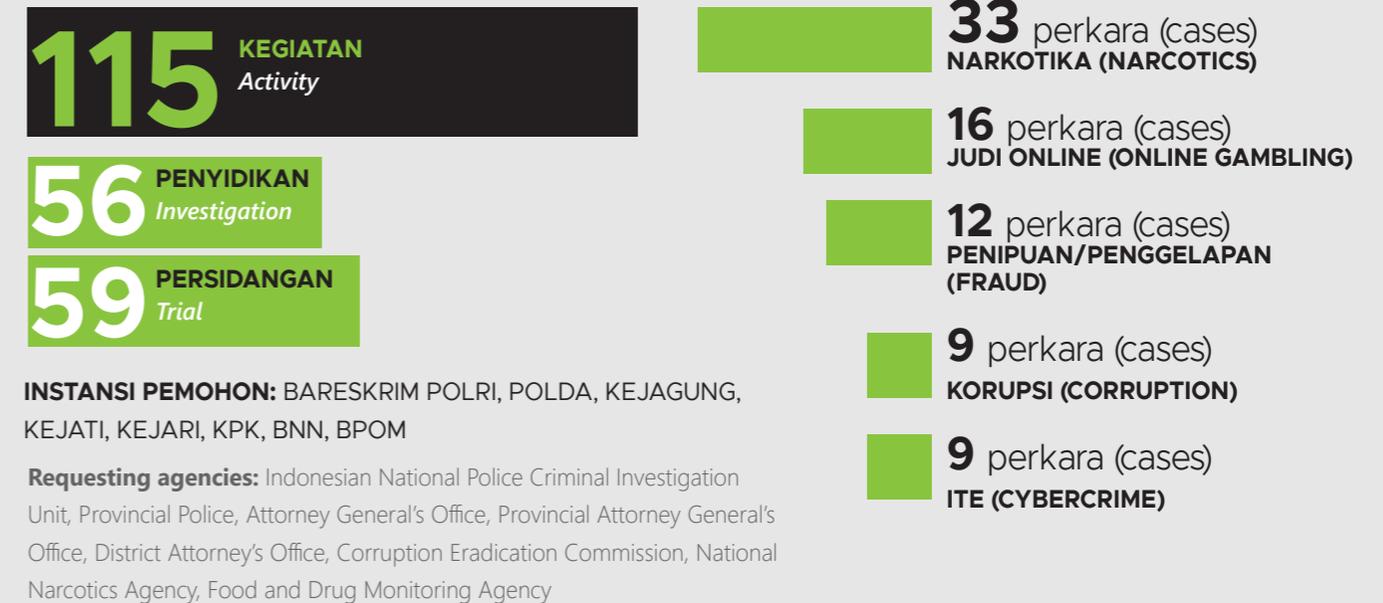
“Kerja sama dengan PPATK membuat kami bisa menyita aset narkoba secara maksimal dan menjerat pelaku dengan hukuman berat.” – **Polda Jawa Tengah**

“Cooperation with PPATK allows us to seize narcotics assets to the maximum extent possible and prosecute perpetrators with severe penalties.” – **Central Java Regional Police**

PEMBERIAN KETERANGAN AHLI PPATK

PROVISION OF EXPERT TESTIMONY BY PPATK

(Jan–Jul 2025)





CHAPTER 3

Bab 3

Menangkap Sinyal Awal

DARI SUARA PUBLIK

Detecting Early Signals from Public Voices

MENANGKAP SINYAL AWAL

DARI SUARA PUBLIK

BAGI PPATK, setiap pengaduan masyarakat adalah sinyal penting, awal dari rangkaian tindakan untuk memastikan integritas sistem keuangan tetap terjaga. Laporan yang disampaikan publik bukan sekadar keluhan, melainkan potensi petunjuk atas praktik yang melanggar hukum, dari pencucian uang hingga pendanaan terorisme.

Sepanjang Januari hingga Juni 2025, PPATK menerima total 102 pengaduan, dengan tren yang relatif stabil di kisaran 14–20 laporan per bulan. Puncak pengaduan terjadi pada Maret 2025 dengan 20 laporan, sementara jumlah terendah tercatat di Januari dengan 14 laporan.

Setiap laporan dianalisis secara cermat untuk memetakan indikasi tindak pidana dan, jika diperlukan, ditindaklanjuti melalui koordinasi dengan aparat penegak hukum. Melalui mekanisme ini, suara publik diolah menjadi data intelijen yang berdampak nyata bagi upaya pencegahan dan pemberantasan kejahatan keuangan.

Berdasarkan data pada grafik untuk periode Januari 2025 hingga Juni 2025, jumlah pengaduan masyarakat tercatat relatif stabil dengan sedikit fluktuasi.

- **JANUARI 2025:** 14 pengaduan
- **FEBRUARI 2025:** 18 pengaduan
- **MARET 2025:** 20 pengaduan (tertinggi di semester ini)
- **APRIL 2025:** 15 pengaduan
- **MEI 2025:** 18 pengaduan
- **JUNI 2025:** 17 pengaduan

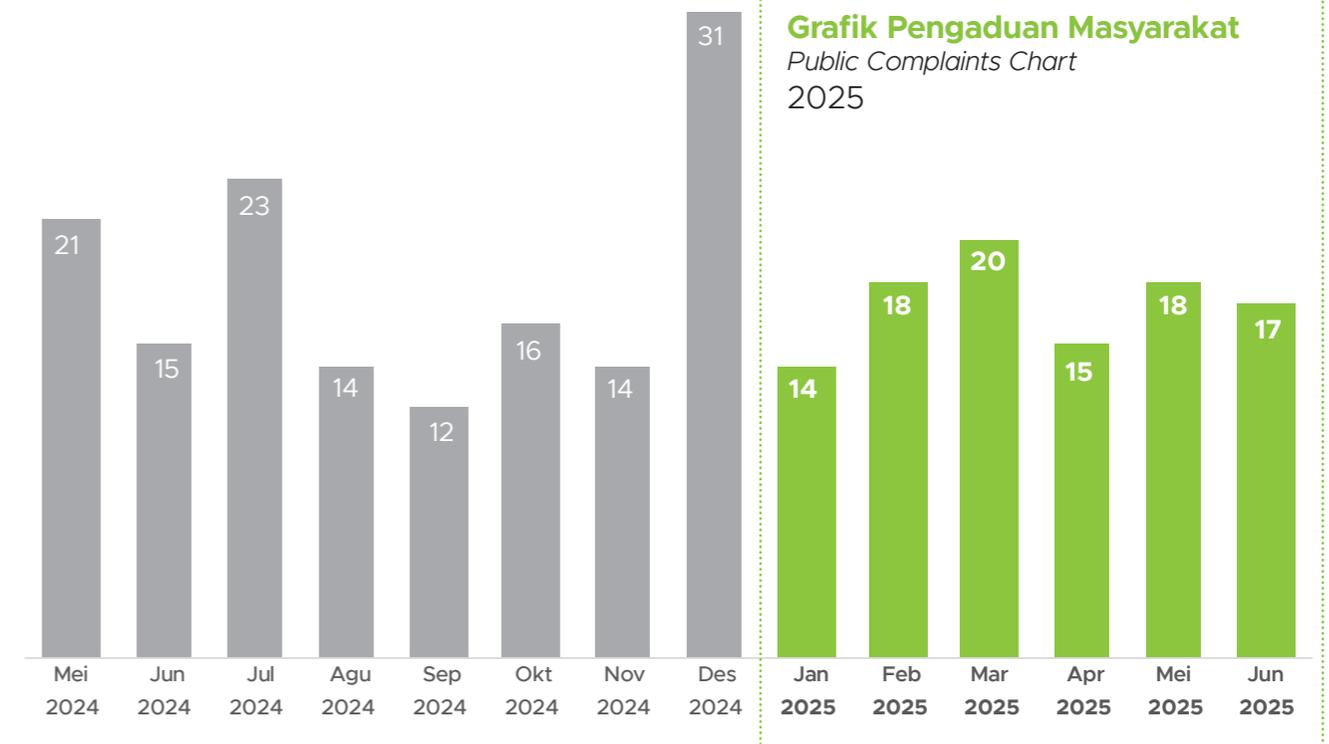
FOR PPATK, every public complaint represents an important signal. Reports submitted by the public are not merely grievances; they can serve as potential leads on unlawful practices, ranging from money laundering to terrorism financing.

From January to June 2025, PPATK received a total of 102 complaints, with a relatively stable trend of 14–20 reports per month. The highest number of complaints occurred in March 2025, with 20 reports, while the lowest was recorded in January with 14 reports.

Each report is carefully analyzed to map indications of criminal activity and, if necessary, followed up by submitting analytical findings to law enforcement authorities. Through this mechanism, public input is transformed into intelligence data that has a tangible impact on efforts to prevent and combat financial crimes.

Based on the data in the chart for the period January 2025 to June 2025, the number of public complaints remained relatively stable with minor fluctuations:

- JANUARY 2025: 14 reports
- FEBRUARY 2025: 18 reports
- MARCH 2025: 20 reports (highest)
- APRIL 2025: 15 reports
- MAY 2025: 18 reports
- JUNE 2025: 17 reports



Grafik Pengaduan Masyarakat
Public Complaints Chart
2025

RANGKUMAN TREN (SUMMARY OF TRENDS):

Setelah titik terendah di Januari, jumlah pengaduan meningkat hingga puncak pada Maret, lalu menurun dan bergerak stabil pada kisaran 15–18 pengaduan per bulan hingga Juni. Ini menunjukkan pola fluktuatif, namun tidak ekstrem, dengan rata-rata 17 pengaduan per bulan pada semester pertama 2025.

After reaching the lowest point in January, the number of complaints increased to a peak in March, then declined and stabilized at around 15–18 reports per month through June. This indicates a fluctuating, yet moderate pattern, with an average of 17 complaints per month during the first half of 2025.

Total Pengaduan Masyarakat Semester Awal 2025

Total Public Complaints First Semester of 2025

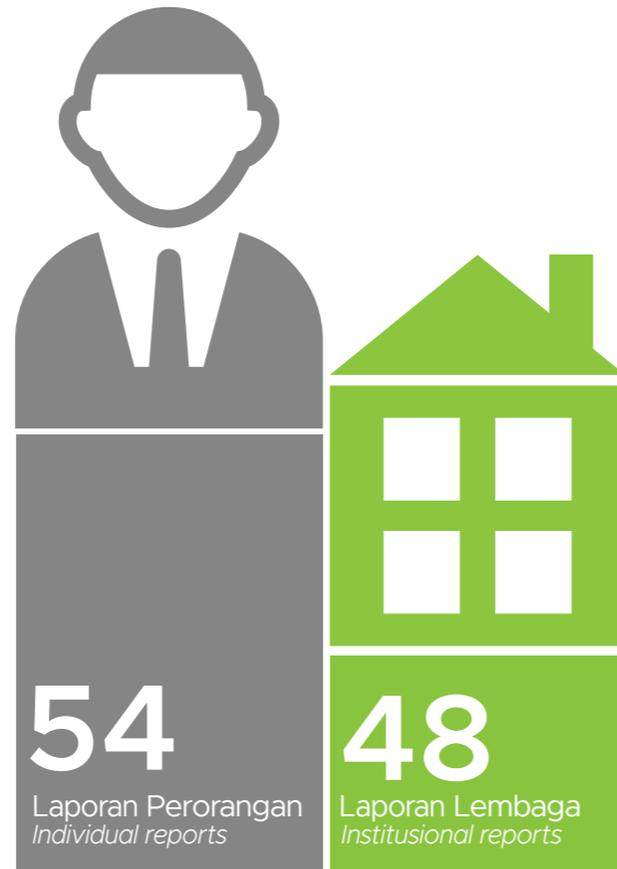
102

JENIS LAPORAN PENGADUAN MASYARAKAT

TYPES OF PUBLIC COMPLAINT REPORTS

Pengaduan masyarakat merupakan layanan publik PPATK bagi masyarakat yang ingin menyampaikan informasi atau aduan atas adanya indikasi tindak pidana asal dan tindak pidana pencucian uang yang diketahui atau dialami masyarakat tersebut. Pengaduan masyarakat dikategorikan menjadi dua laporan yaitu laporan yang berasal dari pihak individu atau pelaporan selaku lembaga. Adapun frekuensi pengaduan masyarakat periode bulan Juni 2025 disampaikan sebagai berikut.

Public complaints are a PPATK public service for members of the public who wish to submit information or complaints regarding indications of predicate offences and money laundering offences that they are aware of or have experienced. Public complaints are categorised into two types of reports: reports from individuals and reports from institutions. The frequency of public complaints for the period of June 2025 is as follows.



STATISTIK PENGADUAN MASYARAKAT LANGSUNG

Direct Public Complaints Statistics



LAYANAN BANTUAN

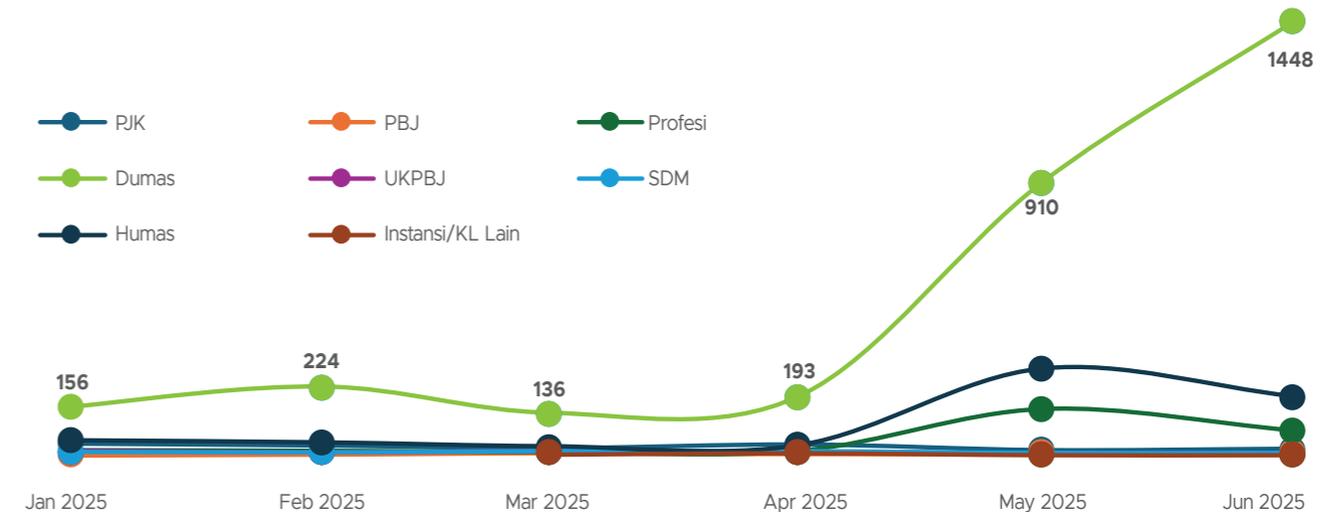
ASSISTANCE SERVICES

Layanan Bantuan PPATK adalah contact center yang berfungsi untuk memberikan informasi dan bantuan terkait pelaporan transaksi keuangan mencurigakan serta pertanyaan seputar kewajiban pelaporan bagi pihak pelapor. Layanan ini juga menampung aduan dan konsultasi dari masyarakat mengenai dugaan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme, serta membantu mengarahkan pelapor ke saluran yang tepat apabila masalah tersebut berada di luar kewenangan PPATK.

The PPATK Assistance Service is a contact center designed to provide information and support regarding the reporting of suspicious financial transactions, as well as inquiries about reporting obligations for reporting parties. This service also handles complaints and consultations from the public concerning alleged money laundering and terrorism financing activities, and helps direct complainants to the appropriate channels if the matter falls outside PPATK's jurisdiction.

GRAFIK LAYANAN BANTUAN VIA EMAIL

Email Support Service Chart



TABEL STATISTIK LAYANAN BANTUAN VIA EMAIL

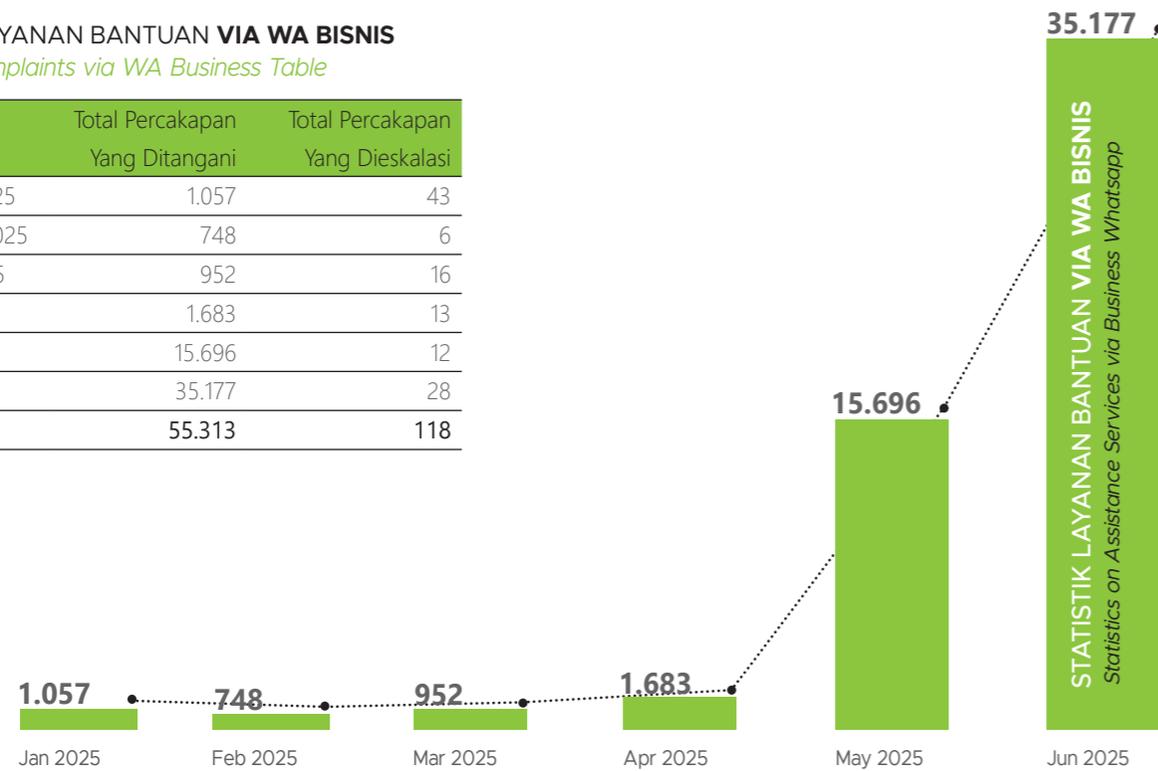
Table of Statistics on Assistance Services via Email

Bulan (month)	Klasifikasi (Classification)								Total
	PJK	PBJ	Profesi	Dumas	UKPBJ	SDM	Humas	Instansi/KL Lain	
Januari 2025	34	0	9	156	9	4	43	-	255
Februari 2025	27	2	7	224	4	2	36	-	302
Maret 2025	17	5	3	136	8	7	23	2	201
April 2025	31	3	7	193	5	7	27	5	278
Mei 2025	10	3	148	910	1	0	285	1	1.358
Juni 2025	15	3	76	1.448	1	0	192	1	1.736
Total	134	16	250	3.067	28	20	606	9	4.130

TABLE LAYANAN BANTUAN VIA WA BISNIS

Public Complaints via WA Business Table

Bulan	Total Percakapan Yang Ditangani	Total Percakapan Yang Dieskalasi
Januari 2025	1.057	43
Februari 2025	748	6
Maret 2025	952	16
April 2025	1.683	13
Mei 2025	15.696	12
Juni 2025	35.177	28
Total	55.313	118



2025, SEMESTER 1

2025, First Semester

RESUME STATISTIK LAYANAN BANTUAN

Email Support Service Chart

EMAIL SUPPORT



4.130

Email Layanan Bantuan
Support Service Emails



WA SUPPORT

55.313

WA Bisnis Yang Ditangani

Business WhatsApp Conversations Handled

2:43:43

Rata-Rata Waktu Penyelesaian Isu

Average Issue Resolution Time



MENANGKAP ISYARAT DARI RUANG DIGITAL

CAPTURING SIGNALS FROM THE DIGITAL SPACE

DALAM era digital, arus informasi mengalir begitu cepat melalui kanal media sosial, portal berita daring, maupun ruang diskusi publik. Dinamika ini menghadirkan tantangan sekaligus peluang bagi lembaga negara untuk lebih peka dalam membaca persepsi masyarakat.

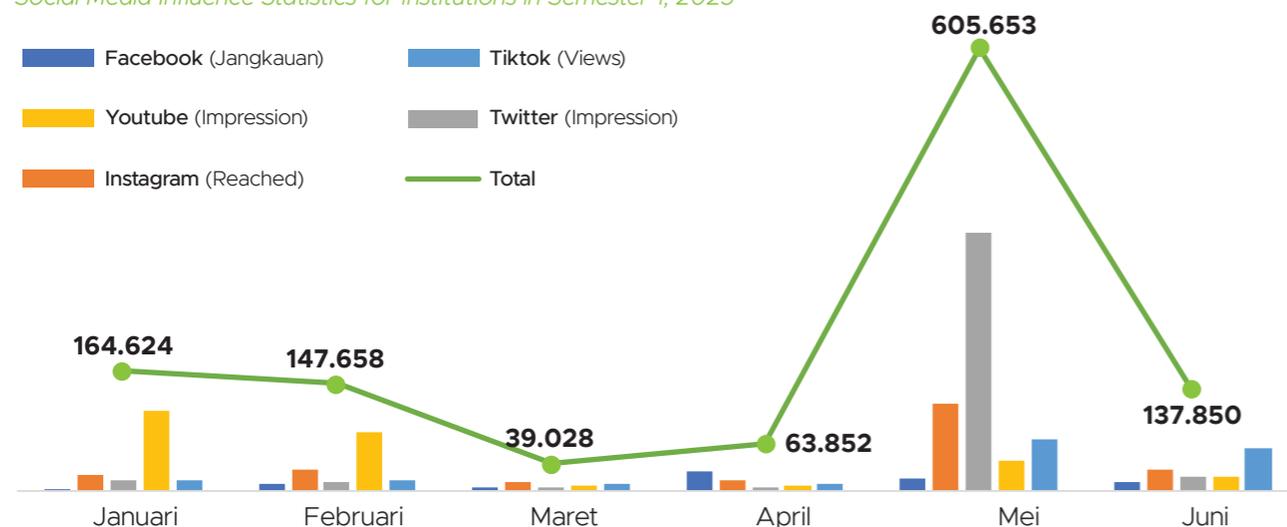
PPATK memanfaatkan kanal digital dan media publikasi tidak hanya sebagai sarana diseminasi informasi, tetapi juga sebagai "early warning system" dalam menangkap isu strategis yang berkembang di ruang publik. Setiap komentar, pemberitaan, hingga percakapan digital dianalisis untuk menemukan sinyal awal yang berkaitan dengan upaya pencegahan tindak pidana kejahatan keuangan.

IN THE DIGITAL age, information flows rapidly through social media channels, online news portals, and public discussion forums. This dynamic presents both challenges and opportunities for state institutions to be more sensitive in reading public perceptions.

PPATK utilizes digital channels and public media not only as a means of disseminating information, but also as an 'early warning system' in capturing strategic issues developing in the public sphere. Every comment, news report, and digital conversation is analysed to find early signals related to efforts to prevent financial crime.

STATISTIK PENGARUH SOSIAL MEDIA LEMBAGA SEMESTER 1 2025

Social Media Influence Statistics for Institutions in Semester 1, 2025



Pendekatan ini memungkinkan lembaga untuk segera merespons opini publik secara cepat, akurat, dan terukur. Dengan memperkuat strategi komunikasi, PPATK memastikan bahwa pesan-pesan informatif, klarifikasi isu, serta hasil kinerja kelembagaan dapat tersampaikan secara luas, sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap komitmen pemberantasan kejahatan keuangan.

This approach enables the agency to respond quickly, accurately, and measurably to public opinion. By strengthening its communication strategy, PPATK ensures that informative messages, issue clarifications, and institutional performance results are widely disseminated, while maintaining public trust in its commitment to combating financial crime.

TABEL PENGARUH SOCIAL MEDIA

social media influence table

Media	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni
Facebook (Jangkauan/Reach)	2.819	8.900	6.300	25.997	18.300	12.475
Instagram (Reached)	23.269	30.094	12.008	13.904	120.281	30.037
Twitter (Impression)	14.362	11.298	4.737	5.425	354.600	18.943
Youtube (Impression)	108.800	81.314	7.100	8.526	42.589	18.584
Tiktok (Views)	15.374	16.052	8.883	10.000	69.883	57.811
Total	164.624	147.658	39.028	63.852	605.653	137.850

TABEL KONTEN SOCIAL MEDIA

social media influence table

Platform Sosial Media	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni
Facebook	35	42	10	34	60	41
Twitter	23	16	10	7	8	14
Instagram	39	47	34	21	68	52
Youtube	10	4	15	7	9	9
Tiktok	12	15	3	9	9	9
TOTAL KONTEN	119	124	72	78	154	125

SENTIMEN PUBLIK

Public Sentiment

Tone/Bulan	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Total Tone
Tone Positif	1.217	1.108	540	482	2.340	770	6.457
Tone Netral	172	319	313	121	315	195	1.435
Tone Negatif	0	0	4	2	13	2	21
Total Pemberitaan	1.389	1.427	857	605	2.668	967	7.913

Jenis Media	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Total Tone
Media Cetak/Print Media	1.294	1.356	821	555	2.484	920	7.430
Media Daring/Online Media	84	62	32	40	130	40	388
Media Televisi/Television	11	9	4	10	50	7	91
Radio	0	0	0	0	4	0	4
Total Pemberitaan	1.389	1.427	857	605	2.668	967	7.913

Selama Semester I 2025, puncak pemberitaan PPATK terjadi pada Bulan Mei dengan sentimen positif mengalir sebanyak 2.340 artikel. Selain itu, ada 315 artikel berita netral, dengan 13 artikel berita bersentimen negatif. Pemberitaan ini dipantik oleh pemberitaan masif mengenai isu maraknya judi online. Secara keseluruhan pada semester ini, sentimen positif pemberitaan mendominasi dengan persentase mencapai 81,5%, sedangkan sentimen netral di posisi kedua dengan persentase 18,3%. Sementara itu, pemberitaan bersentimen negatif hanya ada sebesar 0,2%.

During Semester I 2025, PPATK news coverage peaked in May with 2,340 articles expressing positive sentiment. In addition, there were 315 neutral articles and 13 articles expressing negative sentiment. This coverage was triggered by massive reporting on the issue of rampant online gambling. Overall, positive sentiment dominated the news coverage this semester, reaching 81.5%, while neutral sentiment came in second with 18.3%. Meanwhile, negative sentiment only accounted for 0.2%.

JEJAK PEMBERITAAN DAN MEDIA SOSIAL (JANUARI-JUNI 2025)

Media Coverage and Social Media Footprint (January-June 2025)

PEMBERITAAN MEDIA (Media Coverage)

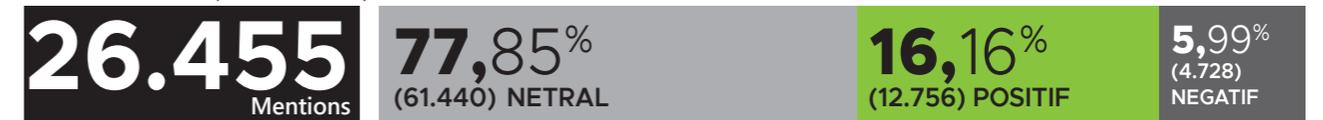


SENTIMEN MEDIA (Media Sentiment)

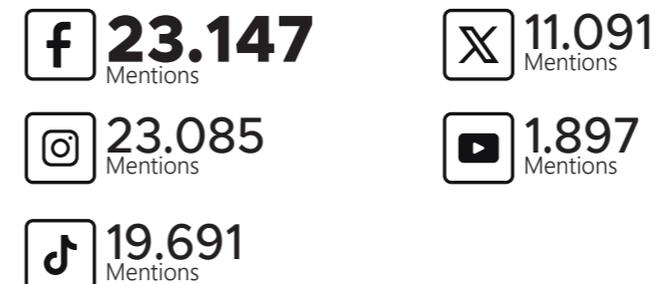


Negatif terkait: kritik blokir rekening *dormant*, isu Danantara, kasus PUPR Palembang.
Negative issues: criticism of dormant account blocking, Danantara issue, PUPR Palembang case.

MEDIA SOSIAL (Social Media)



BEST MENTIONS PLATFORM



REPUTASI DIGITAL (WOI)

- **REPUTASI** terus naik
Reputation continues to rise
- **DIDOMINASI** sentimen netral → positif
Dominated by neutral → positive sentiment
- **GRAFIK** konsisten di atas 0 (stabil dan sehat)
Graph consistently above 0 (stable and healthy)



Chapter 4

Bab 4

Integritas yang Bergerak dari Dalam

Integrity that Starts from Within

INTEGRITAS YANG BERGERAK DARI DALAM

INTEGRITY THAT COMES FROM WITHIN

KEKUATAN PPATK tidak hanya bertumpu pada analisis data dan intelijen keuangan, tetapi juga pada integritas kelembagaan yang tumbuh dari dalam. Integritas itu terjaga melalui pengelolaan sumber daya manusia, pelatihan dan transfer pengetahuan, penguatan literasi dan kajian keilmuan, akuntabilitas anggaran serta transparansi layanan, hingga pengadaan, kearsipan, dan penerapan nilai SPBE.

Sepanjang Semester I 2025, PPATK mengelola ribuan pegawai lintas generasi dengan komposisi pendidikan beragam. Melalui 47 program pelatihan, sebanyak 1.757 pegawai mengikuti pendidikan, 1.686 dinyatakan lulus dan 71 dinyatakan tidak lulus. Evaluasi kepuasan alumni, atasan, dan rekan kerja menunjukkan skor rata-rata 4,3–4,6 (baik–sangat baik), menandakan dampak positif pada kinerja dan kolaborasi.

Program BERMITRA turut memperkuat literasi publik sekaligus menghadirkan kajian akademis berbasis data dan praktik global sebagai rujukan kebijakan. Dari sisi tata kelola, PPATK menjaga akuntabilitas melalui realisasi anggaran yang baik, sistem pengadaan elektronik, serta pengelolaan arsip yang semakin terdigitalisasi.

Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pun terus meningkat, menegaskan komitmen PPATK pada efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas layanan. Dengan pijakan ini, integritas PPATK benar-benar bergerak dari dalam—menjadi landasan kokoh untuk mengawal negeri dengan data.

THE strength of PPATK lies not only in data analysis and financial intelligence, but also in institutional integrity that grows from within. This integrity is maintained through human resource management, training and knowledge transfer, strengthening literacy and scientific studies, budget accountability and service transparency, as well as procurement, archiving, and the application of SPBE values.

Throughout the first semester of 2025, PPATK managed thousands of employees across generations with diverse educational backgrounds. Through 47 training programs, 1,757 employees participated in education, 1,686 graduated and 71 did not pass. Evaluations of alumni, supervisors, and coworker satisfaction showed an average score of 4.3–4.6 (good–very good), indicating a positive impact on performance and collaboration.

The BERMITRA program also strengthens public literacy while presenting data-based academic studies and global practices as policy references. In terms of governance, PPATK maintains accountability through good budget realization, an electronic procurement system, and increasingly digitized archive management.

The implementation of the Electronic-Based Government System (SPBE) also continues to increase, affirming PPATK's commitment to efficiency, transparency, and accountability in its services. With this foundation, PPATK's integrity truly comes from within—becoming a solid foundation for safeguarding the country with data.

PENGUATAN PENGAWASAN INTERNAL DAN BUDAYA KERJA

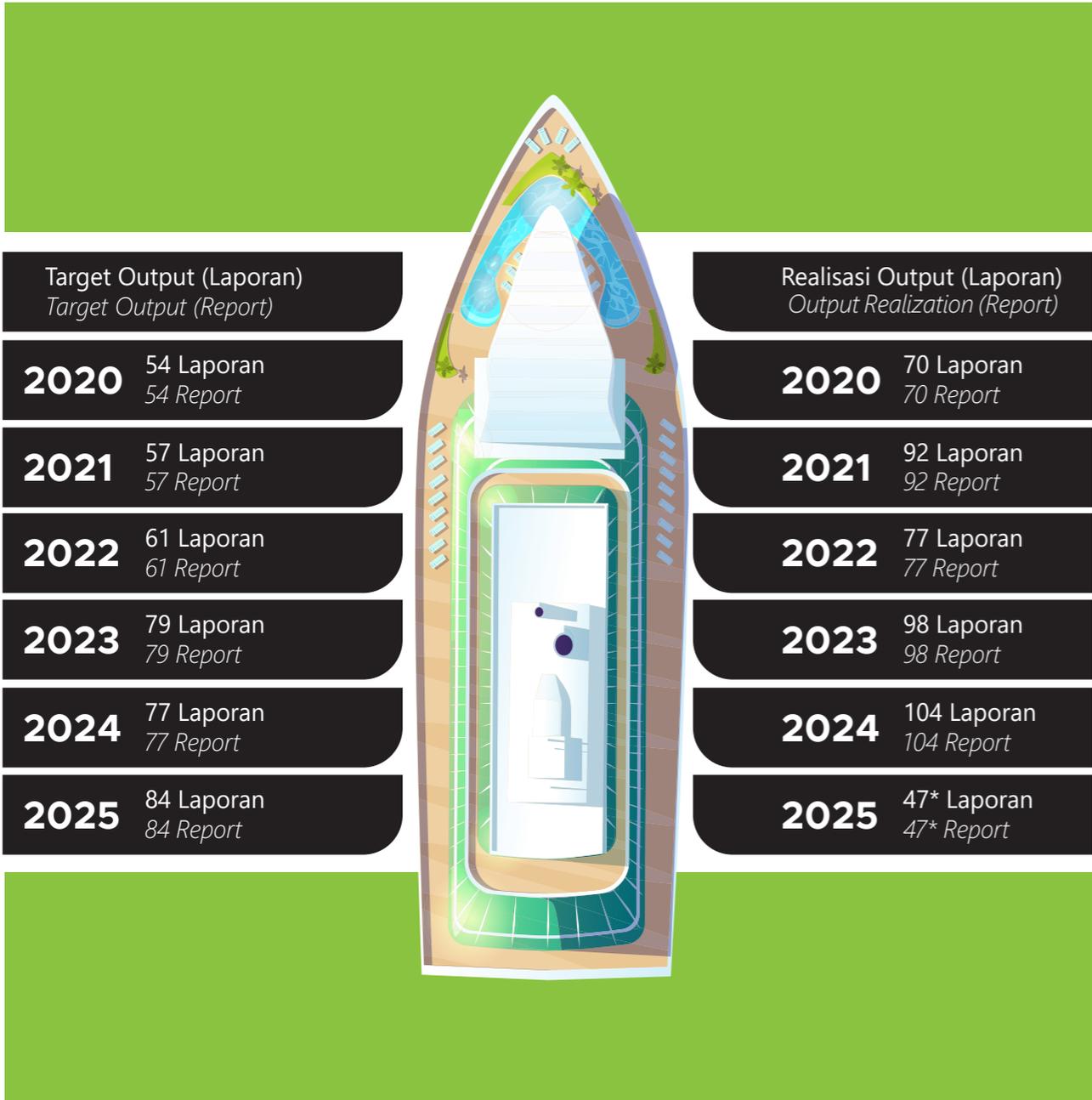
ENHANCING INTERNAL CONTROL SYSTEMS AND WORK CULTURE

IBARAT kapal besar yang berlayar di lautan, Inspektorat seperti navigator yang memegang peta dan kompas, untuk memastikan kapal tetap berada di jalur yang benar, menghindari batu karang, dan sampai ke tujuan dengan selamat. Sepanjang Semester I Tahun 2025, Inspektorat telah menyelesaikan Audit Kinerja atas Proses Bisnis Pengelolaan Layanan Bantuan dan Pengaduan Masyarakat tahun 2024. Kegiatan ini telah menghasilkan 5 rekomendasi yang bertujuan untuk memberikan nilai tambah dan saran perbaikan terkait dengan perbaikan kinerja proses bisnis layanan bantuan dan pengaduan masyarakat. Selain itu, Inspektorat juga turut mengawal pembangunan Zona Integritas, audit atas implementasi aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), pemantauan atas pelaporan gratifikasi, LHKPN dan SPT Tahun 2024 seluruh pegawai PPATK, serta turut menjaga akuntabilitas sistem keuangan nasional melalui revidi Laporan Keuangan, revidi revisi anggaran, hingga Pendampingan Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan PPATK. Inspektorat berkomitmen untuk meningkatkan kinerja pengawasan intern dalam memberikan *added value* pada perbaikan tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern pada setiap proses bisnis di lingkungan PPATK. Salah satu bentuk komitmen tersebut tercermin pada pencapaian output Inspektorat PPATK yang selalu melampaui menghasilkan laporan pengawasan intern sebanyak 47 Laporan dari target semester I 2025 sejumlah 38 laporan.

LIKE a great ship sailing the open seas, the Inspectorate serves as the navigator holding the map and compass, ensuring the vessel stays on course, avoids the reefs, and reaches its destination safely. Throughout the first semester of 2025, the Inspectorate completed a Performance Audit on the Business Process of Managing the Public Assistance and Complaint Services for 2024. This activity produced five recommendations aimed at providing added value and suggesting improvements to enhance the performance of these business processes.

In addition, the Inspectorate has played an active role in overseeing the development of the Integrity Zone, auditing the implementation of the Electronic-Based Government System (SPBE) application, monitoring the reporting of gratuities, asset declarations (LHKPN), and 2024 annual tax returns (SPT) of all PPATK employees. It has also helped safeguard the accountability of the national financial system through reviews of financial statements, budget revisions, and by assisting the Audit Board of Indonesia (BPK) in its audit of PPATK's financial statements.

The Inspectorate remains committed to strengthening internal oversight to deliver added value in improving governance, risk management, and internal controls across all business processes within PPATK. This commitment is reflected in its performance achievement: during the first semester of 2025, the Inspectorate produced 47 internal audit reports, surpassing the semester target of 38 reports.



KOLABORASI UNTUK PERBAIKAN BERSAMA

COLLABORATION FOR MUTUAL IMPROVEMENT

KREDIBILITAS pengawasan internal PPATK telah diakui oleh instansi pemerintah lainnya. Pada bulan Juni tahun 2025, Inspektorat PPATK diberikan kepercayaan oleh Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI) untuk menjadi tim penelaah dan melakukan Telaah Sejawat Ekstern kepada Inspektorat Utama BNPB.

THE credibility of PPATK's internal oversight has been recognized by other government institutions. In June 2025, the PPATK Inspectorate was entrusted by the Association of Government Internal Auditors of Indonesia (AAIPI) to serve as a peer reviewer and conduct an External Peer Review of the Principal Inspectorate of BNPB.

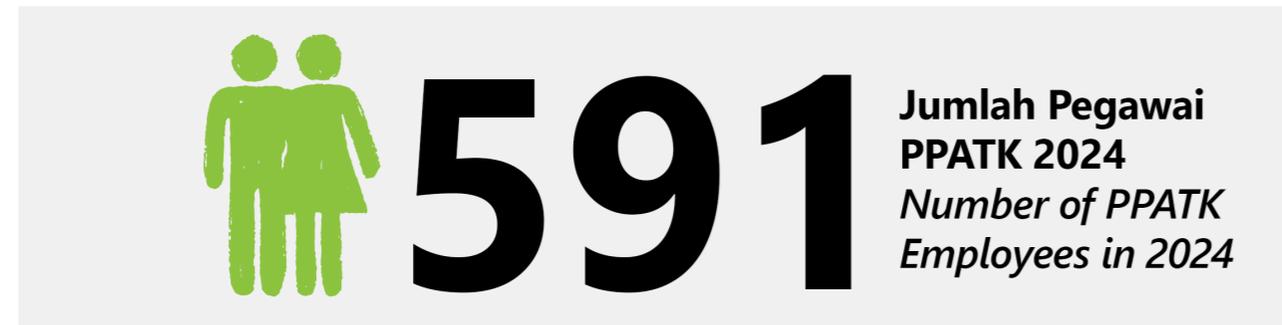


DUKUNGAN PUNGGAWA BERINTERGITAS DAN KOMPETEN

SUPPORT FROM INTEGRITY AND COMPETENT LEADERS

UNTUK mewujudkan kinerja yang optimal dalam menyongsong Indonesia Emas 2045, PPATK telah memiliki dukungan punggawa yang siap berkontribusi nyata bagi bangsa. Hingga 30 Juni 2025, PPATK telah memiliki total pegawai sejumlah 591 orang. Adapun rincian demografi para pegawai PPATK sebagai berikut :

TO achieve optimal performance in welcoming Indonesia Emas 2045, PPATK has the support of key figures who are ready to make a real contribution to the nation. As of June 30, 2025, PPATK has a total of 591 employees. The demographic details of PPATK employees are as follows:



Pegawai PPATK berdasarkan Jenis Kelamin
PPATK Employees by Gender

MELAHIRKAN PUNGGAWA INTEGRITAS KEUANGAN

GIVING BIRTH TO FINANCIAL INTEGRITY CHAMPIONS

KOMPETENSI yang mumpuni akan memperkuat sistem pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang serta pendanaan terorisme, yang pada akhirnya menjaga stabilitas ekonomi dan keamanan nasional. Dengan sumber daya manusia yang profesional, beretika, dan adaptif, cita-cita Indonesia menjadi negara maju, berdaya saing, dan berkeadilan di tahun 2045 dapat terwujud, sejalan dengan semangat Asta Cita untuk menciptakan pemerintahan bersih, masyarakat sejahtera, dan bangsa yang berdaulat.

Kiprah Pusat Pendidikan dan Pelatihan APUPPT dalam penyelenggaraan program pendidikan dan pelatihan selama Semester I Tahun 2025 menunjukkan dampak positif yang diukur melalui beberapa metode. Proses pengumpulan data menggunakan kuesioner dan wawancara mendalam melibatkan alumni, atasan, dan rekan kerja. Sejumlah 1.686 peserta dinyatakan lulus dari total 1.757 yang berpartisipasi, terbagi dalam 47 program kelas yang berbeda.

THE prevention and eradication of money laundering and terrorism financing ultimately safeguard economic stability and national security. With a professional, ethical, and adaptive workforce, Indonesia's vision of becoming an advanced, competitive, and just nation by 2045 can be realized, in line with the spirit of Asta Cita to create a clean government, a prosperous society, and a sovereign nation.

The role of the Center for AML/CFT Education and Training in delivering programs during the first semester of 2025 has shown measurable positive impacts through various evaluation methods. Data collection was carried out using questionnaires and in-depth interviews involving alumni, supervisors, and colleagues. Out of a total of 1,757 participants, 1,686 successfully graduated, spread across 47 different training programs.

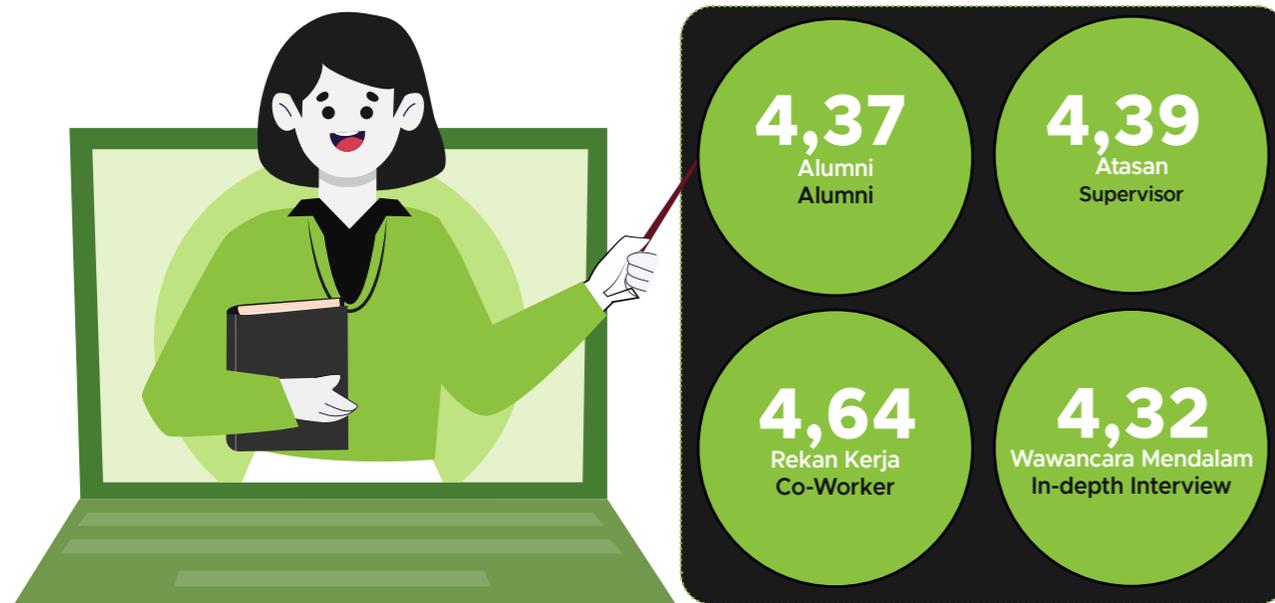


HASIL evaluasi melalui kuesioner menilai beberapa aspek penting, mulai dari perubahan perilaku setelah pelatihan, penerapan pengetahuan dan keterampilan baru dalam pekerjaan, dukungan lingkungan kerja, hingga sejauh mana alumni menyebarkan pengetahuan kepada rekan-rekannya. Dari pengukuran tersebut, diperoleh skor rata-rata 4,37 (baik) dari alumni, 4,39 (baik) dari atasan, dan 4,64 (sangat baik) dari rekan kerja. Angka ini menegaskan bahwa pelatihan berdampak positif, terutama dalam peningkatan kompetensi, penerapan inovasi di unit kerja, serta penguatan kerja sama tim.

Wawancara mendalam juga menghasilkan skor rata-rata 4,32 (baik) yang semakin memperkuat adanya perubahan positif, baik bagi individu peserta maupun lingkungan kerja mereka. Selain peningkatan pengetahuan, sejumlah alumni dinilai lebih terampil dalam menerapkan prinsip APUPPT dalam tugas sehari-hari.

THROUGH the questionnaires, several aspects were measured, including behavioral changes after training, the application of new knowledge and skills in the workplace, the level of support from the work environment, and the extent to which alumni shared their acquired knowledge with colleagues. The results showed that the average scores were 4.37 from alumni (good), 4.39 from supervisors (good), and 4.64 from colleagues (very good). These scores indicate that the training has had a positive impact on participants, particularly in enhancing competencies, fostering innovation within work units, and strengthening teamwork. Findings from in-depth interviews also produced an average score of 4.32 (good), reinforcing the evidence of positive changes both for participants individually and within their work environments. In addition to gaining knowledge, several alumni were also assessed as becoming more proficient in applying AML/CFT principles in their daily tasks.

NILAI SKOR EFEKTIVITAS EFFECTIVENESS SCORE



PENGUATAN LITERASI DAN KAJIAN KEILMUAN

STRENGTHENING LITERACY AND SCIENTIFIC STUDIES

PENGUATAN literasi dan kajian keilmuan adalah pilar penting dalam memperkuat rezim Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APUPPT) di Indonesia. Literasi yang baik membuka pemahaman masyarakat, aparat, dan para pemangku kepentingan tentang risiko, modus, dan dampak kejahatan keuangan. Di sisi lain, kajian keilmuan menyediakan analisis berbasis data, teori, serta praktik global yang menjadi rujukan dalam merumuskan kebijakan adaptif dan efektif. Sinergi antara literasi dan kajian ini melahirkan kesadaran kritis sekaligus kapasitas teknis yang andal, sehingga Indonesia mampu menjaga integritas sistem keuangan, memperkuat stabilitas ekonomi, dan meningkatkan reputasi di mata dunia. PPAK sebagai *leading sector* dalam gerakan APUPPT di Indonesia telah menghadirkan layanan dan fasilitas Perpustakaan PPAK, yang memiliki koleksi terbanyak terkait APUPPT.

STRENGTHENING literacy and scientific studies an important foundation in supporting a strong Anti-Money Laundering and Counter-Terrorism Financing (AML/CFT) regime in Indonesia. Good literacy promotes understanding among the public, authorities, and stakeholders of the risks, modes, and impacts of money laundering and terrorist financing. Meanwhile, scientific studies provide data-driven analysis, theory, and global practices as references for formulating adaptive and effective policies. The synergy between the two creates critical awareness and technical capacity, enabling Indonesia to maintain the integrity of its financial system, strengthen economic stability, and support its international reputation. As the leading sector in the APUPPT movement in Indonesia, PPAK has provided the PPAK Library service and facilities, which have the largest collection related to APUPPT.



PERPUSTAKAAN yang memiliki nama Tanoh Abee ini telah tercatat resmi dalam data Perpustakaan Nasional sebagai Perpustakaan Khusus, dan telah memperoleh Akreditasi, sehingga eksistensinya telah teruji secara komprehensif. Tidak hanya internal PPATK, Perpustakaan Tanoh Abee juga dapat dikunjungi dan diakses oleh masyarakat umum.

THE library, named Tanoh Abee, has been officially registered in the National Library's database as a Special Library and has obtained accreditation, proving its comprehensive existence. Not only internal to PPATK, the Tanoh Abee Library can also be visited and accessed by the general public.

KUNJUNGAN PERPUSTAKAAN VISITOR LIBRARY



PEMINJAMAN BUKU PERPUSTAKAAN LIBRARY BOOK LENDING



JURNAL PENCEGAHAN PENCUCIAN UANG DAN PEMBERANTASAN PENDANAAN TERORISME

THE JOURNAL OF ANTI MONEY LAUNDERING AND COUNTERING THE FINANCING OF TERRORISM

THE Journal of Anti Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism merupakan jurnal resmi yang diterbitkan oleh PPATK. Kehadirannya menjadi wujud nyata komitmen PPATK untuk mendorong kajian ilmiah yang mendalam dan komprehensif terkait isu pencucian uang, pendanaan terorisme, serta pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal. Jurnal ini tidak hanya menyajikan hasil penelitian dan analisis akademik, tetapi juga menjadi ruang kolaborasi bagi para peneliti, praktisi, akademisi, dan masyarakat luas dalam memberikan kontribusi pemikiran strategis untuk memperkuat rezim Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APUPPT). Dengan menghadirkan beragam perspektif dan studi empiris, jurnal ini diharapkan mampu memperkaya literatur ilmiah, mendorong diskusi kritis, serta memperkuat sinergi nasional maupun internasional dalam menjaga stabilitas dan integritas sistem keuangan dan perekonomian negara.

THE Journal of Anti Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism is an official journal published by the Financial Transaction Reports and Analysis Center (PPATK). Its presence is a tangible manifestation of PPATK's commitment to encouraging in-depth and comprehensive scientific studies related to money laundering, terrorism financing, and the financing of weapons of mass destruction proliferation. This journal not only presents research results and academic analysis, but also serves as a space for collaboration among researchers, practitioners, academics, and the wider community in contributing strategic ideas to strengthen the Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism (AML/CFT) regime. By presenting diverse perspectives and empirical studies, this journal is expected to enrich scientific literature, encourage critical discussion, and strengthen national and international synergy in maintaining the stability and integrity of the country's financial and economic systems.

JURNAL TERBIT
PUBLISHED JOURNAL

Jumlah jurnal yang terbit : 6 Edisi
Number of journals published: 6 editions

Jumlah judul yang terbit : 37 Judul
Number of titles published: 37 titles

Jumlah kontributor : 107 Penulis
Number of contributors: 107 authors

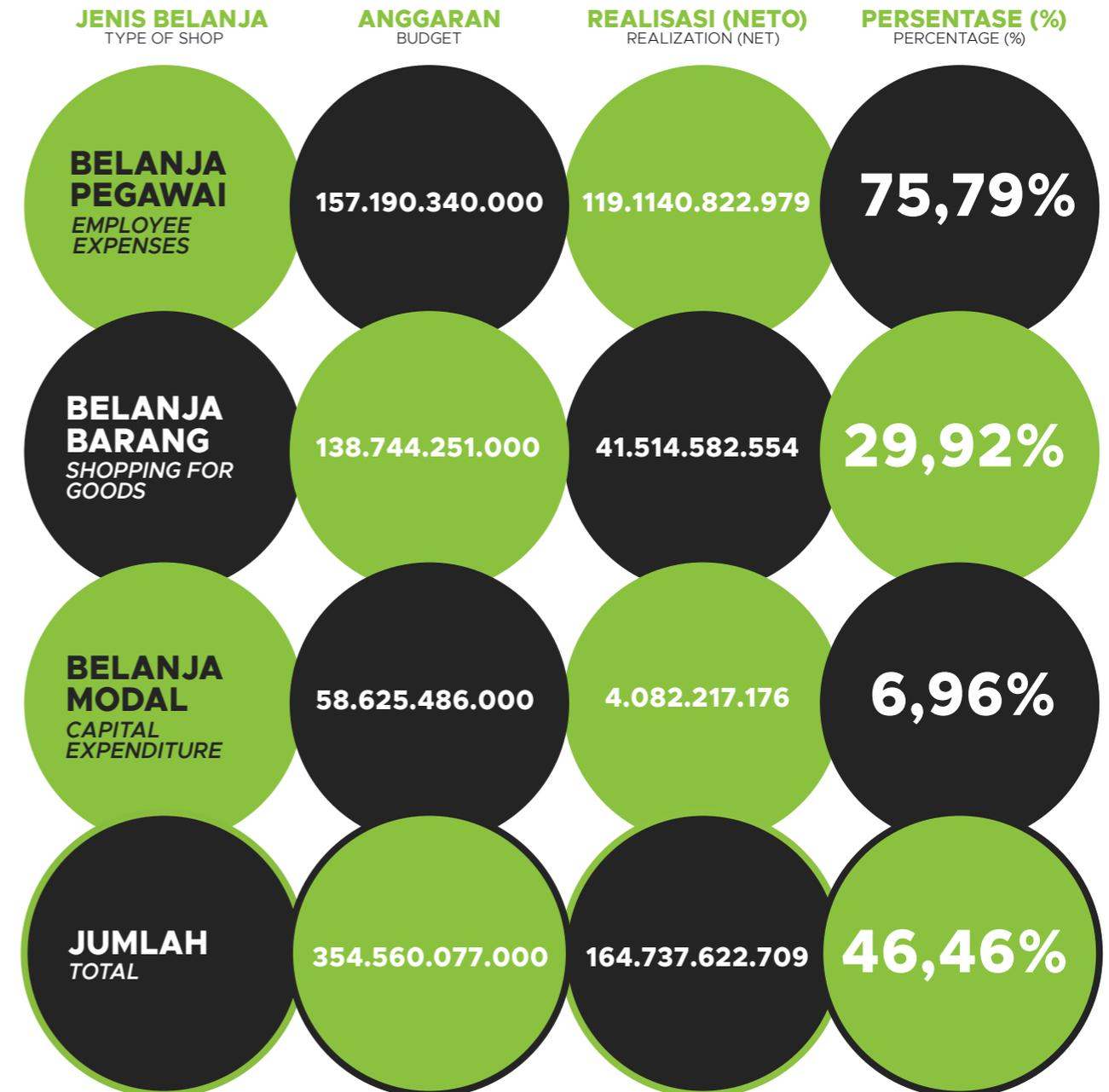


AKUNTABILITAS ANGGARAN DAN TRANSPARANSI LAYANAN

BUDGET ACCOUNTABILITY AND SERVICE TRANSPARENCY

DUKUNGAN anggaran yang memadai memungkinkan penguatan teknologi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, hingga perluasan kerja sama lintas sektor dan internasional. Dengan pijakan ini, PPATK mampu menjaga integritas sistem keuangan, melindungi stabilitas ekonomi, dan menutup ruang bagi kejahatan keuangan yang menghambat pembangunan. Optimalisasi pemanfaatan anggaran menjadi kunci strategis untuk mewujudkan Asta Cita Presiden dan mengantarkan Indonesia menuju Indonesia Emas 2045. Karena itu, PPATK berkomitmen mengelola setiap rupiah secara cermat, bijak, dan berdampak nyata. Dengan menjunjung tinggi prinsip akuntabilitas dan transparansi, setiap langkah diarahkan untuk memperkuat pencegahan dan pemberantasan kejahatan keuangan, demi terwujudnya Indonesia yang maju, aman, dan bermartabat. Di tahun 2025, Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) PPATK terbagi menjadi dua bagian program kerja, yakni Program Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Pendanaan Terorisme sebesar Rp126.350.135.000,00 dan Program Dukungan Manajemen sebesar Rp228.209.942.000,00 Sepanjang Semester I tahun 2025, dengan pagu anggaran mencapai Rp354.560.077.000,00 PPATK telah melakukan 46,46% realisasi anggaran atau mencapai Rp164.737.622.709,00.

ADEQUATE budget support enables technological strengthening, human resource capacity building, and expansion of cross-sectoral and international cooperation. With this foundation, PPATK is able to maintain the integrity of the financial system, protect economic stability, and close loopholes for financial crimes that hinder development. Optimizing budget utilization is a strategic key to realizing the President's Asta Cita and leading Indonesia towards Indonesia Emas 2045. Therefore, PPATK is committed to managing every rupiah carefully, wisely, and with a tangible impact. By upholding the principles of accountability and transparency, every step is directed at strengthening the prevention and eradication of financial crime, for the realization of a developed, safe, and dignified Indonesia. In 2025, PPATK's Budget Implementation List (DIPA) is divided into two work programs, namely the Program for the Prevention and Eradication of Money Laundering (TPPU) and Terrorism Financing amounting to IDR126,350,135,000 and the Management Support Program amounting to IDR228,209,942,000. Throughout the first semester of 2025, with a budget ceiling of Rp354,560,077,000, PPATK has realized 46.46% of the budget or Rp164,737,622,709.



PENGADAAN BARANG DAN JASA

PROCUREMENT OF GOODS AND SERVICES

PENGADAAN barang dan jasa memegang peran penting dalam menunjang kinerja instansi pemerintah agar dapat memberikan pelayanan terbaik bagi bangsa dan negara. Dengan menjunjung tinggi semangat BerAKHLAK, PPATK berkomitmen melaksanakan setiap proses pengadaan secara transparan, tepat guna, dan berdampak nyata bagi kinerja lembaga maupun kebutuhan masyarakat.

Seluruh tahapan pengadaan dijalankan dengan prinsip akuntabel, efektif, dan efisien, sehingga setiap rupiah anggaran negara digunakan secara tepat sasaran. Melalui tata kelola yang profesional, PPATK tidak hanya memastikan kebutuhan organisasi terpenuhi, tetapi juga memperkuat integritas birokrasi dan mendorong terwujudnya pemerintahan yang bersih serta berorientasi pada pelayanan publik. Sepanjang Semester 1 Tahun 2025, UKPBJ PPATK telah menyelesaikan sejumlah pengadaan dengan rincian realisasi sebagai berikut :

THE procurement of goods and services plays an important role in supporting the performance of government agencies so that they can provide the best services for the nation and state. By upholding the spirit of BerAKHLAK, PPATK is committed to carrying out every procurement process in a transparent, effective, and impactful manner for the performance of the institution and the needs of the community.

All stages of procurement are carried out based on the principles of accountability, effectiveness, and efficiency, so that every rupiah of the state budget is used appropriately. Through professional governance, PPATK not only ensures that the organization's needs are met, but also strengthens the integrity of the bureaucracy and encourages the realization of a clean government that is oriented towards public service.

During the first semester of 2025, UKPBJ PPATK has completed a number of procurements with the following details:

Metode Pemilihan	Jumlah Paket (RUP)	Jumlah Paket (Realisasi)	Persentase
Tender	18	5	28%
Seleksi	4	0	0%
Pengadaan Langsung	226	127	56%
Penunjukan Langsung	3	1	33%
E-Purchasing	177	89	50%
Dikecualikan	105	20	19%

NILAI SPBE

SPBE SCORE

EVALUASI Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menjadi dasar penting dalam menentukan arah tindak lanjut peningkatan penerapan SPBE di instansi pusat maupun pemerintah daerah. Tujuannya jelas: meningkatkan kualitas layanan publik dan mewujudkan Pemerintah Digital dalam kerangka transformasi digital nasional.

Bagi PPATK, penerapan SPBE membuat kerja organisasi lebih terukur dan terarah. Tata kelola pemerintahan menjadi lebih baik karena data, informasi, pengetahuan, dan risiko dapat dikelola secara menyeluruh. Berbagai kebijakan, rencana strategis, proses bisnis, dan standar operasional prosedur (SOP) kini terpetakan dengan lebih jelas dan tidak saling tumpang tindih.

Selain itu, SPBE juga mendorong PPATK semakin terkoneksi dan terintegrasi dengan kementerian/lembaga lain, baik dari sisi kebijakan, data, informasi, maupun sistem teknologi informasi. Dengan landasan ini, PPATK memperkuat efektivitas kinerja sekaligus menjaga transparansi dan akuntabilitas layanan publik.

Pada tahun 2024, Nilai SPBE PPATK mencapai indeks 4.66 dengan predikat Memuaskan. Hal ini menunjukkan tren kenaikan dari 5 tahun terakhir.

THE results of the Electronic-Based Government System (SPBE) evaluation can serve as a basis for determining the next steps required to strengthen the comprehensive implementation of SPBE across central and regional government institutions. This effort is aimed at improving the quality of SPBE services for the public and realizing Digital Government within the broader framework of Government Digital Transformation. Through SPBE, organizational performance becomes more measurable and better structured. Governance at PPATK has improved, with data, information, knowledge, and risks being more effectively managed. Various policies, strategic plans, business processes, and standard operating procedures (SOPs) at PPATK have been better mapped, ensuring alignment and minimizing overlap. Furthermore, PPATK is becoming increasingly connected and integrated with other ministries and institutions in terms of policies, data, information, and information technology systems.

In 2024, PPATK's SPBE score reached an index of 4.66 with a "Satisfactory" rating, reflecting an upward trend over the past five years.



PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA (BMN)

MANAGEMENT OF STATE PROPERTY (BMN)

SEBAGAI instansi pemerintah, PPATK berkomitmen mengelola Barang Milik Negara (BMN) secara profesional, transparan, dan akuntabel. Pengelolaan BMN yang baik memastikan aset negara dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung tugas dan fungsi kelembagaan. Melalui tata kelola yang tertib dan efisien, PPATK mendukung upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih, efisien, serta bertanggung jawab terhadap pengelolaan keuangan negara.

Realisasi PNBP dari kegiatan Pengelolaan BMN secara umum bersumber dari proses Pemanfaatan BMN dan Pemindahtanganan BMN melalui mekanisme lelang. Selama periode semester 1 tahun 2025, telah dilaksanakan 4 kegiatan pemindahtanganan BMN dan 1 kegiatan pemanfaatan melalui mekanisme sewa sebagian lahan Kantor Pusat PPATK. Selain itu, PNBP juga diperoleh dari no claim bonus asuransi BMN. Rincian lebih lanjut dari setiap kegiatan adalah sebagai berikut:

PNBP dari kegiatan pemindahtanganan <i>Non-tax state revenue from transfer activities</i>	Rp140.366.628,00
PNBP dari kegiatan pemanfaatan BMN <i>Non-tax state revenue from BMN utilization activities</i>	Rp16.595.000,00
PNBP dari no claim bonus (NCB) asuransi BMN <i>Non-tax state revenue from BMN insurance no claim bonus</i>	Rp22.232.751,00
Total	Rp179.194.379,00

AS a government agency, PPATK is committed to managing State Property (BMN) in a professional, transparent, and accountable manner. Good BMN management ensures that state assets are optimally utilized to support institutional tasks and functions. Through orderly and efficient governance, PPATK supports efforts to realize a clean, efficient, and responsible government in terms of state financial management.

The realization of non-tax state revenue (PNBP) from BMN management activities generally comes from the utilization of BMN and the transfer of BMN through auction mechanisms. During the first semester of 2025, four (4) BMN transfer activities and one (1) utilization activity were carried out through the mechanism of leasing part of the PPATK Head Office land. In addition, PNBP was also obtained from the no claim bonus for BMN insurance. Further details of each activity are as follows:

MERUJUK Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah, penatausahaan aset meliputi pencatatan BMN, inventarisasi dan pelaporan. Pada sisi pencatatan BMN posisi nilai dan proporsi jenis Barang Milik Negara pada kantor pusat PPATK adalah sebagai berikut:

REFERRING to Government Regulation No. 28 of 2020 concerning Amendments to Government Regulation No. 27 of 2014 concerning Management of State/Regional Property, asset management includes recording of state property, inventory, and reporting. In terms of recording state property, the value and proportion of state property at the PPATK headquarters are as follows:

Jenis BMN <i>Type of BMN</i>	Nilai Perolehan (Rp) <i>Acquisition Value (Rp)</i>	Nilai Buku (Rp) <i>Book Value (Rp)</i>	NUP
Alat Angkutan Bermotor <i>Motorized Vehicles</i>	12,430,784,804,00	1,946,777,146,00	37
Alat Besar <i>Heavy Equipment</i>	4,399,087,466,00	355,460,713,00	13
Aset Tak Berwujud <i>Intangible Assets</i>	50,834,315,131,00	19,406,841,392,00	105
Aset Tetap Lainnya <i>Other Fixed Assets</i>	1,035,722,290,00	1,013,169,790,00	574
Bangunan dan Gedung <i>Buildings and Structures</i>	137,633,506,117,00	116,485,138,611,00	1
Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) <i>Interior Construction Work in Progress</i>	1,053,900,000,00	1,053,900,000,00	2
Mesin Peralatan Khusus Tik <i>Special Equipment Machines Tik</i>	135,893,816,732,00	22,264,950,089,00	1,943
Mesin Peralatan Non Tik <i>Non-Tik Equipment Machines</i>	40,633,212,717,00	8,928,654,154,00	4,040
Tanah <i>Land</i>	194,364,000,000,00	194,364,000,000,00	1
Total	578,278,345,257,00	365,818,891,895,00	6,716



Chapter 5

Bab 5

Jaga Masa Depan Sistem Keuangan Nasional

Safeguarding the Future of the National Financial System

JAGA MASA DEPAN SISTEM KEUANGAN NASIONAL

SAFEGUARD THE FUTURE OF THE NATIONAL FINANCIAL SYSTEM

PERUBAHAN peta keuangan global menghadirkan tantangan baru bagi Indonesia. Jika dulu pencucian uang banyak bersumber dari korupsi, narkoba, penipuan, dan perpajakan, kini aset kripto, *fintech*, dan perdagangan lintas negara mulai dimanfaatkan sebagai lahan baru kejahatan keuangan. Kompleksitas ini tidak hanya mengancam stabilitas ekonomi, tetapi juga menggerus kepercayaan publik dan menghambat pencapaian Asta Cita menuju Indonesia Emas 2045.

PPATK merespons dengan memperkuat analisis intelijen keuangan, audit kepatuhan, hingga penyusunan penilaian risiko nasional. Upaya ini dibarengi dengan inisiatif pencegahan di sektor tertentu, seperti mentoring berbasis risiko dan pengawasan lembaga nirlaba. Di tingkat global, PPATK memainkan peran penting dalam forum FATF, APG, hingga Bali Process, menyuarakan kepentingan Indonesia sekaligus mendorong tata kelola keuangan internasional yang lebih adil dan adaptif.

Dengan mengawal data, memperkuat kolaborasi lintas sektor, serta menjaga kepercayaan dunia, PPATK berkomitmen melindungi masa depan sistem keuangan nasional dari ancaman kejahatan lintas batas, memastikan setiap rupiah kembali untuk rakyat.

CHANGES in the global financial landscape present new challenges for Indonesia. Whereas money laundering used to stem mainly from corruption, narcotics, fraud, and taxation, now crypto assets, fintech, and cross-border trade are being exploited as new avenues for financial crime. This complexity not only threatens economic stability but also erodes public trust and hinders the achievement of the Asta Cita vision for Indonesia Emas 2045.

PPATK has responded by strengthening financial intelligence analysis, compliance audits, and the preparation of national risk assessments. These efforts are accompanied by prevention initiatives in certain sectors, such as risk-based mentoring and supervision of non-profit organizations. At the global level, PPATK plays an important role in forums such as FATF, APG, and the Bali Process, voicing Indonesia's interests while promoting fairer and more adaptive international financial governance.

By safeguarding data, strengthening cross-sector collaboration, and maintaining global trust, PPATK is committed to protecting the future of the national financial system from the threat of cross-border crime, ensuring that every rupiah returns to the people.

ASET KRIPTO: LAHAN BARU PENCUCIAN UANG

CRYPTO ASSETS: A NEW FRONTIER FOR MONEY LAUNDERING

TINDAK pidana pencucian uang di Indonesia terus berkembang, terutama berasal dari korupsi, narkoba, penipuan, dan perpajakan. Fenomena ini menghambat visi Indonesia Emas 2045 karena menurunkan kepercayaan publik, melemahkan stabilitas ekonomi, dan menghambat implementasi Asta Cita. Jika tidak ditangani tegas, pencucian uang akan menghambat kesejahteraan masyarakat dan kemajuan bangsa.

Pada Semester I 2025, PPATK menemukan tren pencucian uang melalui aset kripto. Kripto tidak hanya dimanfaatkan sebagai investasi, tetapi juga sebagai sarana aktivitas keuangan ilegal, termasuk penampungan dana hasil perjudian daring, penipuan, dan kejahatan berbasis teknologi. PPATK juga mengidentifikasi pemanfaatan aset kripto untuk mendukung pendanaan entitas atau individu terafiliasi jaringan terorisme internasional melalui pedagang aset virtual di luar yurisdiksi Indonesia, yang menyulitkan pelacakan. Selain itu, PPATK mencatat ribuan individu di Indonesia aktif sebagai trader P2P dengan total transaksi lebih dari Rp236 triliun. Aktivitas ini rawan menjadi sarana pencucian uang dan berpotensi mengurangi penerimaan negara akibat lemahnya kepatuhan perpajakan. Kondisi ini membutuhkan penguatan regulasi, tata kelola lintas sektor, dan kolaborasi internasional untuk memitigasi risiko sistemik dari ekosistem aset kripto.

IN the first semester of 2025, PPATK identified a growing trend of money laundering activities conducted through crypto assets. Cryptocurrencies are not only being used as investment instruments but have also become a medium for illicit financial activities, including the placement of funds derived from online gambling, fraud, and cyber-enabled crimes.

PPATK also found evidence of crypto assets being used to support the financing of entities or individuals affiliated with international terrorism networks through virtual asset service providers operating outside Indonesia's jurisdiction, creating significant challenges for tracing and enforcement.

In addition, PPATK recorded thousands of individuals in Indonesia actively engaged as peer-to-peer (P2P) crypto traders, with total transactions exceeding IDR 236 trillion. This activity poses a high risk of being exploited for money laundering and could potentially reduce state revenue due to weak compliance with tax obligations.

These conditions highlight the urgent need for stronger regulations, cross-sector governance, and enhanced international collaboration to mitigate the systemic risks arising from the crypto asset ecosystem.



ANOMALI TRANSAKSI ASET KRIPTO DI INDONESIA

CRYPTOCURRENCY TRADING ANOMALIES IN INDONESIA

Penampungan Dana Hasil Tindak Pidana Lintas Sektor
Cross-Sector Criminal Proceeds Repatriation

Pendanaan Entitas Jaringan Terorisme
Terrorist Network Entity Funding

Transaksi Besar Trader Peer to Peer Aset Kripto
Large Peer-to-Peer Cryptocurrency Asset Trader Transactions

SUARA PPATK DI PANGGUNG INTERNASIONAL

PPATK'S VOICE ON THE INTERNATIONAL STAGE

DALAM upaya memperkuat posisi Indonesia di tingkat global, PPATK secara aktif terlibat dalam berbagai forum internasional guna memperkuat rezim APUPPT.

IN an effort to strengthen Indonesia's position at the global level, PPATK is actively involved in various international forums to strengthen the APUPPT regime.

MENINGKATKAN KEPATUHAN INTERNASIONAL IMPROVING INTERNATIONAL COMPLIANCE



DI bawah koordinasi PPATK, Indonesia berhasil meningkatkan peringkat kepatuhan terhadap Rekomendasi 7 FATF dari *Partially Compliant* menjadi *Largely Compliant* terkait pembekuan aset untuk mencegah proliferasi senjata pemusnah massal

UNDER the coordination of PPATK, Indonesia has successfully improved its compliance rating with FATF Recommendation 7 from *Partially Compliant* to *Largely Compliant* in relation to asset freezing to prevent the proliferation of weapons of mass destruction.

KETERLIBATAN AKTIF DALAM FORUM INTERNASIONAL ACTIVE PARTICIPATION IN INTERNATIONAL FORUMS



BERPARTISIPASI aktif dalam forum BRICS dan Eurasian Group (EAG) dengan kontribusi berupa penekanan pentingnya pendekatan teknis, adil, dan berbasis data dalam *Mutual Evaluation* yang dijalankan oleh FATF

ACTIVELY participate in the BRICS and Eurasian Group (EAG) forums by emphasizing the importance of a technical, fair, and data-driven approach in the *Mutual Evaluation* conducted by the FATF.

ADVOKASI PERBAIKAN TATA KELOLA GLOBAL ADVOCACY FOR IMPROVING GLOBAL GOVERNANCE



PPATK mendorong penguatan peran lembaga regional (FATF Style Regional Bodies/FSRB) dan memperluas jejaring kerja sama bilateral dan multilateral

PPATK encourages strengthening the role of regional institutions (FATF Style Regional Bodies/FSRB) and expanding bilateral and multilateral cooperation networks.

ISU ASET VIRTUAL DAN KEJAHATAN SIBER VIRTUAL ASSETS AND CYBERCRIME



PPATK aktif dalam FATF *Virtual Asset Contact Group Meeting* dengan menegaskan pentingnya Keadilan regulatif dalam pengawasan VASPs, Pertukaran informasi lintas yurisdiksi, Interoperabilitas sistem pelaporan, Penguatan kapasitas pengawasan dan penerapan *travel rule*

PPATK actively participated in the FATF Virtual Asset Contact Group Meeting by emphasizing the importance of regulatory fairness in the supervision of VASPs, cross-jurisdictional information exchange, reporting system interoperability, strengthening supervisory capacity, and implementing the travel rule.

PANDUAN KEBIJAKAN DALAM BALI PROCESS POLICY GUIDANCE IN THE BALI PROCESS



PPATK terlibat aktif sebagai tim penyusun panduan pelacakan aliran dana dalam kasus perdagangan orang. Hal ini menunjukkan komitmen Indonesia dalam mempersempit ruang gerak pelaku kejahatan lintas negara

PPATK is actively involved as part of the team drafting guidelines for tracking the flow of funds in human trafficking cases. This demonstrates Indonesia's commitment to narrowing the scope of action for transnational criminals.



INISIATIF PENCEGAHAN RISIKO TPPU TPPT SEKTOR TERTENTU

INITIATIVES TO PREVENT MONEY LAUNDERING AND TERRORIST FINANCING IN SPECIFIC SECTORS

DALAM rangka pencegahan risiko TPPU dan TPPT, pada periode Semester I Tahun 2025 PPATK telah melaksanakan beberapa kegiatan antara lain:

AS part of efforts to prevent the risks of money laundering and terrorism financing, during the first semester of 2025 PPATK carried out several key activities, including:

RAPAT KOORDINASI EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM TPPU DENGAN MEMPERHATIKAN PENILAIAN RISIKO

COORDINATION MEETING ON THE EFFECTIVENESS OF ANTI-MONEY LAUNDERING LAW ENFORCEMENT WITH CONSIDERATION OF RISK ASSESSMENT

11 Maret 2025
11 March 2025

Jumlah Peserta : 1.700 + dari Penegak Hukum, Institusi Keuangan, Otoritas Terkait.
Number of Participants: 1,700+ consisting of Law Enforcement Officers, Financial Institutions, and Relevant Authorities.

Tujuan : meningkatkan efektivitas mekanisme dalam pemberantasan TPPU dan mengembalikan aset hasil kejahatan kepada negara
Objective: To enhance the effectiveness of mechanisms in combating money laundering (ML) and in recovering criminal assets for the state

PROGRAM MENTORING BERBASIS RISIKO (PROMENSISKO) 2025

RISK-BASED MENTORING PROGRAM (PROMENSISKO) 2025

8 Mei 2025
8 Mei 2025

Jumlah Peserta : 1.590 dari Penegak Hukum, Regulator, Pihak Pelapor, Pihak terkait lainnya.
Number of Participants: 1,590, consisting of law enforcement agencies, regulators, reporting entities, and other relevant stakeholders.

Narasumber : PPATK, Penegak Hukum, Otoritas Terkait
Speakers: PPATK, Law Enforcement, Related Authorities

Tujuan : meningkatkan kapasitas penegak hukum, regulator, pihak pelapor, dan pihak terkait lainnya dalam melakukan implementasi mitigasi risiko TPPU dan TPPT serta meningkatkan pemahaman tentang penanganan perkara berbasis risiko
Objective: To enhance the capacity of law enforcement agencies, regulators, reporting parties, and other relevant stakeholders in implementing risk mitigation for ML and TF, as well as to improve understanding of risk-based case handling.



PENYUSUNAN PENILAIAN RISIKO NASIONAL TERHADAP TPPU, TPPT, DAN PPSPM

PREPARATION OF NATIONAL RISK ASSESSMENT ON MONEY LAUNDERING, TERRORIST FINANCING, AND PROCEEDS OF CRIME

PENYUSUNAN NRA TPPU, TPPT, dan PPSPM Tahun 2025 ini melibatkan 31 Kementerian/Lembaga dan ditetapkan melalui Keputusan Kepala PPATK Nomor 101 Tahun 2025 tanggal 4 Maret 2025 tentang Tim Penyusunan Penilaian Risiko Nasional Tindak Pidana Pencucian Uang, Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, dan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal. Adapun sejumlah agenda yang telah dilaksanakan hingga Semester I 2025 ini antara lain :

THE preparation of the 2025 National Risk Assessment (NRA) on Money Laundering (ML), Terrorism Financing (TF), and Proliferation Financing (PF) involves 31 ministries/agencies and was established through the Head of PPATK Decree Number 101 of 2025 dated March 4, 2025, concerning the National Risk Assessment Team on Money Laundering, Terrorism Financing, and Proliferation Financing of Weapons of Mass Destruction. Several activities that have been carried out up to the first semester of 2025 include:

Kick-off Meeting pada 13 Maret 2025;
Kick-off Meeting on March 13, 2025;

Rapat pembahasan batasan dan ruang lingkup penilaian risiko nasional terhadap TPPU, TPPT, dan PPSPM pada 29 April 2025;
Meeting to discuss the scope and boundaries of the national risk assessment on ML, TF, and PF held on April 29, 2025;

Pengumpulan data internal PPATK pada Mei 2025;
Collection of PPATK internal data in May 2025

FGD pembahasan metodologi penilaian risiko nasional terhadap TPPU, TPPT, dan PPSPM dengan melibatkan sejumlah narasumber/ahli pada 27-28 Mei 2025; dan
Focus Group Discussion (FGD) on the methodology for the national risk assessment of ML, TF, and PF involving various experts/resource persons on 27-28 May 2025; and

FGD pembahasan faktor risiko dan instrumen kuesioner penilaian risiko nasional terhadap TPPU, TPPT, dan PPSPM dengan melibatkan sejumlah narasumber/ahli pada 24-25 Juni 2025.
Focus Group Discussion (FGD) on risk factors and questionnaire instruments for the national risk assessment of ML, TF, and PF involving various experts/resource persons on 24-25 June 2025.

PENYUSUNAN PENILAIAN RISIKO INDIVIDUAL NON-PROFIT ORGANIZATION (NPO) TERHADAP TINDAK PIDANA PENDANAAN TERORISME TAHUN 2025

PREPARATION OF INDIVIDUAL RISK ASSESSMENT FOR NON-PROFIT ORGANIZATIONS (NPOS) ON TERRORISM FINANCING CRIMES IN 2025

DALAM upaya peningkatan penilaian kepatuhan (*re-rating*) Indonesia terhadap rekomendasi 8 FATF pada tahun 2025 Pemerintah Indonesia bermaksud untuk menyusun penilaian risiko individual NPO bersama dengan 17 Kementerian/Lembaga yang tergabung dalam Tim Kolaboratif Penilaian Risiko Individual Nonprofit Organization terhadap pendanaan terorisme, yang melibatkan 12 Kementerian/Lembaga dan 5 Asosiasi NPO yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala PPATK Nomor 133 Tahun 2025 tanggal 11 Maret 2025 tentang Tim Kolaboratif Penilaian Risiko Individual Nonprofit Organization Terhadap Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. Adapun beberapa kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka penyusunan penilaian risiko individual NPO terhadap TPPT selama 1 Semester awal 2025 antara lain:

IN an effort to improve Indonesia's compliance assessment (*re-rating*) with FATF Recommendation 8 in 2025, the Government of Indonesia intends to develop an individual risk assessment of NPOs together with 17 Ministries/Agencies that are part of the Collaborative Team for Individual Risk Assessment of Nonprofit Organizations related to terrorism financing. This team involves 12 Ministries/Agencies and 5 NPO Associations, established through PPATK Head Decree Number 133 of 2025 dated 11 March 2025 concerning the Collaborative Team for Individual Risk Assessment of Nonprofit Organizations against Terrorism Financing. Several activities carried out during the first semester of 2025 in preparing the individual risk assessment of NPOs against TF include:

FGD pembahasan evaluasi risiko NPO terhadap TPPT pada 19 Mei 2025;
FGD on the evaluation of NPO risks related to terrorism financing, held on 19 May 2025

Pengumpulan data internal PPATK pada Mei 2025;
Collection of PPATK internal data in May 2025

Rapat pembahasan metodologi dan parameter/kriteria NPO berisiko tinggi pada 26 Juni 2025
Meeting to discuss methodology and parameters/criteria for high-risk NPOs on 26 June 2025

DATA INTELIJEN KEUANGAN

FINANCIAL INTELLIGENCE DATA

AUDIT kepatuhan merupakan salah satu instrumen strategis dalam memperkuat efektivitas rezim Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (APU PPT dan PPSPM). Melalui pendekatan berbasis risiko, audit kepatuhan bertujuan untuk mengevaluasi tingkat kepatuhan Pihak Pelapor terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ruang lingkup audit kepatuhan meliputi pengujian atas efektivitas penerapan PMPJ melalui lima pilar utama, yakni:

COMPLIANCE audit is one of the strategic instruments in strengthening the effectiveness of the Anti-Money Laundering, Counter-Terrorism Financing, and Counter-Proliferation Financing (AML/CFT/CPF) regime. Through a risk-based approach, compliance audits aim to evaluate Reporting Parties' adherence to prevailing laws and regulations. The scope of compliance audits includes testing the effectiveness of KYC implementation through five key pillars, namely:

PENGAWASAN aktif direksi, yang menilai sejauh mana manajemen puncak berperan aktif dalam mendukung kebijakan APU PPT dan PPSPM secara strategis dan operasional;

ACTIVE oversight by the board of directors, which assesses the extent to which top management is actively involved in supporting AML/CFT/CPF policies both strategically and operationally

KEBIJAKAN dan prosedur, yang mengkaji kesesuaian, kelengkapan, serta konsistensi pedoman internal dengan ketentuan eksternal;

POLICIES and procedures, which review the suitability, completeness, and consistency of internal guidelines with external regulations.

PENGENDALIAN internal, yang mengevaluasi keandalan sistem pengawasan dalam mendeteksi dan memitigasi risiko TPPU, TPPT, dan PPSPM secara efektif;

INTERNAL control, which evaluates the reliability of the monitoring system in effectively detecting and mitigating ML, TF, and PF risks.

SISTEM informasi dan pelaporan, yang menilai integritas, ketepatan, dan efisiensi sistem teknologi informasi serta akurasi pelaporan transaksi kepada PPATK; dan

INFORMATION and reporting systems, which assess the integrity, accuracy, and efficiency of information technology systems as well as the accuracy of transaction reporting to the FIU.

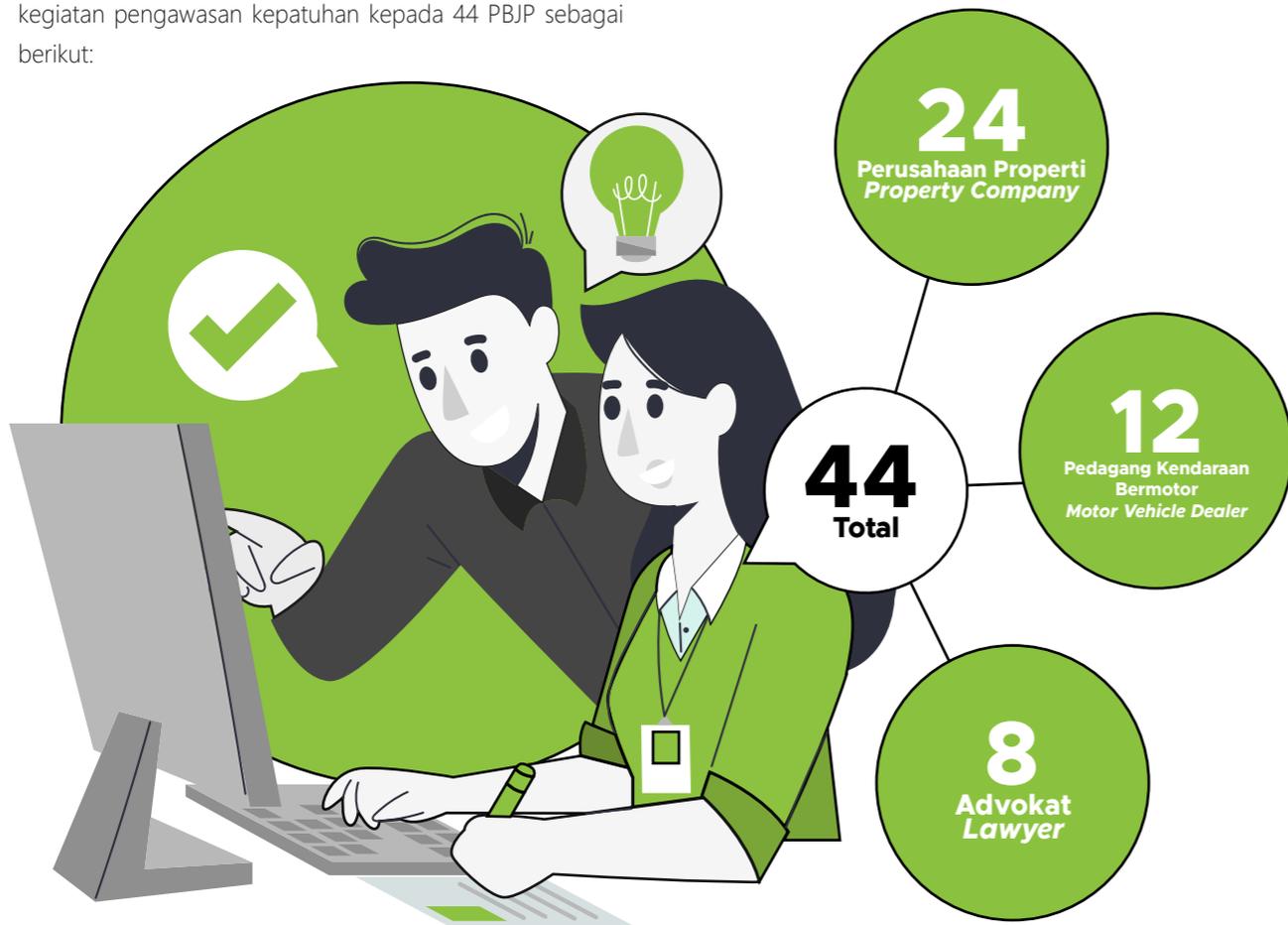
SUMBER daya manusia dan pelatihan, yang mengukur kecukupan kompetensi, kapasitas teknis, dan pemahaman SDM dalam menjalankan fungsi kepatuhan secara optimal.

HUMAN resources and training, which assess the adequacy of competencies, technical capacity, and understanding of personnel in effectively performing compliance functions.

SESUAI dengan tugas Direktorat Pengawasan Kepatuhan Penyedia Barang dan/atau Jasa Lain dan Profesi (DPK PBJP) untuk melaksanakan pengawasan terhadap kepatuhan PBJP salah satunya melalui kegiatan audit kepatuhan dan audit khusus. Pelaksanaan kegiatan audit dilakukan dalam rangka mengawasi kepatuhan Pihak Pelapor dalam menerapkan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) dan kewajiban pelaporan kepada PPAK.

Sampai dengan semester I tahun 2025, telah dilaksanakan kegiatan pengawasan kepatuhan kepada 44 PBJP sebagai berikut:

IN line with the duties of the Directorate of Compliance Supervision for Providers of Goods and/or Services and Professions (DPK PBJP) to oversee DNFBP compliance through compliance audits and special audits, as of the first semester of 2025, compliance supervision activities have been conducted for 44 DNFBP as follows:



DARI kegiatan audit kepatuhan selama satu semester, diperoleh rata-rata tingkat kepatuhan setelah audit sebesar 88,73%. Angka tersebut mencerminkan tingkat pemahaman dan kepatuhan PBJP Profesi dalam 5 pilar antara lain pengawasan aktif direksi, kebijakan dan prosedur, pengendalian internal, sistem informasi dan pelaporan, serta sumber daya manusia.

FROM the compliance audit activities conducted over one semester, an average compliance level of 88.73% was achieved. This figure reflects the understanding and adherence of PBJP professionals across the five pillars: active board oversight, policies and procedures, internal controls, information and reporting systems, and human resources.



SELAIN audit kepatuhan, DPK PBJP melaksanakan bimbingan teknis yang bersifat komunal terhadap 317 Pihak Pelapor pada semester I 2025. Materi yang disampaikan yaitu terkait Rezim APU PPT PPSPM, penerapan PMPJ, dan teknis tata cara pelaporan. Kegiatan bimtek juga diukur melalui *pre-test* maupun *post-test* bagi Pihak Pelapor.

IN addition to compliance audits, the DPK PBJP also conducted group-based technical guidance for 317 Reporting Parties during the first semester of 2025. The training covered the AML/CFT and WMD Financing regime, the implementation of Customer Due Diligence, and the technical procedures for reporting. The effectiveness of these sessions was measured through pre-tests and post-tests administered to the Reporting Parties.

PPATK DAN ARAH BARU KEBIJAKAN GLOBAL

PPATK AND THE NEW DIRECTION OF GLOBAL POLICY

SEBAGAI anggota aktif FATF, PPATK terus menunjukkan kontribusi nyata dalam membentuk arah kebijakan global rezim APUPPT. Peran ini diwujudkan antara lain melalui penugasan pegawai PPATK sebagai *assessor*, *reviewer*, *lead reviewer*, dan *expert* dalam proses Mutual Evaluation, penyusunan kajian FATF, serta berkontribusi secara aktif untuk mendorong arah kebijakan Rekomendasi FATF.

AS an active member of the FATF, PPATK continues to demonstrate a tangible contribution in shaping the global AML/CFT regime. This role is realized, among other things, through the assignment of PPATK personnel as assessors, reviewers, lead reviewers, and experts in the Mutual Evaluation process, in the preparation of FATF studies, and through active contributions to guiding the direction of FATF Recommendation policies.

PASCA bergabung sebagai anggota FATF ke-40, pegawai PPATK ditetapkan oleh FATF sebagai *Assessor*, *Reviewer*, dan *Expert* yang berperan krusial dalam Mutual Evaluation berbagai negara, yaitu Singapura, Turkiye, Filipina, Vietnam, Myanmar, Laos, Nepal, dan Niue.

FOLLOWING its accession as the 40th FATF member, PPATK personnel have been appointed by the FATF as Assessors, Reviewers, and Experts, playing a crucial role in the Mutual Evaluation of several countries, including Singapore, Turkey, the Philippines, Vietnam, Myanmar, Laos, Nepal, and Niue.

PPATK menjadi anggota tim penyusun kajian "Detecting, Disrupting and Investigating Online Child Sexual Exploitation" dengan kontribusi dalam bentuk studi kasus utama tentang pemanfaatan data keuangan oleh PPATK dalam mengungkap perkara eksploitasi seksual anak. Kontribusi lain yang sangat berdampak secara global adalah partisipasi PPATK dalam kajian FATF terkait dengan pendanaan proliferasi, risiko pendanaan terorisme, digitalisasi sistem pembayaran, dan pengkinian panduan asesmen risiko nasional (NRA).

PPATK became a member of the team preparing the study "Detecting, Disrupting and Investigating Online Child Sexual Exploitation," contributing key case studies on how PPATK utilizes financial data to uncover child sexual exploitation cases. Another globally impactful contribution is PPATK's participation in FATF studies on proliferation financing, terrorist financing risks, the digitalization of payment systems, and the updating of National Risk Assessment (NRA) guidance.

INDONESIA melalui PPATK bersama stakeholder terkait telah berperan aktif dalam menjaga perubahan kebijakan global Rekomendasi 16 (R.16) agar tidak mengganggu kepentingan nasional Indonesia, dengan memastikan Revisi R.16 tetap selaras dengan arah kebijakan pembangunan sistem pembayaran Indonesia, dan tidak hanya menguntungkan sistem pembayaran berbasis kartu, sekaligus juga menyuarakan pentingnya kesetaraan bagi perkembangan sistem pembayaran negara berkembang.

INDONESIA, through PPATK and relevant stakeholders, has played an active role in ensuring that global policy changes to Recommendation 16 (R.16) do not interfere with Indonesia's national interests. This has been achieved by ensuring that the revision of R.16 remains in line with the direction of Indonesia's payment system development policy and does not only benefit card-based payment systems, while also voicing the importance of equality for the development of payment systems in developing countries.

PPATK juga ikut menyusun pedoman untuk mengatasi dampak negatif yang tidak diinginkan (*unintended consequences*) dari kebijakan pengawasan terhadap organisasi nirlaba (NPO) yang tidak sesuai dengan pendekatan berbasis risiko. Hal ini penting agar upaya mencegah pendanaan terorisme tidak menghambat kegiatan sah NPO. Negara juga perlu memastikan NPO yang legal dan bermanfaat tetap bisa beroperasi dengan baik, karena hanya sebagian kecil NPO yang berpotensi disalahgunakan untuk tujuan terorisme.

PPATK also helped draft guidelines to address the unintended consequences of supervisory policies on non-profit organizations (NPOs) that are not in line with a risk-based approach. This is important so that efforts to prevent terrorism financing do not hinder the legitimate activities of NPOs. The state also needs to ensure that legal and beneficial NPOs can continue to operate properly, as only a small number of NPOs have the potential to be misused for terrorism purposes.





Chapter 6

Bab 6

Kolaborasi untuk Negeri

Collaboration for the Nation

JAGA MASA DEPAN SISTEM KEUANGAN NASIONAL

SAFEGUARDING THE FUTURE OF THE NATIONAL FINANCIAL SYSTEM

PERUBAHAN peta keuangan global membawa tantangan baru bagi Indonesia. Jika sebelumnya pencucian uang didominasi korupsi, narkoba, penipuan, dan perpajakan, kini aset kripto, fintech, dan perdagangan lintas negara dimanfaatkan sebagai sarana kejahatan keuangan. Kompleksitas ini tidak hanya mengancam stabilitas ekonomi, tetapi juga mengikis kepercayaan publik serta menghambat pencapaian Indonesia Emas 2045. PPATK merespons dengan memperkuat analisis intelijen keuangan, audit kepatuhan, serta penilaian risiko nasional. Upaya tersebut didukung program pencegahan sektoral, seperti mentoring berbasis risiko dan pengawasan lembaga nirlaba. Di tingkat global, PPATK aktif dalam forum FATF, APG, hingga Bali Process, menyuarakan kepentingan Indonesia sekaligus mendorong tata kelola keuangan internasional yang lebih adil. Langkah strategis semakin nyata setelah Indonesia menjadi anggota penuh BRICS pada 2025. Aliansi ekonomi ini membuka ruang kolaborasi internasional, khususnya di bidang anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme (APUPPT). Salah satu inisiatif penting BRICS adalah pembentukan BRICS AML/CFT Council, forum koordinasi menghadapi kejahatan keuangan lintas batas. Partisipasi PPATK di BRICS melengkapi kiprahnya di Egmont Group, FATF, APG, dan forum regional lain, menegaskan posisi Indonesia sebagai garda depan diplomasi keuangan global.

CHANGES in the global financial landscape pose new challenges for Indonesia. Whereas money laundering was previously dominated by corruption, narcotics, fraud, and taxation, cryptocurrencies, fintech, and cross-border trade are now being exploited as means of financial crime. This complexity not only threatens economic stability, but also erodes public trust and hinders the achievement of Indonesia Emas 2045. PPATK has responded by strengthening financial intelligence analysis, compliance audits, and national risk assessments. These efforts are supported by sectoral prevention programs, such as risk-based mentoring and supervision of non-profit organizations. At the global level, PPATK is active in forums such as FATF, APG, and the Bali Process, voicing Indonesia's interests while promoting fairer international financial governance. Strategic steps will become more apparent after Indonesia becomes a full member of BRICS in 2025. This economic alliance opens up opportunities for international collaboration, particularly in the areas of anti-money laundering and countering the financing of terrorism (AML/CFT). One of BRICS' important initiatives is the establishment of the BRICS AML/CFT Council, a coordination forum to tackle cross-border financial crimes. PPATK's participation in BRICS complements its work in the Egmont Group, FATF, APG, and other regional forums, confirming Indonesia's position as a frontrunner in global financial diplomacy.

PERKUAT SINERGI NASIONAL CEGAH PENCUCIAN UANG DAN PENDANAAN TERORISME

STRENGTHENING NATIONAL SYNERGY TO PREVENT MONEY LAUNDERING AND TERRORISM FINANCING

PPATK memperkuat pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, pendanaan terorisme, serta proliferasi senjata pemusnah massal melalui berbagai kolaborasi strategis. Pada semester I tahun 2025, sebanyak tujuh dokumen kerja sama difinalisasi, terdiri atas lima Nota Kesepahaman, satu Nota Kesepakatan Bersama, dan satu Perjanjian Kerja Sama dengan sejumlah kementerian dan lembaga, seperti Kementerian Hukum, ATR/BPN, BKN, BSSN, Kementerian Pertahanan, Kementerian Desa, hingga Otorita IKN. Implementasi kerja sama ini mencakup koordinasi, pertukaran informasi, pengembangan sistem, serta dukungan terhadap agenda nasional dan internasional, yang memperkuat sinergi kelembagaan sekaligus meningkatkan efektivitas pengawasan. Selama Januari–Juni 2025, PPATK juga aktif dalam 13 kegiatan utama lintas satgas dan desk tematik, termasuk isu terorisme, perdagangan orang, narkoba, korupsi, penyelundupan, hingga judi daring. Upaya ini tidak hanya berorientasi pada penegakan hukum, tetapi juga memperkuat tata kelola, kebijakan preventif, serta kepatuhan Indonesia terhadap standar internasional FATF.

PPATK strengthened the prevention and eradication of money laundering, terrorist financing, and proliferation of weapons of mass destruction through various strategic collaborations. In the first half of 2025, seven cooperation documents were finalized, comprising five Memoranda of Understanding, one Joint Agreement, and one Cooperation Agreement with several ministries and agencies, including the Ministry of Law and Human Rights, ATR/BPN, BKN, BSSN, Ministry of Defense, Ministry of Villages, and the IKN Authority. The implementation of these collaborations involves coordination, information exchange, system development, and support for both national and international agendas, reinforcing institutional synergy and enhancing supervisory effectiveness. Between January and June 2025, PPATK also actively participated in 13 major activities across task forces and thematic desks, covering issues such as terrorism, human trafficking, narcotics, corruption, smuggling, and online gambling. These efforts not only focus on law enforcement but also strengthen governance, preventive policies, and Indonesia's compliance with FATF international standards.

DORONG KOLABORASI ASEAN PERANGI CSE DAN CYBER FRAUD

ENCOURAGING ASEAN COLLABORATION TO COMBAT CSE AND CYBER FRAUD

PPATK terus mempertegas kontribusinya di tingkat regional dan global dalam memerangi kejahatan lintas negara, terutama terkait eksploitasi seksual anak (CSE), perdagangan orang, dan penipuan siber. Pada Financial Intelligence Consultative Group (FICG) Annual Plenary Meeting, PPATK memimpin penyusunan indikator *red flag* transaksi mencurigakan terkait CSE yang menghimpun data dari Asia Tenggara, Australia, Selandia Baru, hingga kawasan Pasifik. Kontribusi ini turut membantu FIU dan penyedia jasa keuangan mendeteksi transaksi terkait CSE secara lebih akurat. Selain itu, PPATK juga menyusun daftar *person-of-interest* mencakup pelaku, fasilitator, hingga korban, serta menjadi *Co-lead* bersama AUSTRAC dalam penanganan *cyber-enabled fraud* yang melibatkan pusat operasi di Kamboja, Myanmar, dan Laos. Sementara itu di kawasan regional, PPATK memimpin kajian tipologi perdagangan orang dan *cyber scam hubs* bersama UNODC, serta aktif dalam forum ASEAN dan internasional lainnya. Selain itu kontribusi PPATK juga terlihat dalam Egmont Group, termasuk kajian CSE, *artificial intelligence*, pengembangan kurikulum global ECOFEL, hingga dukungan teknis bagi peningkatan kapasitas FIU Bhutan.

PPATK has continued to assert its contribution at regional and global levels in combating cross-border crimes, particularly in areas such as child sexual exploitation (CSE), human trafficking, and cyber fraud.

At the Financial Intelligence Consultative Group (FICG) Annual Plenary Meeting, PPATK led the development of red-flag indicators for suspicious transactions related to CSE, compiling data from Southeast Asia, Australia, New Zealand, and the Pacific region. This contribution has helped FIUs and financial service providers detect CSE-related transactions more accurately.

In addition, PPATK also prepared a person-of-interest list covering perpetrators, facilitators, and victims, and served as Co-lead alongside AUSTRAC in addressing cyber-enabled fraud involving operational hubs in Cambodia, Myanmar, and Laos.

Regionally, PPATK led typology studies on human trafficking and cyber scam hubs with UNODC and actively participated in ASEAN and other international forums. Its contributions are also evident within the Egmont Group, including studies on CSE, artificial intelligence, the development of the global ECOFEL curriculum, and providing technical support to enhance the capacity of Bhutan's FIU.



MEMIMPIN PENYUSUNAN INDIKATOR RED FLAG CSE

LEADING THE DEVELOPMENT OF RED-FLAG INDICATORS FOR CSE

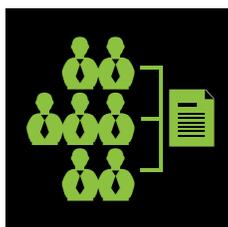


PADA FICG Annual Plenary Meeting, PPATK memimpin penyusunan indikator *red flag* untuk transaksi mencurigakan terkait eksploitasi seksual anak (CSE). Cakupan data dalam kajian tersebut meliputi wilayah Asia Tenggara, Australia, Selandia Baru, dan Pasifik. Output dari kajian ini dapat digunakan oleh FIU dan penyedia jasa keuangan untuk deteksi transaksi keuangan yang terindikasi terkait dengan CSE.

AT the FICG Annual Plenary Meeting, PPATK led the development of red-flag indicators for suspicious transactions related to child sexual exploitation (CSE). The study covered data from Southeast Asia, Australia, New Zealand, and the Pacific region. The outputs of this study can be used by FIUs and financial service providers to detect financial transactions potentially linked to CSE.

PEMBENTUKAN DAFTAR PERSON-OF-INTEREST TERKAIT EKSPLOITASI SEKSUAL ANAK

DEVELOPMENT OF A PERSON-OF-INTEREST LIST RELATED TO CHILD SEXUAL EXPLOITATION



PPATK memimpin proyek penyusunan daftar dalam lingkup program FICG & APRG (Egmont Group). Daftar ini terdiri atas pelaku, terduga pelaku, fasilitator, konsumen, dan korban. Proyek ini bertujuan untuk memperkuat koordinasi antar-FIU dalam pemberantasan eksploitasi seksual anak.

PPATK lead a project to develop a list within the framework of the FICG & APRG programs (Egmont Group). The list includes perpetrators, suspected perpetrators, facilitators, consumers, and victims. The project aims to strengthen coordination among FIUs in combating child sexual exploitation.

CO-LEAD PROYEK PENANGANAN CYBER-ENABLED FRAUD

CO-LEAD IN HANDLING CYBER-ENABLED FRAUD



PPATK bekerja sama dengan AUSTRAC akan menangani perkara yang utamanya akan berfokus pada penipuan daring, perdagangan orang, judi online, dan narkoba. Termasuk juga menargetkan jaringan kejahatan di Kamboja, Myanmar, Laos, dan sekitarnya.

PPATK and AUSTRAC have agreed to collaborate in handling cases primarily focused on online fraud, human trafficking, online gambling, and narcotics. The collaboration also targets criminal networks in Cambodia, Myanmar, Laos, and surrounding areas.

CO-LEAD PROYEK PENANGANAN CYBER-ENABLED FRAUD

CO-LEAD OF THE CYBER-ENABLED FRAUD MANAGEMENT PROJECT



CO-LEAD proyek kajian eksploitasi seksual anak, Anggota tim kajian dengan topik *artificial intelligence*, Kontributor pengembangan kurikulum sertifikasi FIU global (ECOFEL)

CO-LEAD of the child sexual exploitation study project, Member of the research team on artificial intelligence, Contributor to the development of the global FIU certification curriculum (ECOFEL).

KAJIAN TIPOLOGI APG BERSAMA UNODC

TYOLOGY STUDY OF APG IN COLLABORATION WITH UNODC



PPATK memimpin proyek bersama UNODC terkait Human Trafficking & Cyber Scam Hubs. Kajian ini akan mengidentifikasi modus pencucian uang dan kerentanan yang dimanfaatkan sindikat kejahatan terorganisasi.

PPATK is leading a joint project with UNODC on Human Trafficking and Cyber Scam Hubs. This study aims to identify money laundering schemes and vulnerabilities exploited by organized crime syndicate.

LEAD DALAM PROYEK VA/VASP NETWORK

LEAD PROJECT ON VA/VASP NETWORK

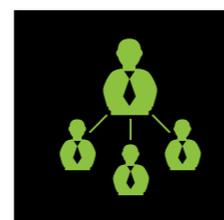


PPATK menjadi pemimpin dalam kelompok kerja yang berfokus mengkaji penyalahgunaan aset virtual dan virtual asset service providers (VASPs) serta mendorong kerja sama dan pemahaman lintas yurisdiksi di Asia Pasifik.

PPATK serves as the lead in a working group focused on analyzing the misuse of virtual assets and Virtual Asset Service Providers (VASPs), while promoting cross-jurisdictional cooperation and understanding across the Asia-Pacific region.

PARTISIPASI DALAM FORUM REGIONAL DAN MULTILATERAL

PARTICIPATION IN REGIONAL AND MULTILATERAL FORUMS



PPATK aktif berpartisipasi dalam: *ASEAN Senior Officials Meeting on Transnational Crime (SOMTC)*, *IJ Workshop on Virtual Assets and Fintech Risks*, *APG Diversity and Inclusion Network*, Diskusi ASEAN terkait prinsip *non-penalization* untuk korban perdagangan orang

PPATK actively participates in: the ASEAN Senior Officials Meeting on Transnational Crime (SOMTC), the IJ Workshop on Virtual Assets and Fintech Risks, the APG Diversity and Inclusion Network, and ASEAN discussions on the non-penalization principle for victims of human trafficking.

DUKUNGAN TEKNIS BAGI NEGARA LAIN

TECHNICAL SUPPORT FOR OTHER COUNTRIES



PPATK menjadi lokasi penempatan sementara bagi Unit Intelijen Keuangan (FIU) Bhutan, yang dilaksanakan dalam bentuk pertukaran praktik terbaik dan pemberian bantuan teknis terkait pendekatan berbasis risiko serta peningkatan pemahaman terhadap tipologi kejahatan.

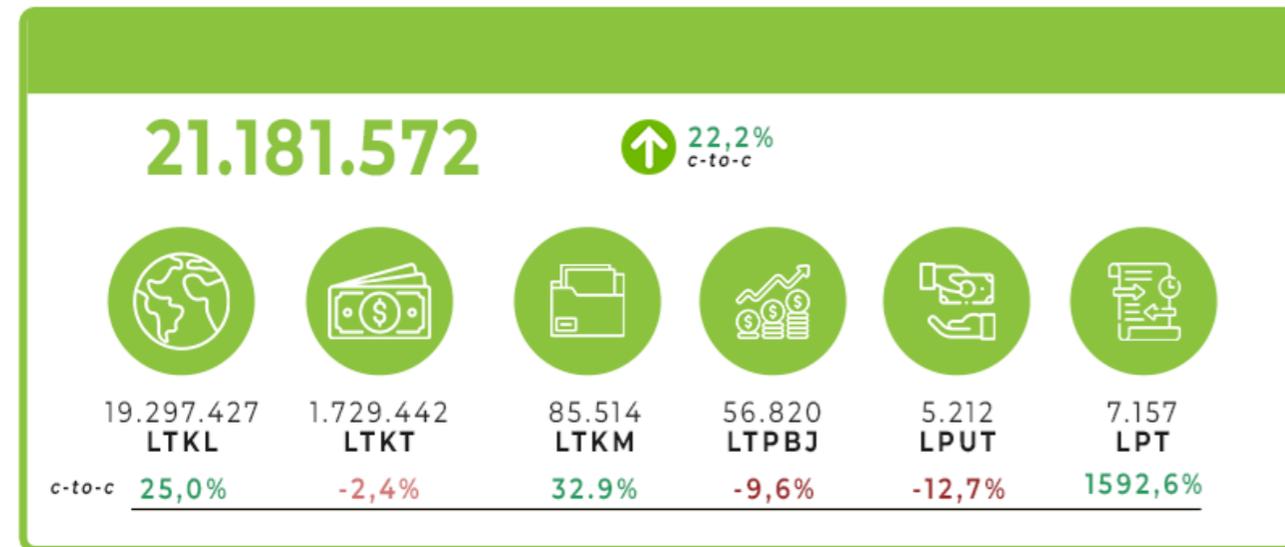
PPATK served as the secondment host for Bhutan's FIU, providing a platform for sharing best practices, delivering technical assistance on risk-based approaches, and enhancing understanding of crime typologies.

AWAL 2025, LAPORAN TRANSAKSI KE PPATK NAIK SIGNIFIKAN

EARLY 2025, TRANSACTION REPORTS TO PPATK INCREASE SIGNIFICANTLY

DALAM upaya pencegahan dan pemberantasan TPPU serta TPPT, PPATK berperan sebagai lembaga utama yang menyajikan data statistik APUPPT sesuai amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013. Menariknya, pada periode Januari hingga Juni 2025, jumlah laporan yang diterima PPATK meningkat 22,2% dibandingkan periode yang sama pada tahun 2024

IN its efforts to prevent and combat money laundering and terrorism financing, PPATK serves as the primary agency providing APUPPT statistical data in accordance with the mandates of Law No. 8 of 2010 and Law No. 9 of 2013. Notably, during the period from January to June 2025, the number of reports received by PPATK increased by 22.2% compared to the same period in 2024.



*Keterangan: * Perubahan c-to-c merupakan perbandingan Jan - Jun 2025 terhadap Jan - Jun 2024*

DORONG PERBAIKAN FIR 2024 LEWAT PEMBINAAN PIHAK PELAPOR

PROMOTING IMPROVEMENTS IN THE 2024 FIR THROUGH REPORTING ENTITY CAPACITY-BUILDING



PPATK menyelesaikan Financial Integrity Rating on Money Laundering and Terrorism Financing (FIR on ML/TF) 2024 terhadap 410 pihak pelapor, baru terdapat 281 pihak pelapor (69%) yang masuk dalam kategori baik atau sangat baik. Sementara itu, sebanyak 53 pihak pelapor masih dalam kategori cukup baik (13%), kurang baik (12%), dan bahkan tidak baik (6%). Sebagai tindak lanjut, pembinaan dilakukan di Surabaya, Bali, dan Semarang pada Februari – April 2025 untuk evaluasi, solusi, dan komitmen perbaikan APUPPT guna memperkuat integritas keuangan nasional.

PPATK completed the 2024 Financial Integrity Rating on Money Laundering and Terrorism Financing (FIR on ML/TF) for 410 reporting entities. Of these, only 281 entities (69%) were rated good or very good. Meanwhile, 53 entities fell into the categories of fairly good (13%), poor (12%), or very poor (6%). As a follow-up, capacity-building sessions were held in Surabaya, Bali, and Semarang from February to April 2025 to evaluate performance, provide solutions, and secure commitments for APUPPT improvements, thereby strengthening national financial integrity.

GOAML TAMBAH RIBUAN PIHAK PELAPOR BARU

GOAML ADDS THOUSANDS OF NEW REPORTING PARTIES

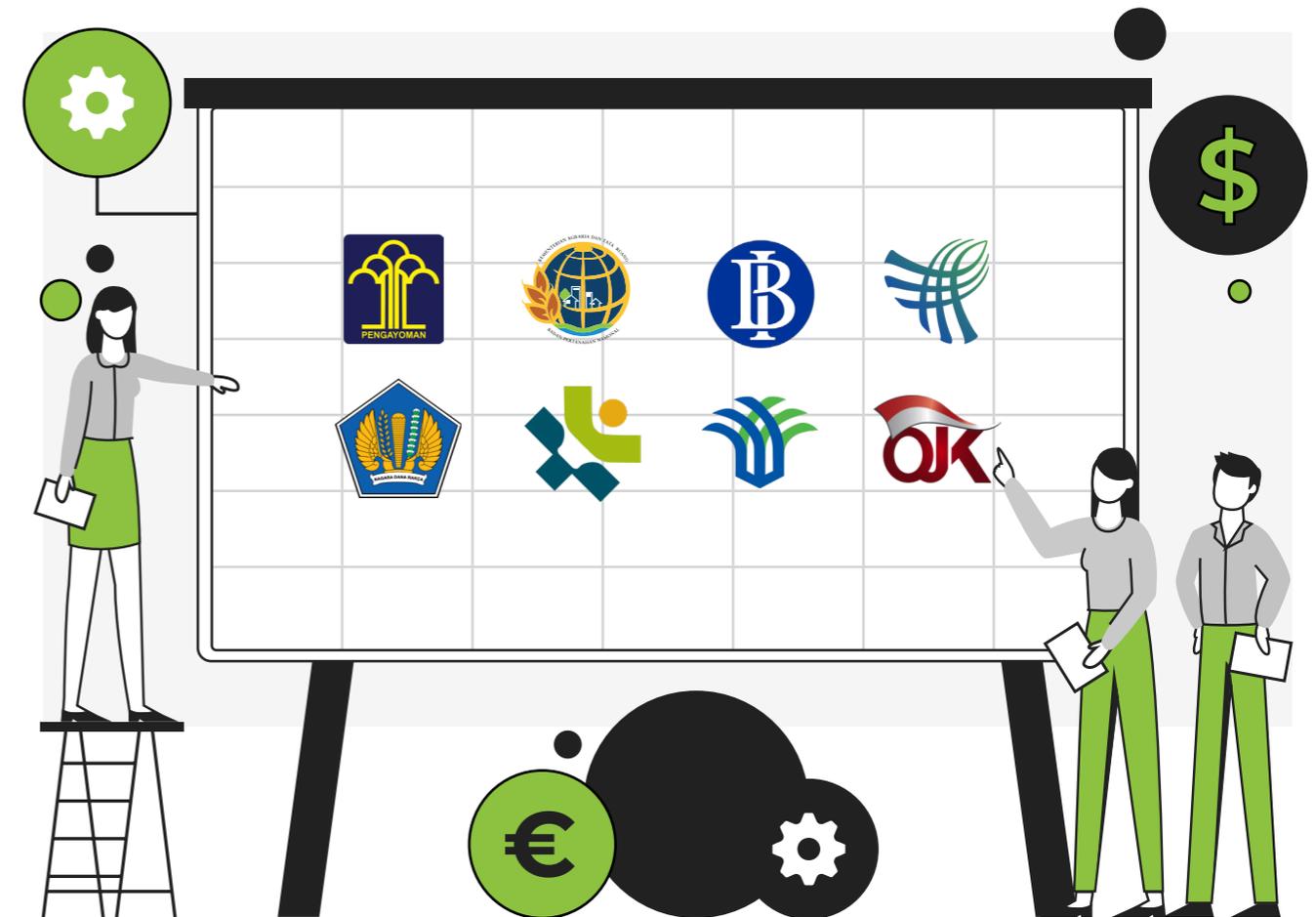


PADA Semester I 2025, PPATK memverifikasi setiap permohonan registrasi pada aplikasi GoAML. Hingga 30 Juni 2025, tercatat 45.020 Pihak Pelapor aktif, naik 6,39% dari akhir 2024. Rinciannya meliputi 6.446 Penyedia Jasa Keuangan, 2.308 Penyedia Barang/Jasa Lain, serta 36.266 Profesi.

IN the first half of 2025, PPATK verified every registration request on the GoAML application. As of June 30, 2025, there were 45,020 active Reporting Entities, representing a 6.39% increase from the end of 2024. The breakdown includes 6,446 Financial Service Providers, 2,308 Other Goods/Services Providers, and 36,266 Professionals.

PPATK secara aktif berkoordinasi dengan Lembaga Pengawas dan Pengatur (LPP) serta stakeholder terkait untuk merekonsiliasi data Pihak Pelapor, sehingga pengawasan dan pembinaan dalam meningkatkan kepatuhan APUPPT dapat berjalan lebih efektif. Pada Semester I Tahun 2025, koordinasi dan korespondensi telah dilaksanakan bersama beberapa LPP dan stakeholder guna memperkuat upaya pencegahan serta pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia.

PPATK actively coordinates with Supervisory and Regulatory Agencies (LPP) and relevant stakeholders to reconcile data from Reporting Parties, so that supervision and guidance in improving APUPPT compliance can be carried out more effectively. In the first semester of 2025, coordination and correspondence were carried out with several LPPs and stakeholders to strengthen efforts to prevent and eradicate money laundering in Indonesia.



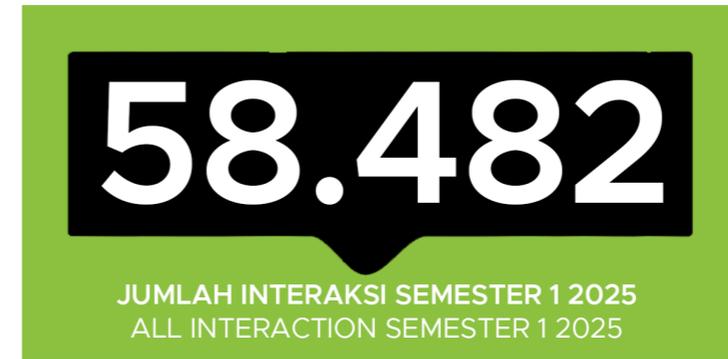
SELAMA Semester I Tahun 2025, PPATK secara rutin melakukan pembinaan kepada Pihak Pelapor yang belum registrasi di sistem goAML, dengan tujuan mendorong penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) serta pelaksanaan kewajiban pelaporan secara efektif sesuai ketentuan, berdasarkan data dari Direktori Pihak Pelapor dan berbagai pemangku kepentingan terkait.

DURING the first half of 2025, PPATK routinely conducted guidance for Reporting Entities that had not yet registered in the goAML system. The aim was to encourage the implementation of the Know Your Customer (KYC) principles and ensure effective fulfillment of reporting obligations in accordance with regulations, based on data from the Reporting Entities Directory and other relevant stakeholders.



PPATK juga menghadirkan Klinik goAML, layanan konsultasi daring untuk mendampingi Pihak Pelapor dalam mengatasi kendala registrasi dan pelaporan melalui sistem goAML.

PPATK also launched the goAML Clinic, an online consultation service that supports Reporting Entities in overcoming registration and reporting challenges within the goAML system.



STATISTIK LAPORAN LAYANAN BANTUAN SEMESTER 1 2025

HELPLINE STATISTICS
1ST SEMESTER 2025

LAYANAN BANTUAN MELALUI WHATSAPP BUSINESS
HELPLINE VIA CONVERSATION



LAYANAN BANTUAN MELALUI TATAP MUKA
HELPLINE VIA ON SITE MEETING



LAYANAN BANTUAN MELALUI EMAIL
HELP LINE VIA EMAIL



MEMBANGUN GENERASI TANGGUH LAWAN KEJAHATAN KEUANGAN

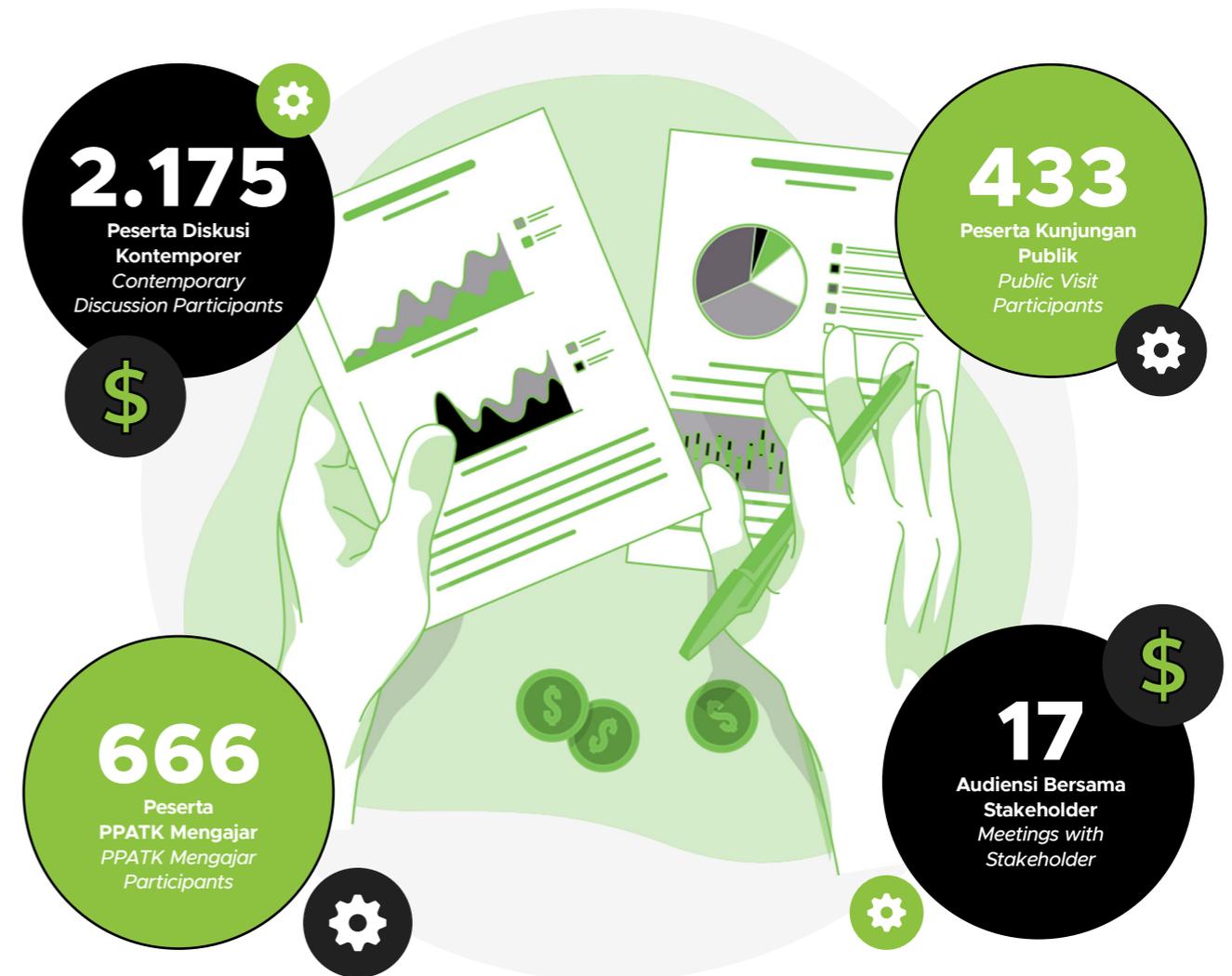
BUILDING A RESILIENT GENERATION AGAINST FINANCIAL CRIME

PADA semester pertama tahun 2025, PPAK semakin gencar menanamkan kesadaran publik tentang pentingnya pencegahan pencucian uang dan pendanaan terorisme melalui beragam program edukasi. Melalui kunjungan publik, tujuh sekolah dan universitas berkesempatan melihat langsung bagaimana PPAK bekerja menjaga integritas sistem keuangan nasional. Tidak hanya itu, program unggulan PPAK Mengajar hadir di berbagai kota, menyapa akademisi, mahasiswa, hingga masyarakat umum dengan pengetahuan tentang modus pencucian uang dan strategi pencegahannya. Sosialisasi bersama organisasi nirlaba (NPO) juga mulai digerakkan, menjadikan mereka mitra strategis dalam membangun benteng pencegahan. Edukasi juga semakin diperkuat lewat forum diskusi kontemporer (DISKO), yang menghadirkan pandangan beragam dari berbagai kalangan. Semua kegiatan ini menjadi wujud komitmen PPAK untuk membangun kesadaran kolektif sekaligus menumbuhkan generasi muda yang peduli hukum, berintegritas, dan tangguh menghadapi ancaman kejahatan keuangan. Sebagai pelengkap, publik juga dapat belajar langsung melalui Jurnal AML/CFT serta perpustakaan PPAK yang menyediakan berbagai literatur edukatif.

IN the first semester of 2025, PPAK intensified its efforts to raise public awareness about the importance of preventing money laundering and terrorist financing through various educational programs. Through public visits, seven schools and universities had the opportunity to see firsthand how PPAK works to maintain the integrity of the national financial system. Moreover, PPAK's flagship program, PPAK Mengajar, was rolled out in various cities, engaging academics, students, and the general public with knowledge about money laundering methods and prevention strategies. Collaboration with non-profit organizations (NPOs) was also initiated, positioning them as strategic partners in building a preventive barrier. Education is further strengthened through contemporary discussion forums (DISKO), which bring together diverse perspectives from various sectors. All these activities reflect PPAK's commitment to fostering collective awareness while nurturing a young generation that is law-abiding, integrity-driven, and resilient in the face of financial crime threats. As a complement, the public can also learn directly through the AML/CFT Journal and PPAK's library, which provides various educational materials.

STATISTIK EDUKASI PUBLIK SEMESTER 1 2025

PUBLIC EDUCATION STATISTICS SEMESTER I 2025



PERPUSTAKAAN, RUANG EDUKASI PUBLIK ANTI PENCUCIAN UANG

LIBRARY, ANTI-MONEY LAUNDERING PUBLIC EDUCATION ROOM

PERPUSTAKAAN PPATK kini tampil dengan wajah baru yang lebih segar dan inovatif. Setelah melalui proses renovasi, ruang baca tersebut bertransformasi menjadi *Knowledge Center* dengan konsep interior bergaya *co-working space* modern. Suasana ini membuat siapa pun yang datang betah berlama-lama, baik untuk membaca, berdiskusi, bekerja, maupun sekadar melepas penat dari rutinitas sehari-hari. Dengan ribuan koleksi literatur, mulai dari buku, hingga konten digital, perpustakaan PPATK hadir bukan hanya sebagai pusat informasi, melainkan juga sebagai sarana edukasi yang memperkuat pemahaman publik mengenai isu Anti Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism (AML/CFT). Keberadaannya tidak hanya memberi manfaat bagi pegawai dan masyarakat Indonesia, tetapi juga menjadi inspirasi bagi mitra internasional. Melengkapi perannya, PPATK juga menghadirkan AML/CFT Journal, yang hingga semester pertama tahun 2025 telah menerbitkan satu edisi, menjadi wadah berbagi riset, gagasan, serta praktik terbaik di bidang pencegahan pencucian uang dan pendanaan terorisme.

STATISTIK LAPORAN LAYANAN PERPUSTAKAAN

8.821 Eksemplar
Koleksi Buku

974 Kunjungan
Internal dan Eksternal

THE PPATK Library now presents a fresh and innovative new look. Following a renovation, the reading space has transformed into a Knowledge Center with a modern co-working space concept. This atmosphere makes visitors feel at ease to stay longer, whether for reading, discussions, working, or simply taking a break from daily routines. With thousands of collections ranging from books to digital content, the PPATK Library stands not only as an information hub but also as an educational platform that strengthens public understanding of Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism (AML/CFT) issues. Its presence benefits both employees and the wider Indonesian public, while also serving as an inspiration for international partners. Complementing its role, PPATK also publishes the AML/CFT Journal, which by the first semester of 2025 had released one edition, providing a platform for sharing research, ideas, and best practices in the fight against money laundering and terrorism financing.

STATISTIK LAPORAN LAYANAN JURNAL AML/CFT

12.437 Total Page Views
2.072 Rata-Rata Per bulan

6.497 Total Session
1.082 Rata-Rata Per bulan

5.559 Total Visitors
926 Rata-Rata Per bulan

5.395 Total Session
899 Rata-Rata Per bulan

KOMITMEN DATA PPATK BERBUAH PENGHARGAAN

PPATK'S DATA COMMITMENT RECOGNIZED WITH AN AWARD

KOMITMEN PPATK terhadap pengelolaan data pemerintah terbukti semakin kuat. Hasilnya pun terlihat dari berbagai capaian di tingkat nasional. Berdasarkan penilaian tahun 2024, Indeks Pembangunan Statistik (IPS) PPATK meraih nilai 2,65 dengan predikat "Baik", lebih tinggi dari rata-rata nasional yang berada di angka 2,35. Penilaian ini dilakukan oleh BPS melalui Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) yang mencakup 5 domain dan 38 indikator. Tak hanya itu, PPATK berhasil meraih nilai Indeks Satu Data Indonesia (SDI) sebesar 70,96 dengan predikat "Baik", jauh melampaui rata-rata nasional yang hanya berada di angka 45,49, sebagaimana hasil evaluasi Kementerian PPN/Bappenas. Atas capaian tersebut, PPATK juga memperoleh penghargaan peringkat II dengan kategori AA "Sangat Memuaskan" dari Arsip Nasional Republik Indonesia, sebagai bentuk pengakuan atas komitmen dan kinerja unggulnya.

THE PPATK's commitment to government data management continues to grow stronger, reflected in significant national achievements. Based on the 2024 assessment, PPATK achieved a Statistical Development Index (IPS) score of 2.65 with a "Good" rating, outperforming the national average of 2.35. The assessment, conducted by BPS through the Sectoral Statistics Implementation Evaluation (EPSS), covered 5 domains and 38 indicators.

In addition, PPATK recorded an impressive score of 70.96 in the One Data Indonesia (SDI) Index with a "Good" rating, far exceeding the national average of 45.49, according to the evaluation by the Ministry of National Development Planning (Bappenas).

For these achievements, PPATK was also awarded second place with an AA "Highly Satisfactory" rating by the National Archives of the Republic of Indonesia (ANRI), marking recognition of its commitment and outstanding performance.



GLOSARIUM

GLOSSARY

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	<i>Government Performance Accountability System</i>
AML	<i>Anti Money Laundering</i>
Anti-Money Laundering and Counter-Terrorism Financing	<i>Anti-Money Laundering and Counter-Terrorism Financing</i>
Arsip Nasional Republik Indonesia	<i>National Archives of The Republic Indonesia</i>
Aparat Penegak Hukum	<i>Law Enforcement Officers/Agencies</i>
Aparat Penegak Hukum	<i>Law Enforcement Officers/Agencies</i>
Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme	<i>Anti-Money Laundering and Counter-Terrorism Financing</i>
Association of Southeast Asian Nations	<i>Association of Southeast Asian Nations</i>
Aparatur Sipil Negara	<i>Civil Servant</i>
Badan Pengawas Pemilihan Umum	<i>General Election Supervisory Agency</i>
Bank Indonesia	<i>Central Bank of Indonesia</i>
Barang Milik Negara	<i>State-owned Asset</i>
Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia	<i>National Anti Narcotics Agency</i>
Badan Nasional Penanggulangan Terorisme	<i>National Anti Terrorism Board</i>
Badan Pemeriksa Keuangan	<i>Indonesian Audit Board</i>
Bank Perkreditan Rakyat	<i>Rural Bank</i>
Collaborative Analysis Team (CAT)	<i>Collaborative Analysis Team</i>
Cross Border Cash Carrier (CBCC)	<i>Cross Border Cash Carrier</i>
Counter ISIS Finance Group	<i>Counter ISIS Finance Group</i>
Cyber Security Maturity	<i>Cyber Security Maturity</i>
Direktorat Jenderal Pajak	<i>Directorate General of Taxes</i>
Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris	<i>List of Suspected Terrorist Group and Organization</i>
Pengaduan Masyarakat	<i>Public Complaints</i>
Financial Action Task Force (FATF)	<i>Financial Action Task Force</i>
Focus Group Discussion	<i>Focus Group Discussion</i>

Financial Intelligence Consutative Group (FIGG)	<i>Financial Intelligence Consutative Group</i>
Financial Crimes Enforcement	<i>Financial Crimes Enforcement</i>
Financial Integrity Rating on Money Laundering and Terrorism Financing (FIR on MLTF)	<i>Financial Integrity Rating on Money Laundering and Terrorism Financing</i>
Financial Intelligence Unit (FIU)	<i>Financial Intelligence Unit</i>
Green Financial Crime (GFC)	<i>Green Financial Crime</i>
Hasil Analisis	<i>Analysis Result</i>
Hari Anti Narkotika Internasional	<i>International No Drugs Day</i>
Hubungan Masyarakat	<i>Public Relations</i>
Hasil Pemeriksaan	<i>Examination Report</i>
International Cooperation Review Group	<i>International Cooperation Review Group</i>
Indeks Efektivitas (IE)	<i>Effectiveness Index</i>
International Funds Transfer Instruction	<i>International Funds Transfer Instruction</i>
Indikator Kinerja Kegiatan	<i>Activity Performance Indicator</i>
Indikator Kinerja Utama	<i>Key Performance Indikator</i>
Informasi	<i>Information</i>
Immediate Outcome	<i>Immediate Outcome</i>
Islamic State of Iraq and Syria (ISIS)	<i>Islamic State of Iraq and Syria</i>
International Organization for Standardization	<i>International Organization for Standardization</i>
Indeks Tata Kelola Pengadaan	<i>Procurement Governance Index</i>
Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah	<i>Ministries/Institutions/Regional Work Units</i>
Keamanan Informasi	<i>Information Security</i>
Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)	<i>Budget User Authority</i>
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)	<i>Indonesia's Corruption Eradication Commission</i>
Komisi Pemilihan Umum (KPU)	<i>General Election Commissions</i>
Koperasi Simpan Pinjam (KSP)	<i>Savings and Loan Association</i>
Konferensi Tingkat Tinggi (KTT)	<i>International Summit</i>
Kelompok Usaha Penukaran Valuta Asing (KUPVA)	<i>Foreign Exchange Business Group</i>
Laporan Operasional	<i>Operational Report</i>
Lembaga Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan Kearsipan	<i>Archives Education and Training Organizing Institutions</i>
Lembaga Penyelenggara Jasa Kearsipan	<i>Institutions Archive Services Organizer</i>

Lembaga Pengawas Pengatur (LPP)	<i>Regulatory Supervisory Agencies</i>
Laporan Pemberi Sumbangan Dana Kampanye	<i>Campaign Fund Contribution Report</i>
Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	<i>Ministry of Cooperatives and SMEs of The Republic of Indonesia.</i>
Mutual Evaluation Report (MER)	<i>Mutual Evaluation Report</i>
Memorandum of Understanding (MoU)	<i>Memorandum of Understanding</i>
Medium Term Notes	<i>Medium Term Notes</i>
Malaysian Ringgit	<i>Malaysian Ringgit</i>
Negara Islam Indonesia	<i>Indonesian Islamic State</i>
"Prinsip-prinsip atau keyakinan dasar yang dipegang teguh seorang individu atau organisasi dalam menjalankan aktivitasnya"	<i>"Core Value : basic principles or beliefs that an individual or organization adheres to in carrying out its activities"</i>
Negara Kesatuan Republik Indonesia	<i>Unitary State of the Republic of Indonesia</i>
"Seseorang atau perusahaan yang namanya digunakan untuk pembelian suatu benda seperti saham, tanah dan bangunan, dan lainnya tetapi sebenarnya bukan pemilik asli dari benda tersebut"	<i>A person or company whose name is used to purchase an object such as shares, land and buildings, etc. but who is not actually the original owner of the object</i>
National Risk Assessment	<i>National Risk Assessment</i>
Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria	<i>Standard Procedure Norms and Criteria</i>
Online Public Access Catalogue (OPAC)	<i>Online Public Access Catalogue</i>
Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	<i>Increased Use of Domestic Products</i>
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	<i>Empowerment of State Apparatus and Bureaucratic Reform</i>
Penyedia Barang dan Jasa	<i>Provider of Goods and Services</i>
Penyedia Barang dan/atau Jasa dan Profesi	<i>Goods and/or Services Provider and Professionals</i>
Policy Development Group	<i>Policy Development Group</i>
"Tindakan mencegah pentransferan, pengubahan bentuk, penukaran, penempatan, pembagian, perpindahan, atau pergerakan dana untuk jangka waktu tertentu"	<i>Bloking</i>
Pemilihan Umum (PEMILU)	<i>Election</i>
"Suatu upaya perbuatan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang/ dana atau Harta Kekayaan hasil tindak pidana melalui berbagai transaksi keuangan agar uang atau Harta Kekayaan tersebut tampak seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah/legal"	<i>"An attempt to hide or disguise the origin of money/funds or assets resulting from criminal acts through various financial transactions so that the money or assets appear as if they come from activities valid/legal"</i>

"Segala perbuatan dalam rangka menyediakan, mengumpulkan, memberikan, atau meminjamkan Dana, baik langsung maupun tidak langsung, dengan maksud untuk digunakan dan/atau yang diketahui akan digunakan untuk melakukan kegiatan terorisme, organisasi teroris, atau teroris."	<i>"Terrorism Funding is any action in the context of providing, collecting, giving or lending funds, either directly or indirectly, with the intention of being used and/or known to be used to carry out terrorist activities, terrorist organizations or terrorists."</i>
Pemilihan Kepala Daerah	<i>Regional Head Elections</i>
Penyedia Jasa Keuangan (PJK)	<i>Financial Service Providers</i>
Penyelenggara Jasa Pembayaran Layanan Remitansi	<i>Remittance Service Payment Service Provider</i>
Program Kerja Pengawasan Tahunan	<i>Annual Supervision Work Program</i>
Perjanjian Kerja Sama (PKS)	<i>Cooperation Agreement</i>
Pekerja Migran Indonesia	<i>Indonesian Migrant Workers</i>
Peraturan Menteri Keuangan	<i>Regulation of Minister of Finance</i>
Prinsip Mengenali Pengguna Jasa	<i>Principles of Recognizing Service Users</i>
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	<i>Non-tax Revenue</i>
Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI)	<i>Indonesian National Police</i>
Perpustakaan Digital PPAK	<i>PPAK Digital Library</i>
Pejabat Pembuat Komitmen	<i>Commitment Making Official</i>
Penyidik Pegawai Negeri Sipil	<i>Civil Servants Investigator</i>
Public Private Partnership	<i>Public Private Partnership</i>
Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal	<i>Proliferation of Weapons of Mass Destruction</i>
Bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian, keterampilan atau kejuruan tertentu	<i>A paid occupation, especially one that involves prolonged training and a formal qualification</i>
Penyelenggara Transfer Dana	<i>Remittance Companies</i>
Petunjuk Teknis Operasional	<i>Operational Intructions</i>
Pusat Pendidikan dan Latihan	<i>Educational and Training Center</i>
Pedagang Valuta Asing	<i>Authorized Money Changer</i>
Rapat Koordinasi Nasional	<i>National Coordination Meeting</i>
"Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme"	<i>National Action Plan for Preventing Violent Extremism that Leads to Terrorism</i>
Reformasi Birokrasi	<i>Bureaucratic Reform</i>
Risk Based Approach	<i>Risk Based Approach</i>
Rencana Strategis	<i>Strategic Plan</i>

Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara	<i>State Property Requirement Plan</i>
Penggunaan Rekening Dana Kampanye	<i>Use of Unreported Campaign Fund Accounts</i>
Rencana Penarikan Dana	<i>Fund Withdrawal Plan</i>
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional	<i>National Medium Term Development Plan</i>
Rencana Pembangunan Jangka Panjang	<i>National Long Term Development Plan</i>
Risk, Trends and Methods Group	<i>Risk, Trends and Methods Group</i>
Rencana Umum Pengadaan	<i>General Procurement Plan</i>
Rancangan Undang - Undang	<i>Draft Bill</i>
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	<i>Government Agency Performance Accountability System</i>
Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi	<i>Agency Level Financial Application System</i>
Standar Akuntansi Pemerintahan	<i>Government Accounting Standards</i>
Satu Data Indonesia	<i>One Indonesian Data</i>
Sumber Daya Manusia	<i>Human Resources Development</i>
Singapore Dollar	<i>Singapore Dollar</i>
Sistem Manajemen Aset Negara	<i>State Asset Management System</i>
Sistem Informasi Penanganan Kejahatan Ekonomi	<i>Statistical Data for Handling Economic Crimes</i>
Sasaran Kinerja Pegawai	<i>Key Performance Indikator</i>
"Standar Nasional Indonesia The International Organization for Standardization/International Electrotechnical Commission"	<i>"Indonesian National Standard The International Organization for Standardization/International Electrotechnical Commission"</i>
Standar Operasional Prosedur	<i>Standard Operational Procedure</i>
Survei Persepsi Anti Korupsi	<i>Anti Corruption Perception Survey</i>
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	<i>Electronic Based Government System</i>
Survei Penilaian Integritas	<i>Integrity Assesment Survey</i>
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	<i>Government Internal Control System</i>
Survei Persepsi Kualitas Pelayanan	<i>Service Quality Perception Survey</i>
Sistem Pengadaan Secara Elektronik	<i>Electronic Procurement System</i>
Penilaian Risiko Sektoral	<i>Sectoral Risk Assessment</i>
Satgas Waspada Investasi	<i>Investment Alert Task Force</i>
Tahun Anggaran	<i>Fiscal Year</i>
Thai Baht	<i>Thai Baht</i>
Teknologi Informasi	<i>Information Technology</i>

Transaksi Keuangan Mencurigakan	<i>Suspicious Financial Transactions</i>
Tindak Pidana	<i>Criminal Offense</i>
Tindak Pidana Asal	<i>Predicate Crimes</i>
Tindak Pidana Pendanaan Terorisme	<i>Terrorism Financing Crimes</i>
Tindak Pidana Pencucian Uang	<i>Money Laundering</i>
Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa	<i>Goods/Services Procurement Work Unit</i>
Kegiatan yang mendasari sebuah transaksi	<i>Activities that underlie a transaction</i>
Unit Pemilik Risiko	<i>Risk Unit Owner</i>
United States Dollar	<i>United States Dollar</i>
Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani	<i>Clean and Serving Bureaucratic Area</i>
Wilayah Bebas Korupsi	<i>Corruption Free Area</i>
Warga Negara Asing	<i>Foreign Citizen</i>
Wajar Tanpa Pengecualian	<i>Unqualified Opinion</i>
Zona Integritas	<i>Integrity Zones</i>
Teknologi Finansial	<i>Financial Technology</i>

LAPORAN SEMESTER | MID-YEAR REPORT
TAHUN 2025



INDONESIA
OFFICIAL 40TH MEMBER
since October 2022

PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN
Jl. Ir. H. Juanda No. 35 Jakarta Pusat
Call Center 021-195
www.ppatk.go.id